

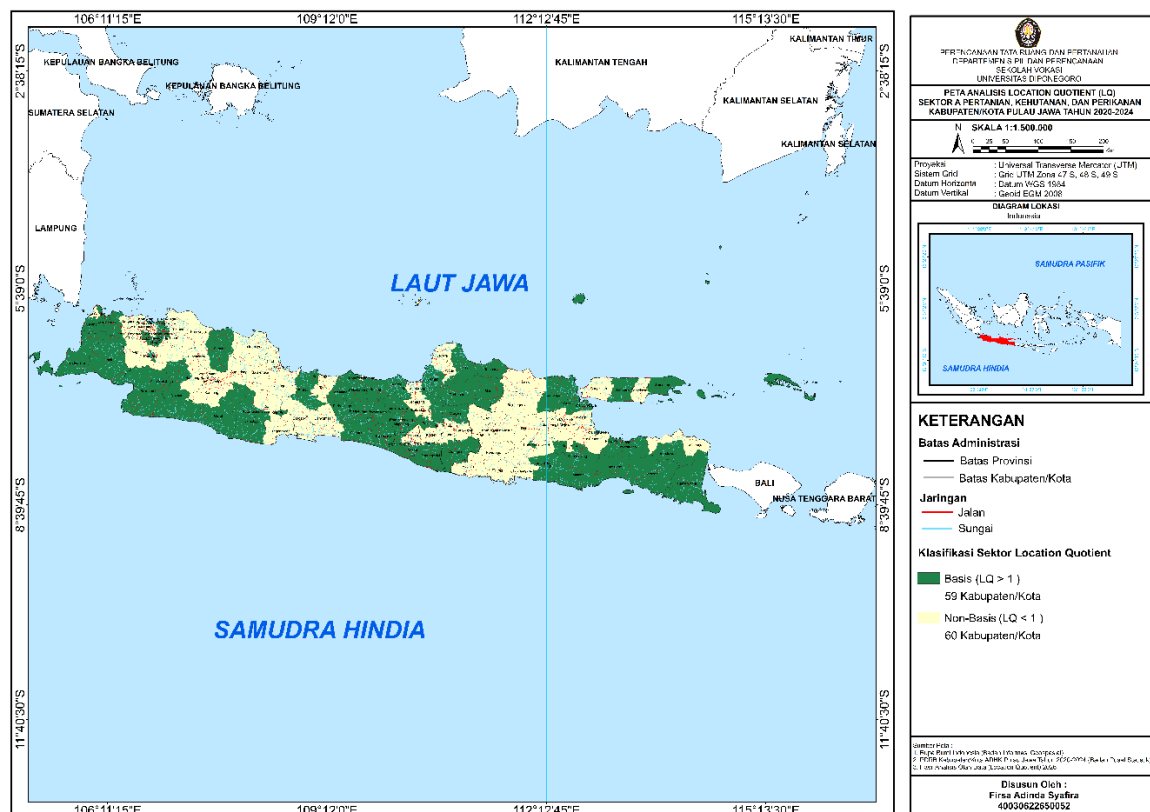
## BAB 4

# ANALISIS TIPOLOGI DAN SEBARAN SPASIAL SEKTOR EKONOMI

### 4.1 Analisis Ekonomi Pulau Jawa

#### 4.1.1 Analisis Ekonomi Sektor Primer

Kelompok sektor primer yang terdiri dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Sektor A) serta Sektor Pertambangan dan Penggalian (Sektor B) divisualisasikan untuk melihat pola ekonomi wilayah terhadap sumber daya alam. Pola persebaran pada sektor berpusat pada wilayah perdesaan dan pesisir yang memiliki akses terhadap lahan pertanian produktif dan sumber daya mineral. Pemetaan spasial sektor primer dilakukan untuk memahami sumber daya alam masih menjadi penggerak ekonomi lokal, serta mengidentifikasi wilayah-wilayah yang memiliki dependensi pada sektor ini namun belum mampu meningkatkan daya saing kompetitifnya secara regional. Berikut merupakan visualisasi peta persebaran Sektor A dan Sektor B. Sektor A mencakup aktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor utama perekonomian pada wilayah non-metropolitan di Pulau Jawa.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 1 Peta Analisis Location Quotient Sektor A

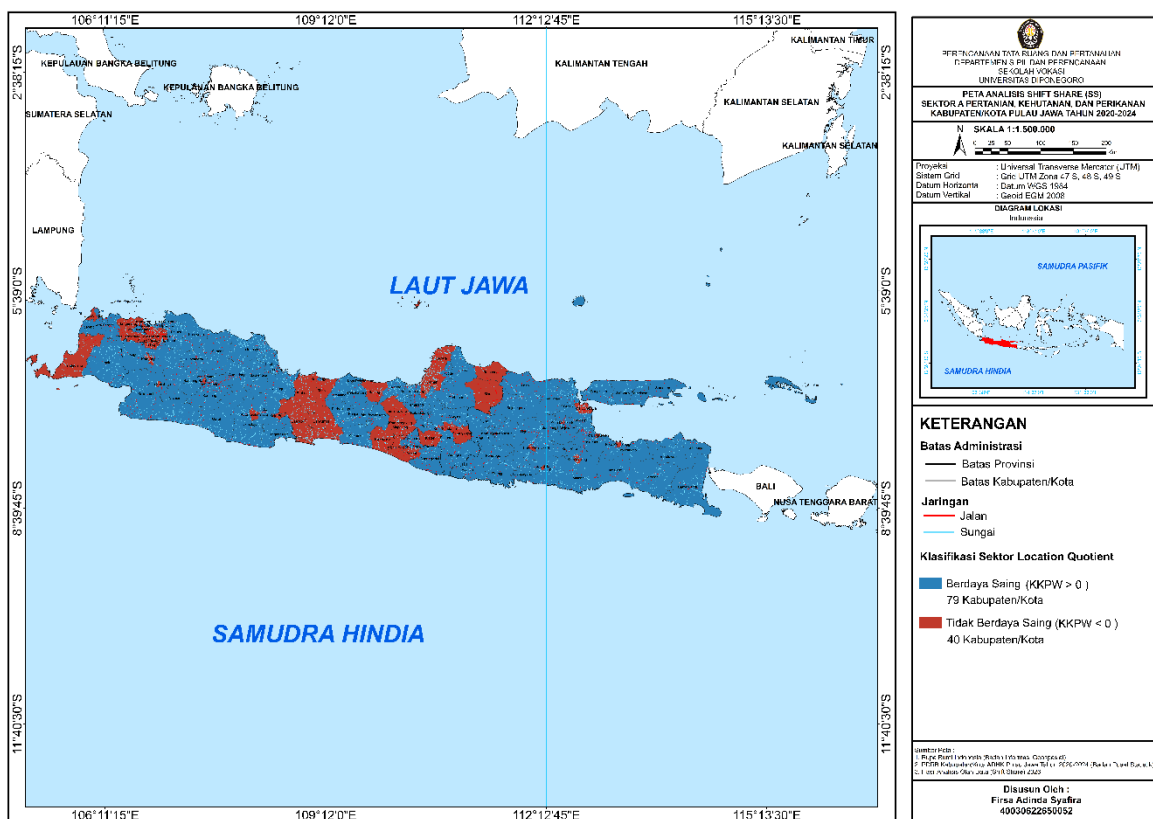
Nilai LQ di atas 1,00 menunjukkan bahwa sektor ini menjadi sektor basis artinya kontribusinya terhadap perekonomian daerah melebihi rata-rata Pulau Jawa dan produknya berpotensi diekspor ke luar wilayah.

Analisis KPPW Sektor A menggambarkan daya saing pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada masing-masing kabupaten/kota dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan sektor yang sama di wilayah acuan. Nilai KPPW positif menunjukkan bahwa sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata regional sehingga mencerminkan adanya keunggulan kompetitif. Sebaliknya, nilai KPPW negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor relatif lebih lambat dibandingkan wilayah acuan sehingga mengindikasikan daya saing yang lebih rendah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 66 kabupaten/kota yang memiliki nilai KPPW positif dan 53 kabupaten/kota yang memiliki nilai KPPW negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh wilayah di Pulau Jawa masih mampu mempertahankan daya saing sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama periode analisis. Sebaran wilayah dengan KPPW positif umumnya berada pada daerah yang masih memiliki basis sumber daya alam yang kuat serta didukung oleh aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang relatif berkembang.

Wilayah dengan nilai KPPW positif menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai sektor basis, tetapi juga mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata regional. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kemampuan wilayah dalam meningkatkan produktivitas sektor primer melalui pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan akses pasar, serta dukungan infrastruktur penunjang kegiatan produksi. Daerah-daerah yang memiliki kombinasi nilai LQ tinggi dan KPPW positif dapat dikategorikan sebagai wilayah yang memiliki sektor pertanian unggulan karena mampu mempertahankan spesialisasi sekaligus daya saing sektora. Sebaliknya, wilayah dengan nilai KPPW negatif menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian masih berkontribusi terhadap perekonomian daerah, laju pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan wilayah acuan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti berkurangnya luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses teknologi, maupun pergeseran struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier. Fenomena ini banyak dijumpai pada wilayah perkotaan dan kawasan metropolitan yang mengalami transformasi ekonomi sehingga kontribusi sektor pertanian semakin menurun.

Secara spasial, pola persebaran nilai KPPW Sektor A menunjukkan bahwa daya saing sektor pertanian masih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik agraris, terutama di bagian selatan Jawa Barat, kawasan Muria Raya dan Wanarakuti di Jawa Tengah, serta wilayah Tapal Kuda dan Mataraman di Jawa Timur. Sementara itu, wilayah perkotaan besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta cenderung menunjukkan daya saing yang lebih rendah karena struktur perekonomiannya telah didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan industri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan karakteristik perkembangan ekonomi antara wilayah berbasis sumber daya alam dan wilayah yang telah mengalami transformasi menuju ekonomi perkotaan.



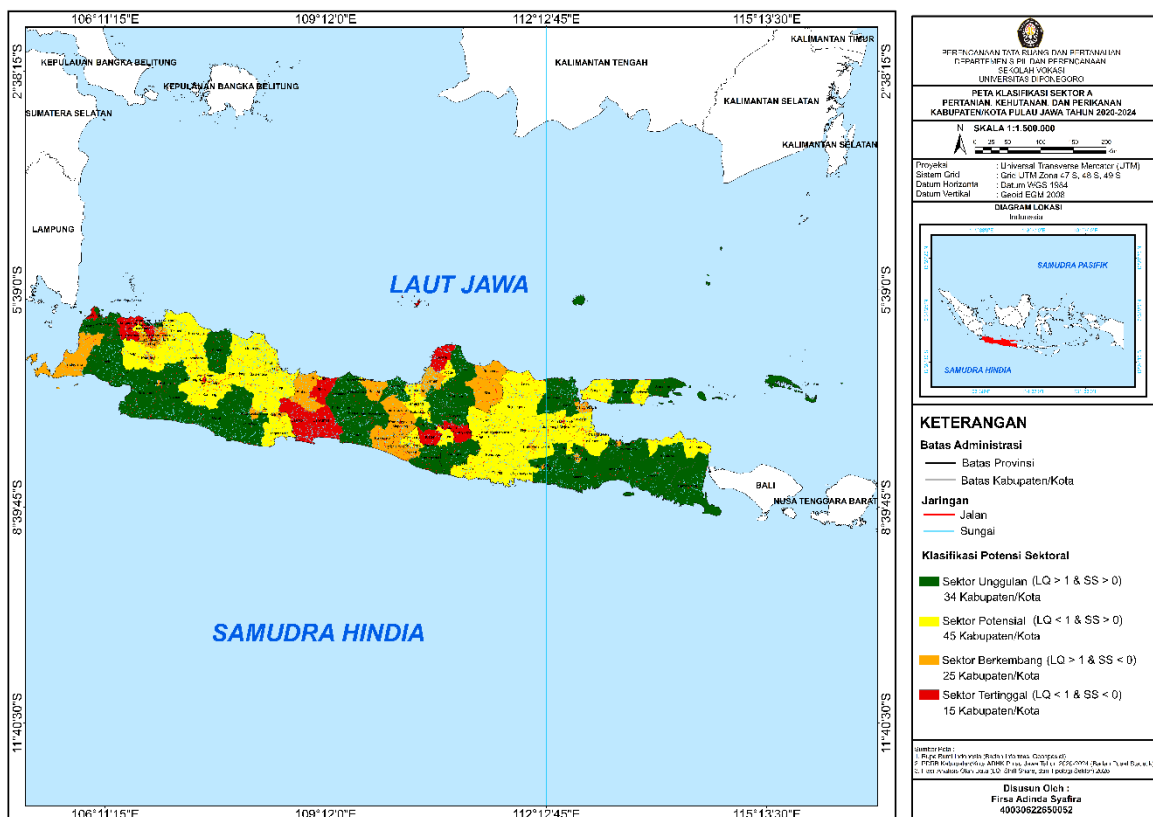
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 2 Peta Analisis *Shift Share* KPPW Sektor A

Sektor A menunjukkan 79 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di daerah tersebut lebih cepat dibandingkan rata-rata Pulau Jawa sehingga memiliki keunggulan kompetitif. Sementara itu, 40 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan pertumbuhan sektor lebih lambat dari rata-rata kabupaten/kota lainnya. KPPW Sektor A memperlihatkan perbedaan antara wilayah metropolitan dan non-

metropolitan. Nilai KPPW tertinggi terdapat di Kabupaten Sukabumi (KPPW = 81,65) dan Kabupaten Cianjur (KPPW = 81,62) yang membentuk aglomerasi pertumbuhan pertanian di koridor selatan Jawa Barat, diikuti Kabupaten Sumedang (KPPW = 80,99) dan Kabupaten Bogor (KPPW = 80,43). Di Jawa Timur, kabupaten-kabupaten Tapal Kuda seperti Kabupaten Sumenep (KPPW = 55,06), Kabupaten Probolinggo (KPPW = 54,24), dan Kabupaten Situbondo (KPPW = 54,16) juga mencatat nilai tinggi. Sebaliknya, nilai KPPW terendah berada pada Kota Mojokerto (-53,19), Kota Blitar (-53,16), Kota Malang (-53,09), Kota Surabaya (-53,06), dan Kota Kediri (-53,05), menunjukkan sektor pertanian yang terdapat di kota-kota tersebut mengalami penyusutan drastis akibat alih fungsi lahan dan transformasi ke sektor jasa.

Peta Sektor A di bawah ini memperlihatkan dominasi warna hijau sektor unggulan yang terkonsentrasi pada pertanian Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Timur bagian barat, membentang dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, hingga Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun. Wilayah-wilayah berwarna kuning sektor berkembang tersebar merata di kabupaten-kabupaten yang mengalami tekanan alih fungsi lahan dan urbanisasi.

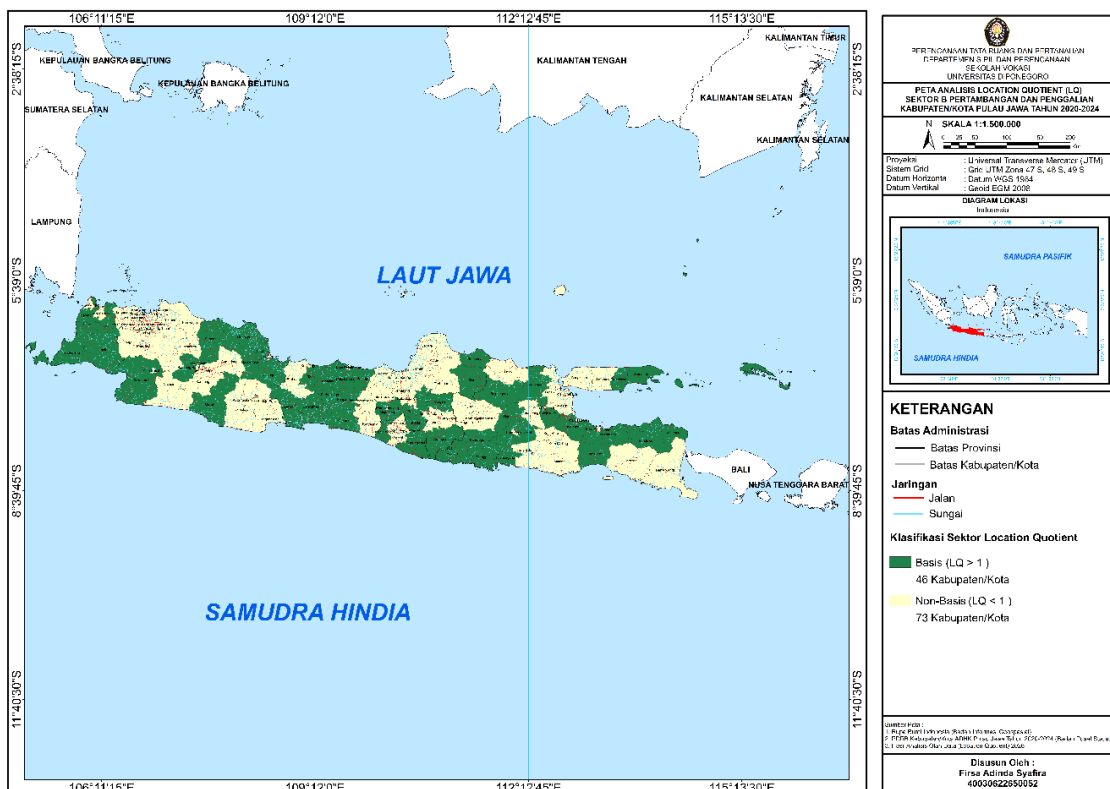


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 3 Peta Sektor A Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor dengan persebaran paling luas di Pulau Jawa. Dari 119 wilayah yang dianalisis, sebanyak 34 wilayah memiliki Sektor A sebagai sektor unggulan ( $LQ > 1$  dan  $KPPW > 0$ ), mencerminkan bahwa sepertiga wilayah Pulau Jawa bertumpu pada pertanian sebagai sektor basis yang kompetitif. Wilayah-wilayah ini umumnya merupakan kabupaten dengan lahan pertanian luas di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Lumajang. Sebanyak 24 wilayah memiliki sektor pertanian sebagai basis namun tidak lagi kompetitif ( $LQ > 1$ ,  $KPPW < 0$ ) kategori Sektor Berkembang, menunjukkan bahwa meskipun pertanian mendominasi struktur ekonomi lokal, pertumbuhannya mulai tertinggal dari rata-rata Pulau Jawa.

Sektor B meliputi kegiatan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, serta penggalian bahan galian golongan C. Distribusi sektor ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam yang tidak merata antarwilayah. Nilai LQ yang tinggi pada sektor ini terkonsentrasi di kabupaten-kabupaten yang memiliki cadangan sumber daya mineral atau migas yang signifikan.



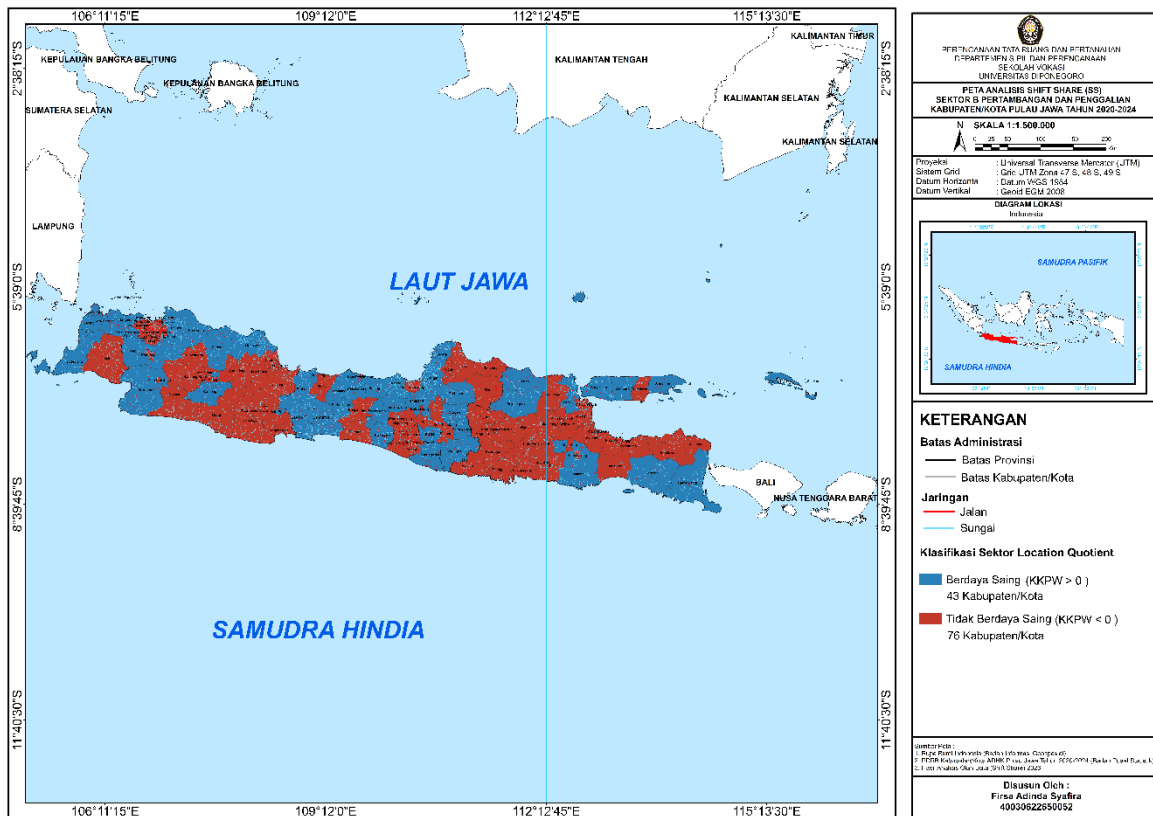
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 4 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor B

Sektor KPPW Sektor B menunjukkan pertumbuhan kegiatan pertambangan dan penggalian di masing-masing kabupaten/kota. Sektor B memiliki karakteristik pertumbuhan yang sangat bergantung pada siklus harga komoditas, kebijakan perizinan pertambangan, dan ketersediaan cadangan sumber daya pada masing-masing wilayah. Oleh karena itu, perubahan nilai KPPW pada sektor B tidak stabil dibandingkan sektor-sektor lainnya karena dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun kondisi geologi yang berbeda antarwilayah.

Nilai KPPW positif menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian pada suatu daerah tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor yang sama pada wilayah acuan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya daya saing sektoral yang baik serta kemampuan daerah dalam memanfaatkan sumber daya tambang yang dimiliki. Nilai KPPW negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian lebih lambat dibandingkan rata-rata regional sehingga mencerminkan daya saing yang relatif rendah. Secara spasial, daya saing sektor pertambangan dan penggalian cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar. Kabupaten Blora dan Bojonegoro menjadi wilayah yang memiliki peran strategis dalam aktivitas migas nasional sehingga sektor pertambangan masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Kabupaten Garut, Pandeglang, dan Lebak menunjukkan adanya spesialisasi sektor penggalian yang didukung oleh ketersediaan bahan galian mineral dan batuan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi maupun industri.

Sebagian besar wilayah perkotaan dan kawasan metropolitan menunjukkan nilai LQ yang sangat rendah bahkan mendekati nol karena tidak memiliki sumber daya tambang yang signifikan maupun keterbatasan ruang untuk pengembangan aktivitas pertambangan. Kondisi tersebut terlihat pada kawasan Jabodetabekjur yang struktur perekonomiannya telah didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, transportasi, dan kegiatan perkotaan lainnya. Akibatnya, kontribusi sektor pertambangan terhadap pembentukan PDRB wilayah menjadi kecil. Sektor pertambangan dan penggalian di Pulau Jawa memiliki pola persebaran yang lebih terbatas dibandingkan sektor primer lainnya karena keberadaannya sangat ditentukan oleh faktor geologi. Jumlah kabupaten/kota yang berstatus basis relatif lebih sedikit dibandingkan sektor pertanian, beberapa wilayah yang memiliki cadangan sumber daya tambang mampu menunjukkan tingkat spesialisasi yang tinggi.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 5 Peta Analisis *Shift Share* KPPW Sektor B

Sektor B menunjukkan 43 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian di daerah tersebut lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara 76 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan pertumbuhan sektor lebih lambat dari rata-rata kabupaten/kota lainnya. Peta KPPW Sektor B didominasi oleh wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam batuan dan mineral. Nilai KPPW tertinggi ada di Kabupaten Bogor ( $KKPW = 109,38$ ), diikuti Kabupaten Tuban ( $KKPW = 108,23$ ), Kabupaten Banyuwangi ( $KKPW = 106,43$ ), Kabupaten Jember ( $KKPW = 105,45$ ), dan Kabupaten Malang ( $KKPW = 101,44$ ). Terdapat di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan ( $KKPW = 53,53$ ), Kabupaten Sampang ( $KKPW = 72,19$ ), Kabupaten Sumenep ( $KKPW = 93,17$ ). Sebaliknya, nilai KPPW terendah terdapat di Kota Surakarta ( $-45,51$ ), Kota Salatiga ( $-39,46$ ). Menunjukkan tidak adanya aktivitas pertambangan di kota dan telah beralih menjadi pusat jasa.

Peta Sektor B memperlihatkan sebaran yang sangat tidak merata. Warna hijau sektor unggulan terkonsentrasi di beberapa koridor utara Jawa Barat Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, kawasan selatan Jawa Tengah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas,



tidak merata di Pulau Jawa. Wilayah-wilayah seperti Kabupaten Indramayu (LQ=1,840; KPPW=86,60), Kabupaten Banyumas (LQ=2,230; KPPW=6,56), Kabupaten Cilacap, dan beberapa kabupaten di Jawa Timur menjadi sektor unggulan pertambangan. Dominasi kategori Sektor Tertinggal 47 wilayah angka tertinggi di antara sektor primer dan sekunder. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Jawa tidak memiliki basis pertambangan yang memadai dan tidak mampu bersaing dalam sektor ini secara regional.

**Tabel 4. 1 Jumlah Tipologi Sektor Primer**

| No. | Klasifikasi Tipologi       | Nilai LQ dan Nilai ShiftShare                   | Sektor A<br>Pertanian, Kehutanan,<br>Perikanan | Sektor B<br>Pertambangan dan<br>Penggalian |
|-----|----------------------------|---|--|--|
| 1.  | Sektor Unggulan (Hijau)    | LQ>1 (Basis) & KPPW>0 (Berdaya Saing)           | 34 Wilayah                                     | 17 Wilayah                                 |
| 2.  | Sektor Potensial (Oranye)  | LQ<1 (Non-Basis) & KPPW>0 (Berdaya Saing)       | 45 Wilayah                                     | 26 Wilayah                                 |
| 3.  | Sektor Berkembang (Kuning) | LQ>1 (Basis) & KPPW<0 (Tidak Berdaya Saing)     | 24 Wilayah                                     | 29 Wilayah                                 |
| 4.  | Sektor Tertinggal (Merah)  | LQ<1 (Non-Basis) & KPPW<0 (Tidak Berdaya Saing) | 15 Wilayah                                     | 47 Wilayah                                 |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

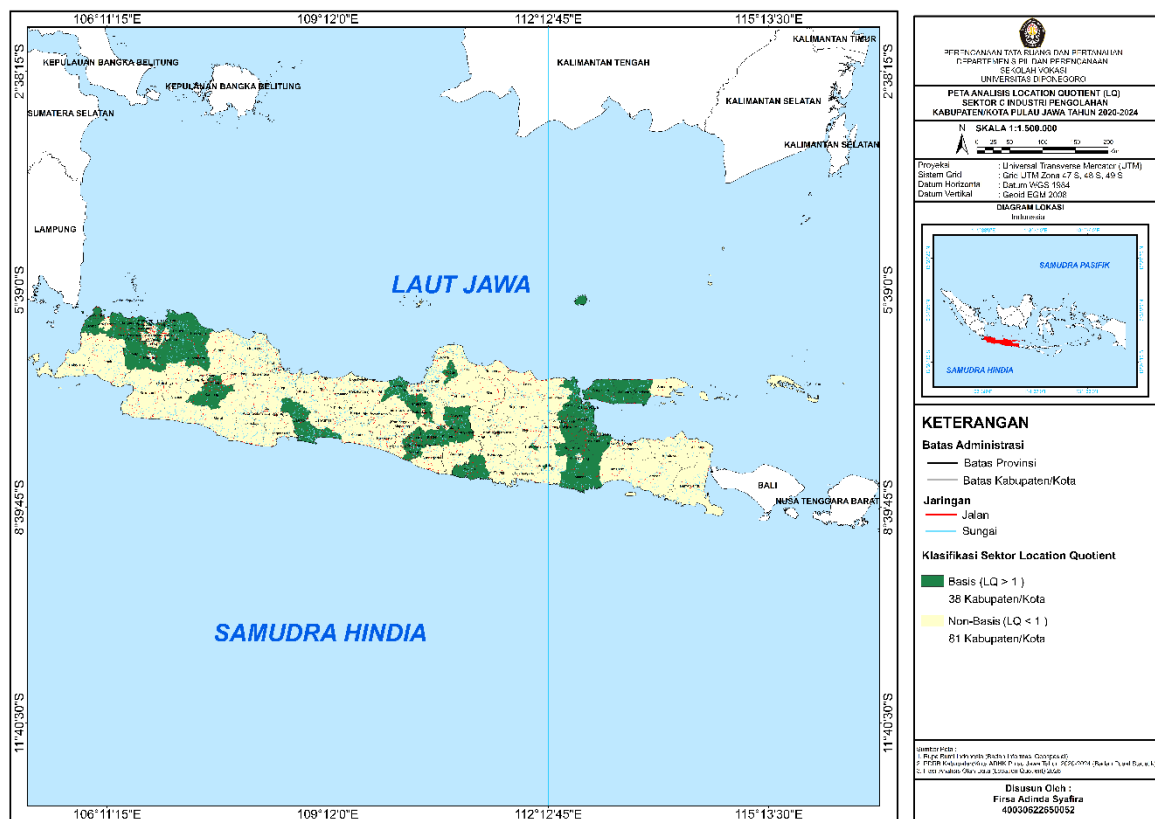
Ancaman alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan migrasi tenaga kerja ke sektor lain menjadi faktor penekan utama. Sementara itu, 45 wilayah memiliki sektor pertanian yang tumbuh secara signifikan meski belum menjadi basis Sektor Potensial, menunjukkan potensi pengembangan yang signifikan. Terdapat 15 wilayah yang tergolong tertinggal pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan umumnya merupakan kota-kota besar yang memang tidak memiliki basis pertanian.

Wilayah-wilayah perkotaan padat pada DKI Jakarta, Banten, dan kota-kota besar Jawa lainnya masuk dalam kategori basis dan berdaya saing. Sebanyak 29 wilayah tergolong Sektor Berkembang masih memiliki basis pertambangan namun daya saingnya melemah. Secara keseluruhan, analisis sektor primer menggambarkan bahwa Pulau Jawa tengah berada dalam fase transisi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis industri dan jasa. Dominasi kategori sektor berkembang dan sektor tertinggal pada Sektor Pertambangan sebanyak 29 dan 47 wilayah menandakan adanya tekanan struktural pada sektor penggalian. Sementara itu, sektor pertanian yang masih relatif kuat pada 34 wilayah unggulan perlu diperkuat melalui hilirisasi dan modernisasi agroindustri agar tidak terdegradasi dari sektor basis menjadi sektor yang tidak lagi kompetitif.

#### 4.1.2 Analisis Ekonomi Sektor Sekunder

Visualisasi pada sektor sekunder meliputi Sektor Industri Pengolahan (C), Pengadaan Listrik dan Gas (D), Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah (E), serta Konstruksi (F). Pemetaan kelompok sektor sekunder menunjukkan kecenderungan koridor transportasi utama dan kawasan industri. Infrastruktur dan konektivitas wilayah mempengaruhi status unggulan sektor manufaktur dan konstruksi pada wilayah-wilayah yang menjadi penyanga pusat pertumbuhan. Berikut merupakan visualisasi peta persebaran Sektor C, Sektor D, Sektor E, dan Sektor F.

Sektor C mencakup seluruh kegiatan industri manufaktur, mulai dari industri makanan dan minuman, tekstil, kimia, hingga industri berat. Persebaran LQ sektor ini menggambarkan struktur industrialisasi dan kedalaman basis manufaktur di tiap daerah. Wilayah yang memiliki nilai LQ tinggi menunjukkan tingkat spesialisasi industri pengolahan yang lebih besar dibandingkan rata-rata Pulau Jawa, sehingga sektor manufaktur berperan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah tersebut.

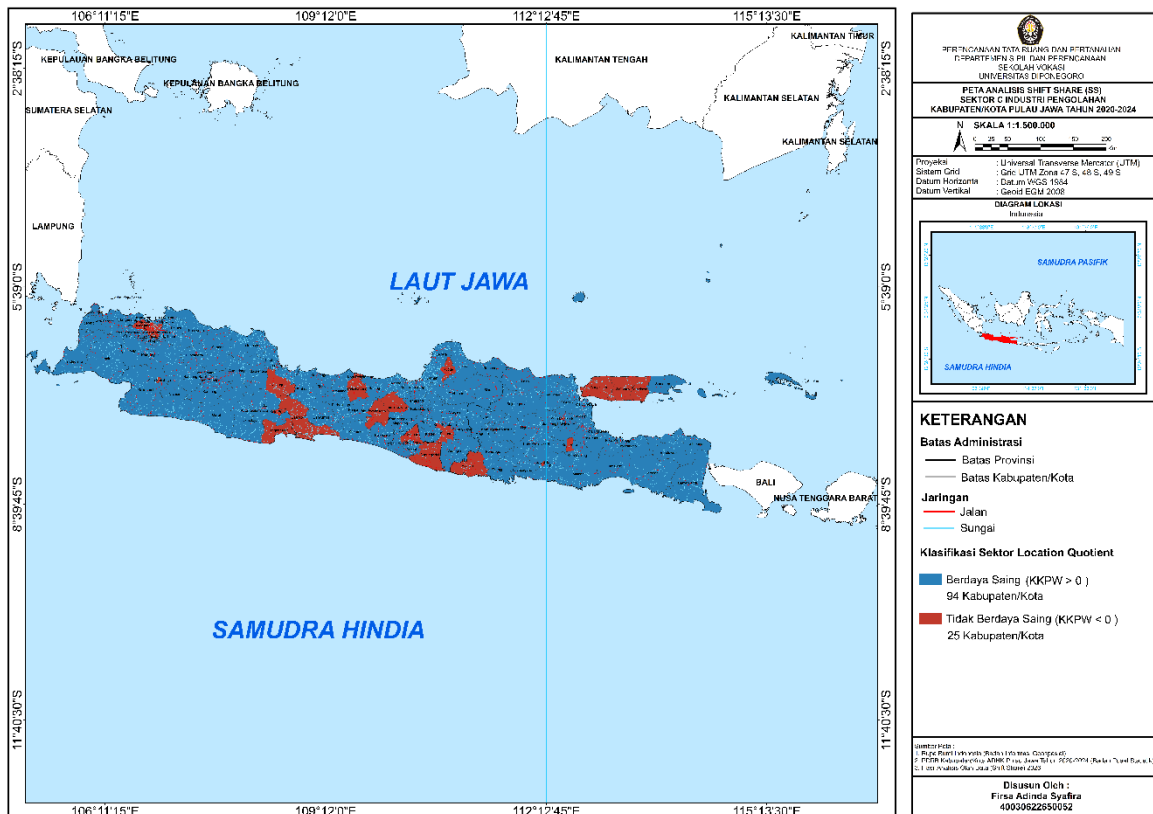


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 7 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor C

Secara spasial, sektor industri pengolahan di Pulau Jawa cenderung terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi, kedekatan dengan pusat pasar, serta didukung

oleh infrastruktur transportasi dan logistik yang memadai. Kawasan industri yang berkembang umumnya berada pada koridor ekonomi utama yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota industri di sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku, tetapi juga oleh kemudahan distribusi produk, akses tenaga kerja, dan keterhubungan dengan jaringan perdagangan nasional maupun internasional.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 8 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor C

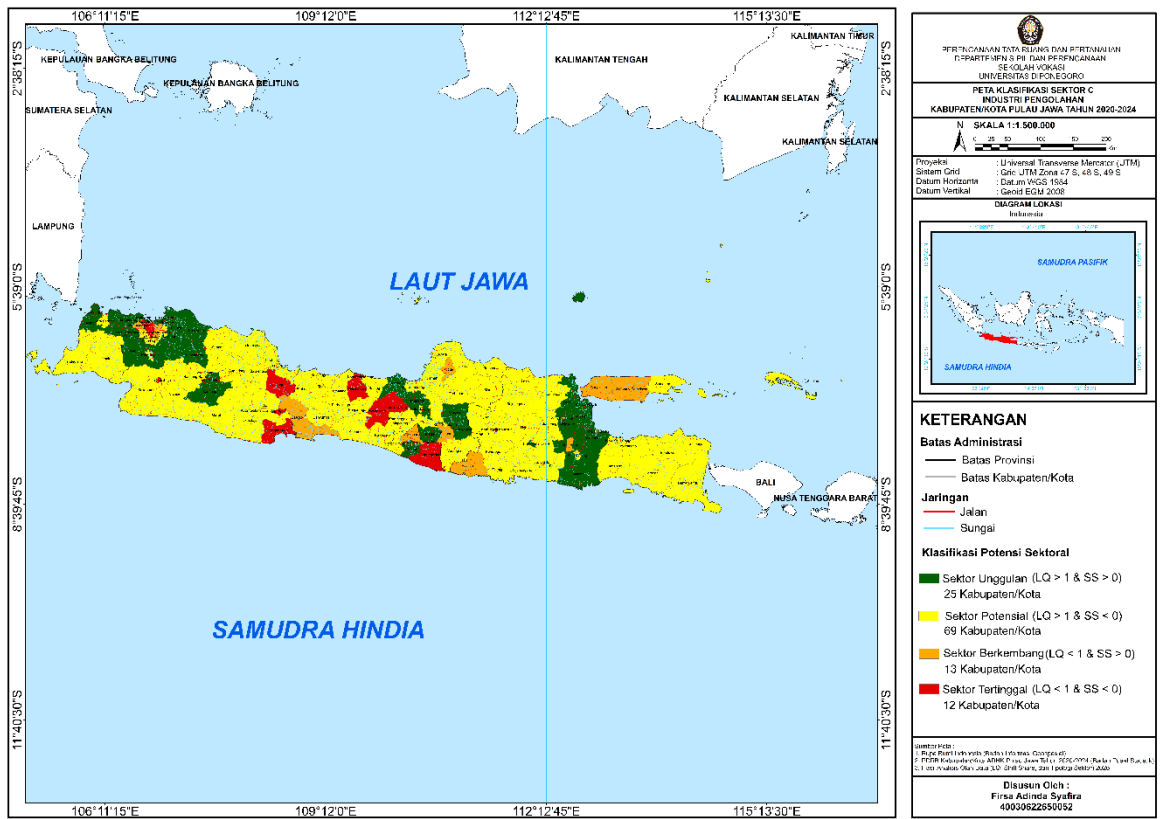
Sektor C memiliki 38 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor industri pengolahan di daerah tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus dapat diekspor ke wilayah lain. Sementara itu, 81 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan bahwa sektor sedang bergantung pada pasokan dari luar daerah. Peta LQ Sektor C memperlihatkan pola konsentrasi industri yang mengikuti koridor pertumbuhan utama Jawa, dengan 38 dari 119 kabupaten/kota berstatus basis. Nilai LQ tertinggi ada pada Kabupaten Bekasi ( $LQ = 5,261$ ) yang merupakan pusat kawasan industri terbesar di Indonesia dan menjadi jantung kawasan Jabodetabekjur. Terdapat Kabupaten Karawang ( $LQ = 3,675$ ) dan Kabupaten Purwakarta

(LQ = 1,084) dan Kabupaten Bekasi membentuk klaster industri pada koridor timur Jabodetabekjur. Pada Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo (LQ = 3,822), Kabupaten Pasuruan (LQ = 1,824), dan Kabupaten Gresik (LQ = 3,437) membentuk inti industri Gerbangkertosusila di sekitar Surabaya. Kota Tangerang (LQ = 2,251) berada pada kawasan Jabodetabekjur bagian barat. Pada Jawa Barat, Kabupaten Bandung (LQ = 1,688) menunjukkan basis industri Bandung Raya yang kuat. Pada Jawa Tengah, Kabupaten Kudus (LQ = 2,322) menunjukkan pusat industri rokok. Sebaliknya, nilai LQ terendah tercatat di Kota Jakarta Pusat (LQ = 0,072) dan Kabupaten Ciamis (LQ = 0,078).

KPPW Sektor C menggambarkan kecepatan pertumbuhan industri pengolahan pada masing-masing daerah relatif terhadap rata-rata regional. Sektor C dapat mencerminkan kapasitas daerah dalam menarik investasi industri, mengembangkan kawasan industri, dan menciptakan lapangan kerja manufaktur. Sektor C menunjukkan 94 kabupaten/kota berdaya saing (KPPW > 0) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor industri pengolahan di daerah tersebut lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, 25 kabupaten/kota tidak berdaya saing (KPPW < 0), menunjukkan pertumbuhan sektor lebih lambat dari rata-rata kabupaten/kota lainnya.

Peta KPPW Sektor C memperlihatkan konsentrasi pertumbuhan industri yang sangat terkonsentrasi di beberapa koridor utama. Nilai KPPW tertinggi terdapat di Kabupaten Ponorogo (KPPW = 70,12), selanjutnya terdapat di Kabupaten Madiun (KPPW = 70,09), Kabupaten Trenggalek (KPPW = 65,28), Kabupaten Lamongan (KPPW = 65,24), dan Kabupaten Nganjuk (KPPW = 65,16). Kabupaten Lumajang (KPPW = 64,66) dan Kabupaten Magetan (KPPW = 63,72) juga mencatat pertumbuhan industri yang tinggi. Sebaliknya, nilai KPPW terendah jatuh pada Kota Sukabumi (-95,13), Kabupaten Kuningan (-95,12), Kabupaten Pangandaran (-95,10), Kota Banjar (-94,67), dan Kota Mojokerto (-66,77), menunjukkan ketertinggalan pertumbuhan industri pada wilayah tersebut.

Peta Sektor C menandakan koridor industri Pulau Jawa yang membentang Wilayah Banten, melewati Jabodetabek, berlanjut pada Solo Raya dan Kota Semarang, hingga Kota Surabaya dan sekitarnya. Warna hijau sektor unggulan terkonsentrasi pada simpul-simpul kawasan industri besar, sementara oranye sektor berkembang mendominasi wilayah-wilayah yang sedang dalam proses industrialisasi. Ketiadaan merah sektor tertinggal di sebagian besar wilayah mengindikasikan bahwa industri pengolahan memiliki potensi penyebaran yang luas pada Pulau Jawa.

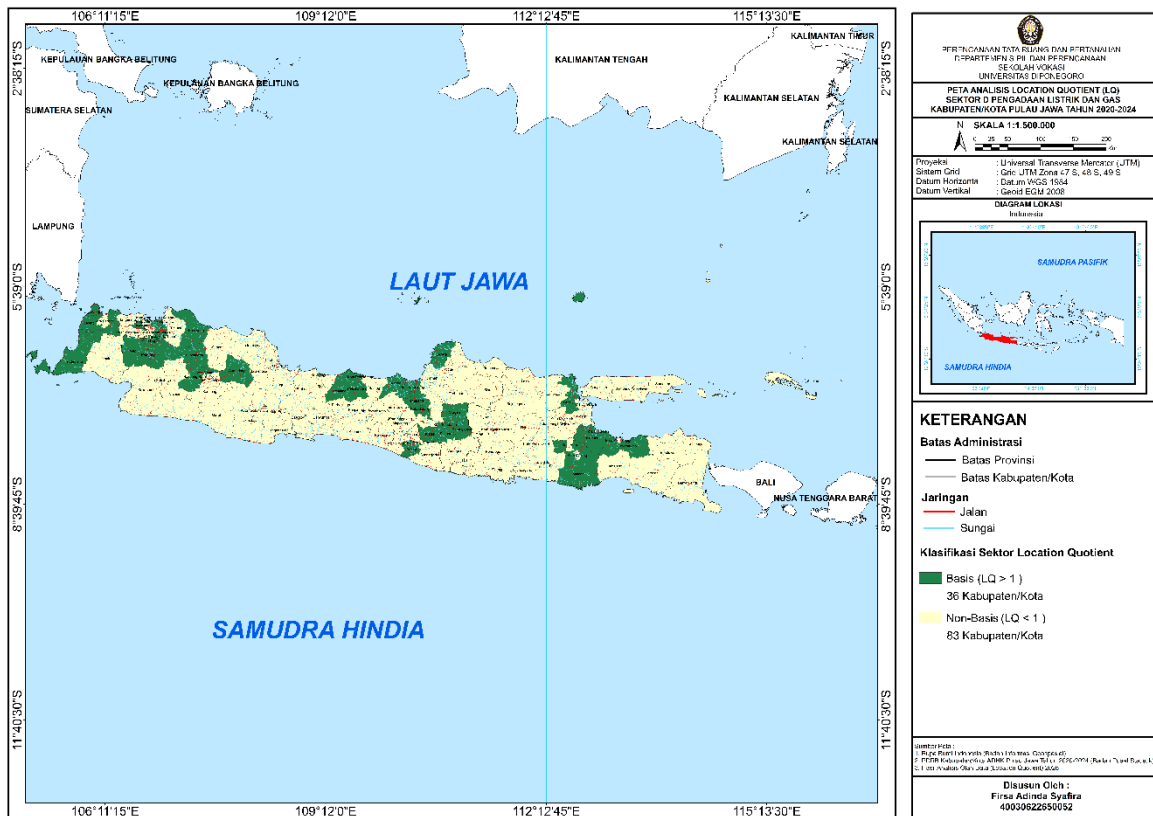


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 9 Sektor C Industri Pengolahan

Sebanyak 25 wilayah pada Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor unggulan ( $LQ > 1$  &  $KPPW > 0$ ), dengan konsentrasi utama pada kawasan industri Jabodetabek Kabupaten Bekasi ( $LQ = 5,261$ ;  $KPPW = 25,34$ ), Kabupaten Karawang ( $LQ = 3,675$ ;  $KPPW = 28,52$ ), Kabupaten Purwakarta ( $LQ = 1,084$ ;  $KPPW = 24,03$ ) serta kota-kota industri Jawa Tengah seperti Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sragen. Nilai LQ yang sangat tinggi di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang mengkonfirmasi peran keduanya sebagai pusat manufaktur skala nasional.

Sektor D mencakup kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik serta pengadaan gas. Nilai LQ pada sektor ini cenderung mencerminkan keberadaan infrastruktur energi berskala besar, seperti PLTU, PLTA, atau jaringan distribusi gas yang dominan pada suatu wilayah.



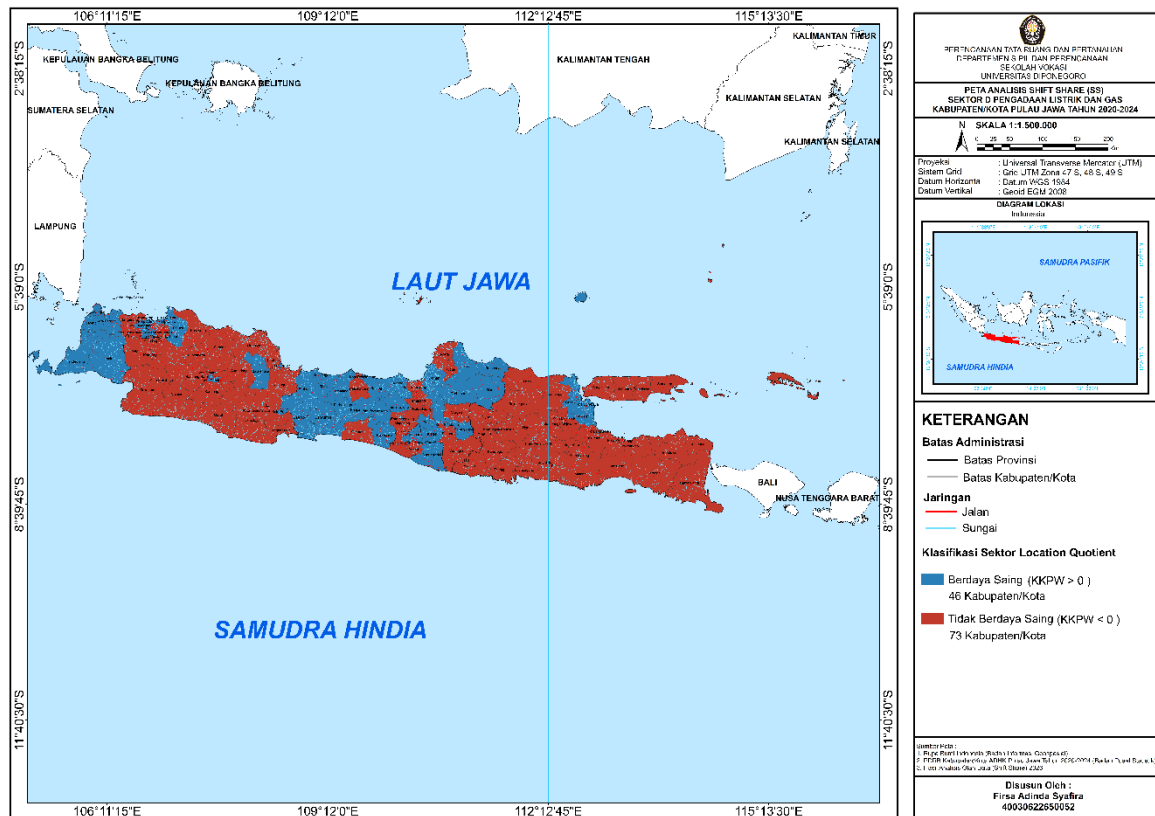
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 10 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor D

Sektor D memiliki 36 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor pengadaan listrik dan gas di daerah tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan lokal. Sementara itu, 83 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), mengindikasikan sektor belum spesialis di daerah tersebut. Nilai LQ tertinggi berada di Kabupaten Gresik ( $LQ = 8,883$ ), mencerminkan konsentrasi infrastruktur energi yang sangat signifikan di kawasan industri Gresik. Kabupaten Pasuruan ( $LQ = 6,346$ ) menempati posisi kedua tertinggi, menunjukkan konsentrasi infrastruktur energi di kawasan Gerbangkertosusila bagian timur. Kota Bekasi ( $LQ = 5,807$ ) dan Kota Bogor ( $LQ = 5,647$ ) menunjukkan nilai LQ yang tinggi. Pada Jawa Tengah, Kabupaten Kendal ( $LQ = 1,865$ ) menunjukkan basis sektor D yang positif. Sebaliknya, nilai LQ terendah tercatat di Kota Tasikmalaya ( $LQ = 0,014$ ) dan Kabupaten Pangandaran ( $LQ = 0,075$ ), yang menunjukkan produksi energi berskala besar sangat minim dan berstatus sebagai wilayah konsumen.

KPPW Sektor D merepresentasikan pertumbuhan infrastruktur dan produksi energi listrik serta gas di masing-masing daerah. Nilai pada Sektor D digunakan untuk mengukur

seberapa cepat suatu wilayah mengembangkan kapasitas pembangkitan dan distribusi energi, seiring meningkatnya kebutuhan energi dari sektor industri dan rumah tangga.

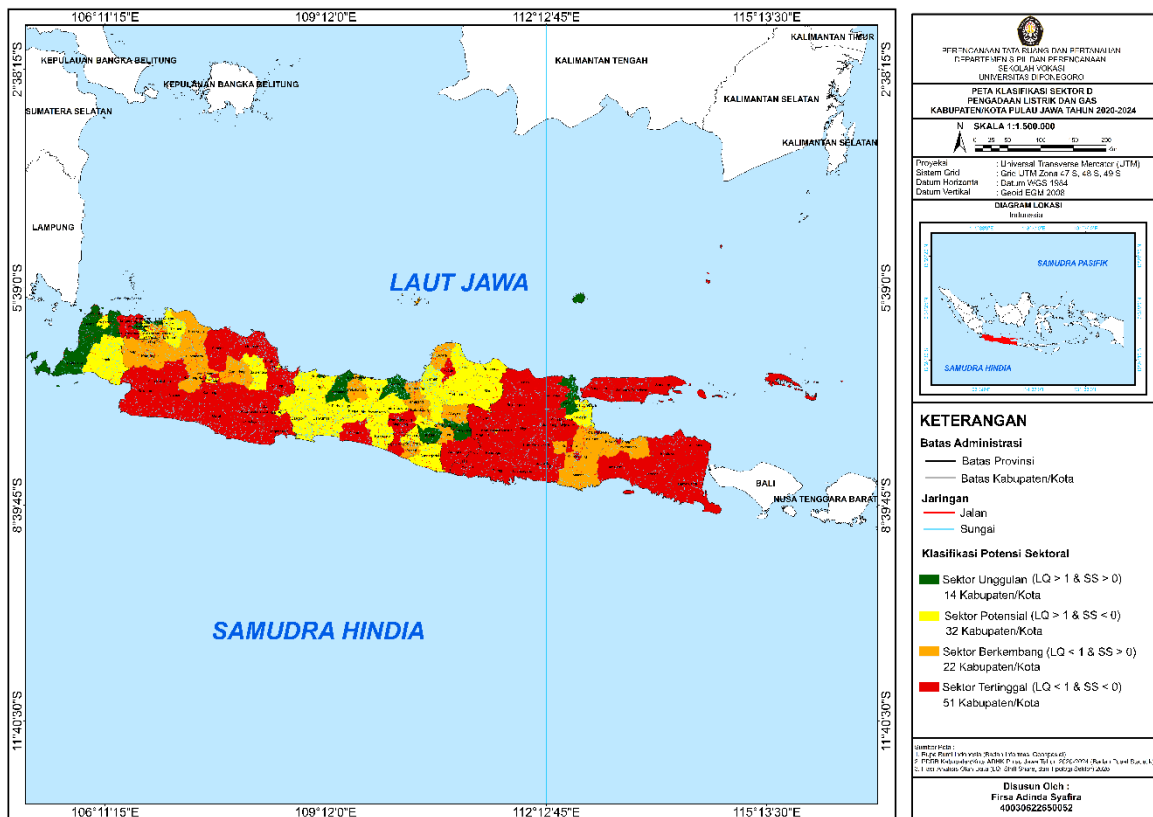


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 11 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor D

Sektor D menunjukkan 46 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, menunjukkan pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota Pulau Jawa. Sementara 73 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dari rata-rata kabupaten/kota lainnya. Peta KPPW Sektor D menunjukkan pertumbuhan yang terkonsentrasi pada beberapa kawasan utama. Nilai KPPW tertinggi yaitu Kabupaten Sidoarjo ( $KKPW = 160,29$ ) dan Kota Surabaya ( $KKPW = 154,32$ ), selanjutnya yaitu Kota Madiun ( $KKPW = 122,61$ ), Kabupaten Bekasi ( $KKPW = 116,84$ ), dan Kota Bandung ( $KKPW = 115,85$ ), yang menunjukkan akselerasi infrastruktur energi di Jawa Timur dan Jawa Barat. Sebaliknya, nilai KPPW terendah terdapat di Kota Jakarta Timur ( $-40,47$ ), Kabupaten Kudus ( $-14,04$ ), Kota Semarang ( $-9,31$ ), Kabupaten Kebumen ( $-6,97$ ), dan Kabupaten Tangerang ( $-6,93$ ), yang mencerminkan keterbatasan pertumbuhan infrastruktur energi pada wilayah tersebut.

Peta Sektor D menampilkan sebaran yang didominasi warna merah dan kuning, mengkonfirmasi bahwa infrastruktur energi masih belum merata. Warna hijau sektor unggulan tersebar pada kota-kota yang memiliki fasilitas pembangkit atau distribusi energi besar. Pola ini menjelaskan urgensi percepatan pembangunan infrastruktur energi yang merata sebagai prasyarat pengembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang saat ini masih dalam kategori tertinggal pada sektor ini.



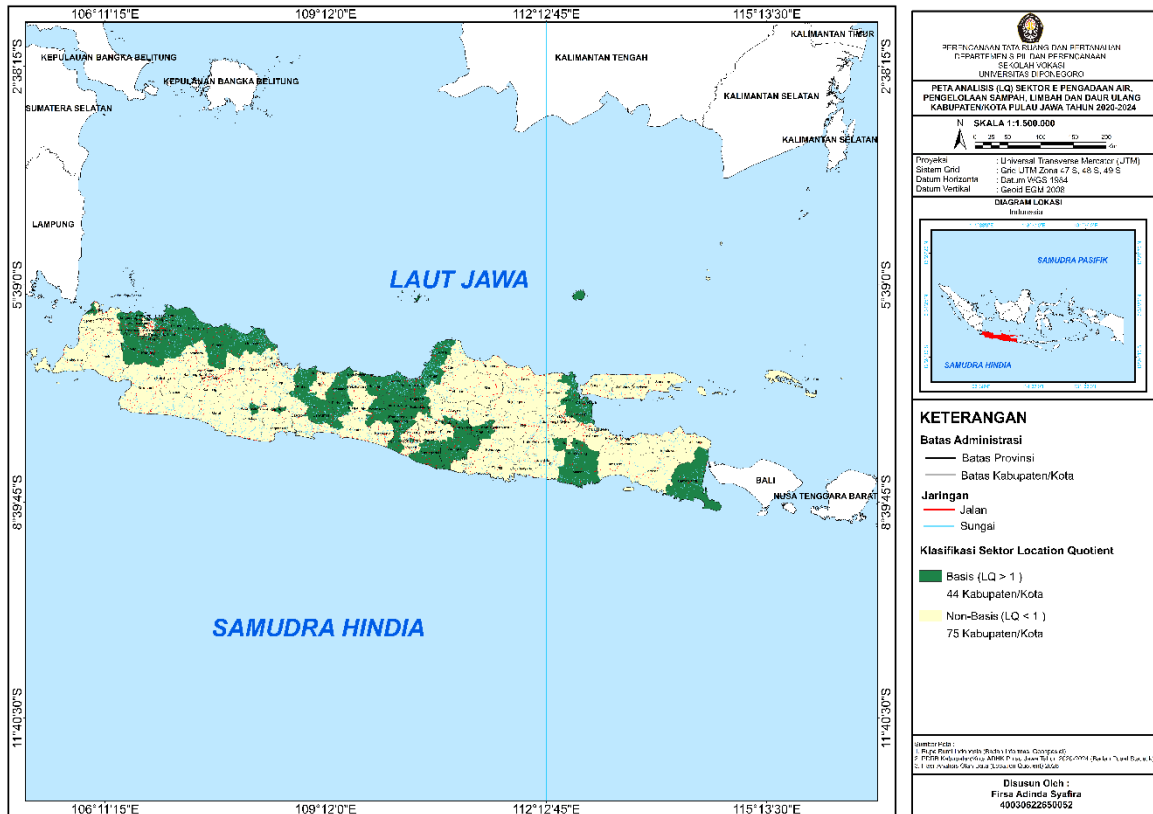
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 12 Peta Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Pada Sektor Listrik dan Gas hanya 14 wilayah yang berstatus unggulan, sementara 51 wilayah berada dalam kategori tertinggal. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa infrastruktur energi di Pulau Jawa masih sangat terkonsentrasi. Wilayah-wilayah dengan keunggulan Sektor D merupakan lokasi pembangkit listrik berskala besar atau jaringan distribusi gas — seperti Kota Magelang (LQ=3,201), Kota Surakarta (LQ=2,042), Kota Pekalongan (LQ=1,677), dan Kota Tegal (LQ=1,620) di Jawa Tengah, serta beberapa kota di Jawa Timur.

Sektor E mencakup kegiatan pengolahan dan distribusi air bersih, pengelolaan air limbah, serta pengelolaan sampah. Sektor E bersifat pelayanan publik berkaitan dengan

kepadatan penduduk dan tingkat urbanisasi suatu daerah. Nilai LQ yang tinggi mengindikasikan kapasitas layanan air yang melebihi rata-rata regional.



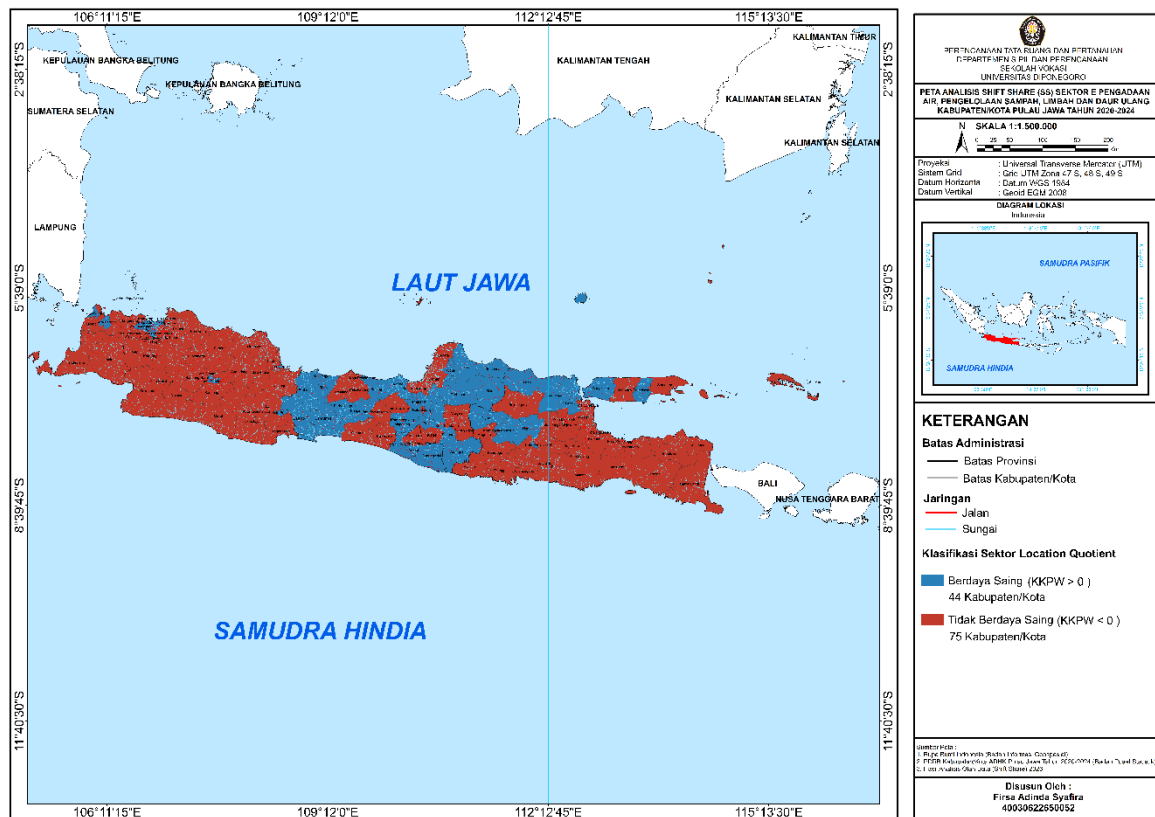
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 13 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor E

Sektor E memiliki 44 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor pengadaan air dan pengelolaan lingkungan di daerah tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan lokal. Sementara 75 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan kapasitas sektor masih terbatas. Nilai LQ tertinggi berada di Kota Surabaya ( $LQ = 8,715$ ), selanjutnya pada Kabupaten Bogor ( $LQ = 4,228$ ) dan Kabupaten Karawang ( $LQ = 3,583$ ), kemudian Kota Malang ( $LQ = 3,290$ ). Di Jawa Barat, terdapat Kota Depok ( $LQ = 1,712$ ) dan Kabupaten Tangerang ( $LQ = 1,725$ ) berstatus Basis mencerminkan keberadaan sistem distribusi air yang terstruktur. Pada DIY, Kota Yogyakarta ( $LQ = 1,409$ ) mencatat status Basis, mencerminkan kondisi pelayanan air perkotaan yang relatif baik. Sebaliknya, nilai LQ terendah ditemukan di Kabupaten Pangandaran ( $LQ = 0,054$ ) dan Kota Serang ( $LQ = 0,125$ ), menunjukkan kapasitas layanan air bersih formal yang masih jauh di bawah standar rata-rata Pulau Jawa.

KPPW Sektor E mengukur dinamika pertumbuhan layanan pengadaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah pada tiap daerah. Pertumbuhan pada sektor E berkaitan

dengan program pembangunan infrastruktur sanitasi dasar yang menjadi prioritas pembangunan nasional, serta ekspansi jaringan PDAM ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terlayani.



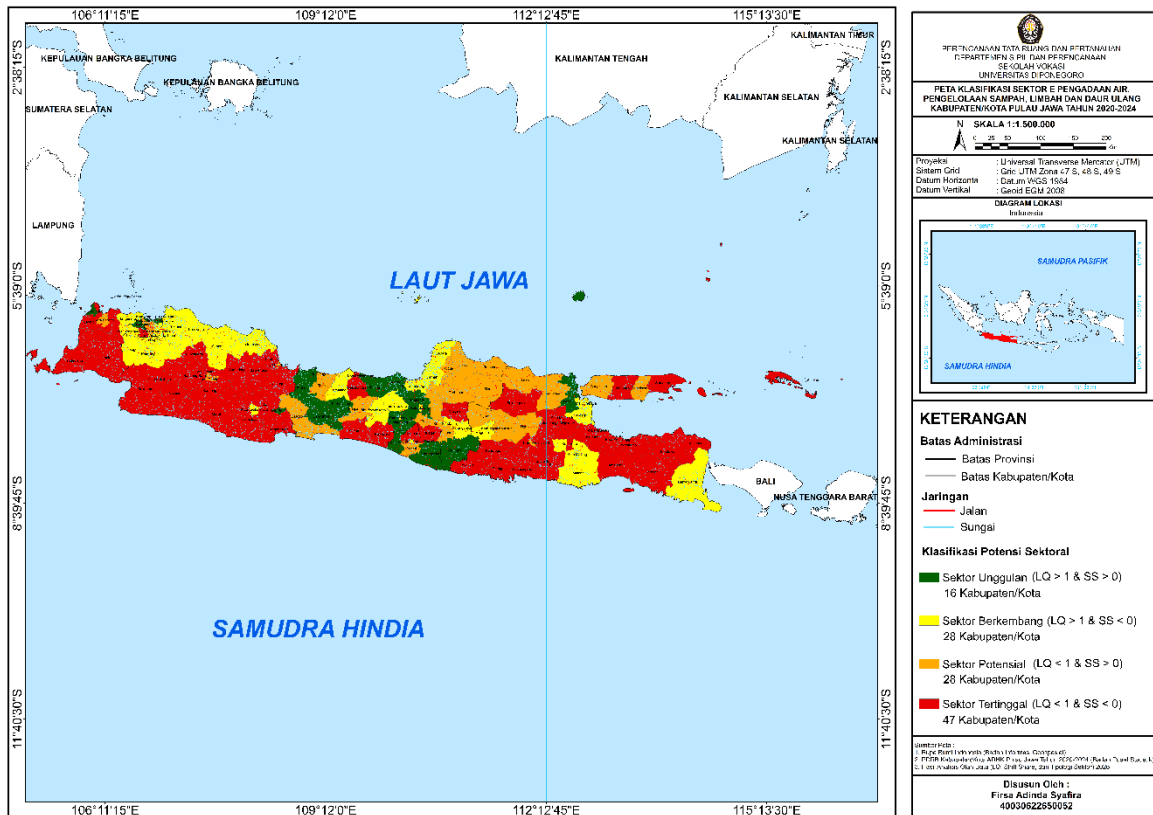
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 14 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor E

Sektor E menunjukkan 44 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor pengadaan air dan pengelolaan lingkungan lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara 75 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan pertumbuhan yang masih di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya. Nilai KPPW tertinggi terdapat pada Kabupaten Gresik ( $KPPW = 128,69$ ), selanjutnya Kota Madiun ( $KPPW = 124,75$ ), Kota Cirebon ( $KPPW = 112,77$ ), Kota Bandung ( $KPPW = 106,28$ ), dan Kota Jakarta Kepulauan Seribu ( $KPPW = 53,03$ ). Sebaliknya, nilai KPPW terendah berada pada Kota Jakarta Timur ( $-34,09$ ), Kabupaten Pandeglang ( $-19,08$ ), Kota Surakarta ( $-18,67$ ), Kabupaten Lebak ( $-13,83$ ), dan Kota Magelang ( $-13,16$ ).

Peta Sektor E memperlihatkan sebaran yang lebih terdekonsentrasi dibanding sektor-sektor sekunder lainnya. Sektor unggulan warna hijau tersebar di berbagai provinsi, mencerminkan bahwa pelayanan air dan sanitasi yang baik tidak hanya menjadi dominasi

kota-kota besar. Namun, dominasi wilayah berwarna merah di bagian timur Pulau Jawa menunjukkan masih adanya kesenjangan infrastruktur lingkungan dibandingkan wilayah lainnya di Pulau Jawa.

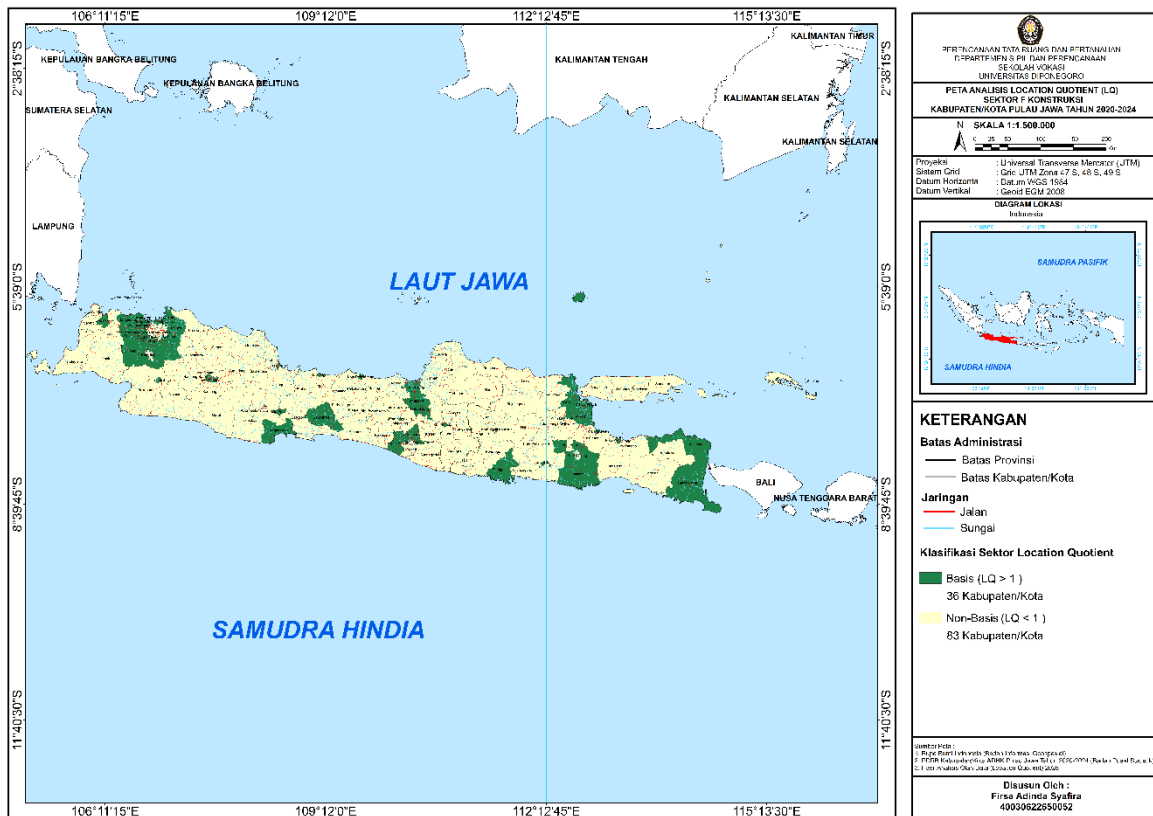


Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 15** Peta Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Sektor E menunjukkan pola distribusi yang relatif lebih merata dibandingkan Sektor D. Sebanyak 16 wilayah berstatus unggulan, 28 wilayah berkembang, 28 wilayah potensial, dan 47 wilayah tertinggal. Tingginya angka tertinggal 47 wilayah menandakan bahwa pelayanan pengelolaan air dan sampah yang berkualitas belum merata di Pulau Jawa. Wilayah-wilayah unggulan pada sektor E merupakan kota-kota yang telah memiliki sistem pengelolaan lingkungan yang modern seperti Kota Pekalongan ( $LQ=1,768$ ), Kota Banjar, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang.

Sektor F meliputi kegiatan pembangunan gedung, infrastruktur jalan, jembatan, dan berbagai konstruksi lainnya. Aktivitas konstruksi umumnya mengikuti laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur suatu daerah.



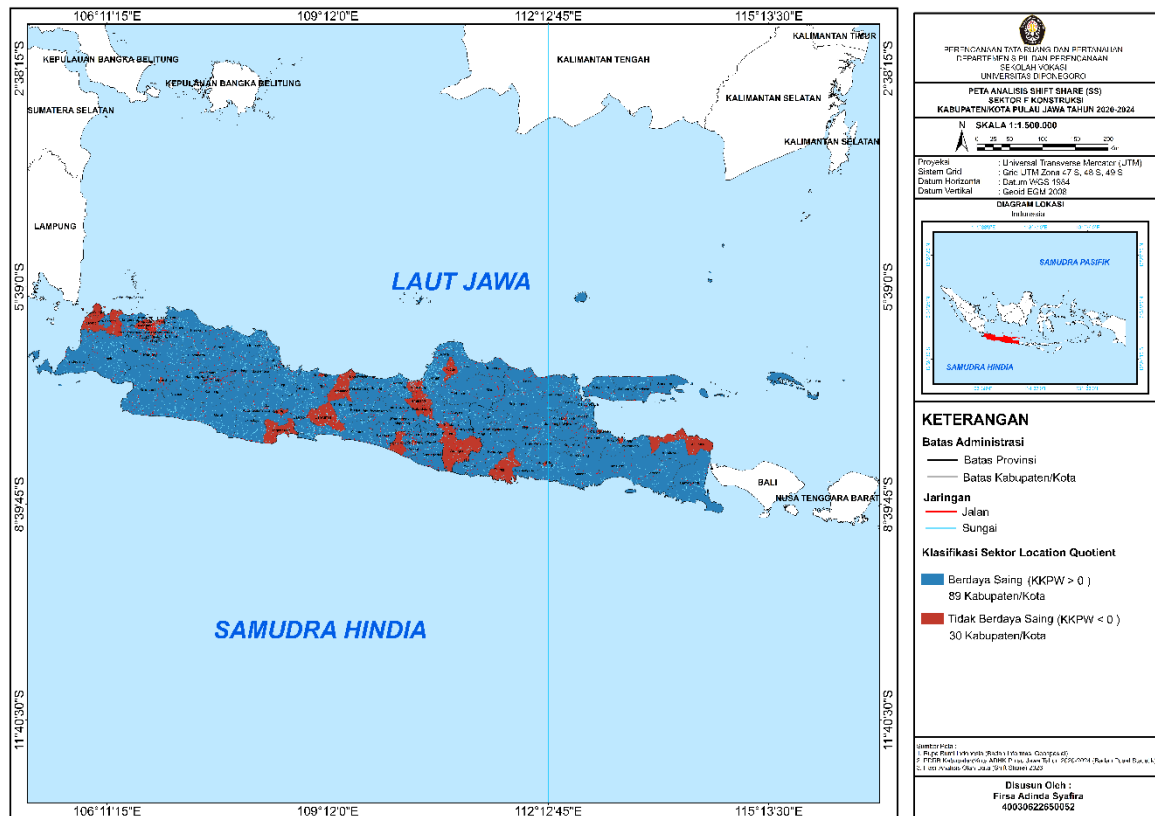
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 16 Peta Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor F

Sektor F memiliki 36 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor konstruksi di daerah tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan lokal. Sementara 83 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan bahwa aktivitas konstruksi masih bergantung pada daerah lain. Nilai tertinggi terdapat di Kabupaten Pangandaran ( $LQ = 4,415$ ), selanjutnya Kota Serang ( $LQ = 4,392$ ), Kota Mojokerto ( $LQ = 3,872$ ), Kota Probolinggo ( $LQ = 3,466$ ), dan Kabupaten Trenggalek ( $LQ = 3,458$ ) menunjukkan dinamika pembangunan kota-kota besar di Jawa Timur. Kota Bandung ( $LQ = 2,196$ ), Kabupaten Kulon Progo ( $LQ = 2,256$ ) mencerminkan dampak pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Sebaliknya, nilai LQ terendah terdapat di Kota Kediri ( $LQ = 0,127$ ), Kabupaten Probolinggo ( $LQ = 0,253$ ), Kabupaten Lumajang ( $LQ = 0,254$ ), Kabupaten Magetan ( $LQ = 0,254$ ), dan Kota Jakarta Kepulauan Seribu ( $LQ = 0,256$ ), menunjukkan minimnya proyek konstruksi pada wilayah tersebut.

KPPW Sektor F menunjukkan peningkatan pertumbuhan sektor konstruksi pada masing-masing daerah. Sektor konstruksi merupakan proksi penting bagi intensitas investasi fisik dan pembangunan infrastruktur. Nilai tinggi yang terdapat pada sektor F berkaitan

dengan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, kawasan industri, perumahan, atau pengembangan kawasan baru.



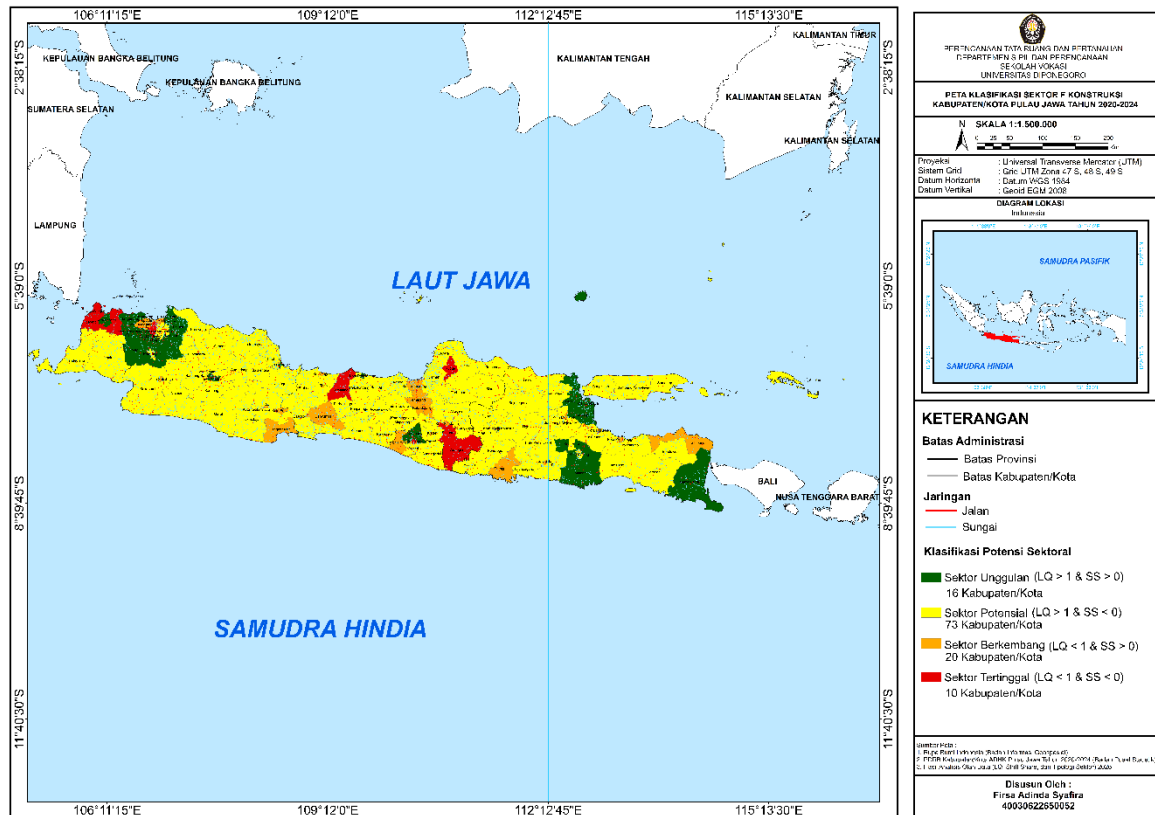
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 17 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor F

Sektor F menunjukkan 89 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor konstruksi lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota Pulau Jawa. Sementara 30 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan pertumbuhan sektor relatif lambat. Nilai KPPW tertinggi terdapat pada Kabupaten Sumenep ( $KPPW = 101,15$ ), Kabupaten Sampang ( $KPPW = 93,78$ ), Kabupaten Lamongan ( $KPPW = 92,59$ ), Kabupaten Malang ( $KPPW = 92,05$ ), dan Kabupaten Banyuwangi ( $KPPW = 91,34$ ) mencatat pertumbuhan konstruksi tertinggi di Pulau Jawa. Sebaliknya, nilai KPPW terendah terdapat pada Kota Sukabumi ( $KPPW = -51,63$ ), Kabupaten Pangandaran ( $KPPW = -51,62$ ), Kota Banjar ( $KPPW = -49,19$ ), Kota Mojokerto ( $KPPW = -35,09$ ), dan Kota Pasuruan ( $KPPW = -35,08$ ), menandakan perlambatan atau kontraksi tajam pada proyek konstruksi wilayah tersebut.

Peta Sektor F didominasi warna oranye sektor potensial yang menyebar luas, mencerminkan pergerakan pembangunan yang merata pada seluruh wilayah Pulau Jawa. Warna hijau sektor unggulan terkonsentrasi di kota-kota yang menjadi lokasi proyek

pembangunan berskala besar dan kawasan pengembangan perumahan. Minimnya warna merah sektor tertinggal hanya sejumlah 10 wilayah menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki pertumbuhan yang luas dan merata.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 18 Peta Sektor Konstruksi

Sektor F Konstruksi menunjukkan 73 wilayah berada dalam kategori potensial terbanyak di antara seluruh sektor sekunder. Menunjukkan bahwa aktivitas konstruksi tumbuh pada dua pertiga wilayah Pulau Jawa meski belum menjadi sektor basis lokal. Kondisi ini mencerminkan gelombang pembangunan infrastruktur yang masif yang sedang berlangsung di berbagai wilayah sebagai dampak program pembangunan nasional.

Tabel 4. 2 Jumlah Tipologi Sektor Sekunder

| No. | Klasifikasi Tipologi      | Nilai LQ dan Nilai ShiftShare         | Sektor C Industri Pengolahan | Sektor D Pengadaan Listrik dan Gas | Sektor E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Sektor F Konstruksi |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
| 1.  | Sektor Unggulan (Hijau)   | LQ>1 (Basis) & KPPW>0 (Berdaya Saing) | 25 Wilayah                   | 14 Wilayah                         | 16 Wilayah  | 16 Wilayah          |
| 2.  | Sektor Potensial (Kuning) | LQ<1 (Non-Basis) & KPPW>0             | 69 Wilayah                   | 32 Wilayah                         | 28 Wilayah  | 73 Wilayah          |

| No. | Klasifikasi Tipologi       | Nilai LQ dan Nilai <i>ShiftShare</i>            | Sektor C Industri Pengolahan | Sektor D Pengadaan Listrik dan Gas | Sektor E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | Sektor F Konstruksi |
|-----|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
|     |                            | (Berdaya Saing)                                 |                              |                                    |   |                     |
| 3.  | Sektor Berkembang (Prange) | LQ>1 (Basis) & KPPW<0 (Tidak Berdaya Saing)     | 13 Wilayah                   | 22 Wilayah                         | 28 Wilayah  | 20 Wilayah          |
| 4.  | Sektor Tertinggal (Merah)  | LQ<1 (Non-Basis) & KPPW<0 (Tidak Berdaya Saing) | 12 Wilayah                   | 51 Wilayah                         | 47 Wilayah  | 10 Wilayah          |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Dominasi kategori Sektor Potensial pada sektor C Pengolahan Industri sebanyak 69 wilayah menunjukkan wilayah Pulau Jawa memiliki sektor industri yang tumbuh meski belum menjadi basis ekonomi lokal. Potensi ini mencerminkan adanya proses industrialisasi yang masih berlangsung dan menyebar ke wilayah-wilayah non-metropolis. Hanya 12 wilayah yang menjadi sektor tertinggal dalam sektor industri, umumnya kabupaten-kabupaten agraris terpencil di Madura dan pesisir selatan Jawa. Tingginya jumlah wilayah tertinggal 51 wilayah pada Sektor D Pengadaan Listrik dan Gas menandakan bahwa distribusi infrastruktur energi yang merata masih menjadi tantangan pada Pulau Jawa. Sebanyak 22 wilayah yang berada dalam kategori berkembang (LQ>1 namun KPPW<0) menunjukkan bahwa meski beberapa daerah memiliki basis listrik dan gas, pertumbuhannya mulai tertinggal seiring meningkatnya permintaan di wilayah lain.

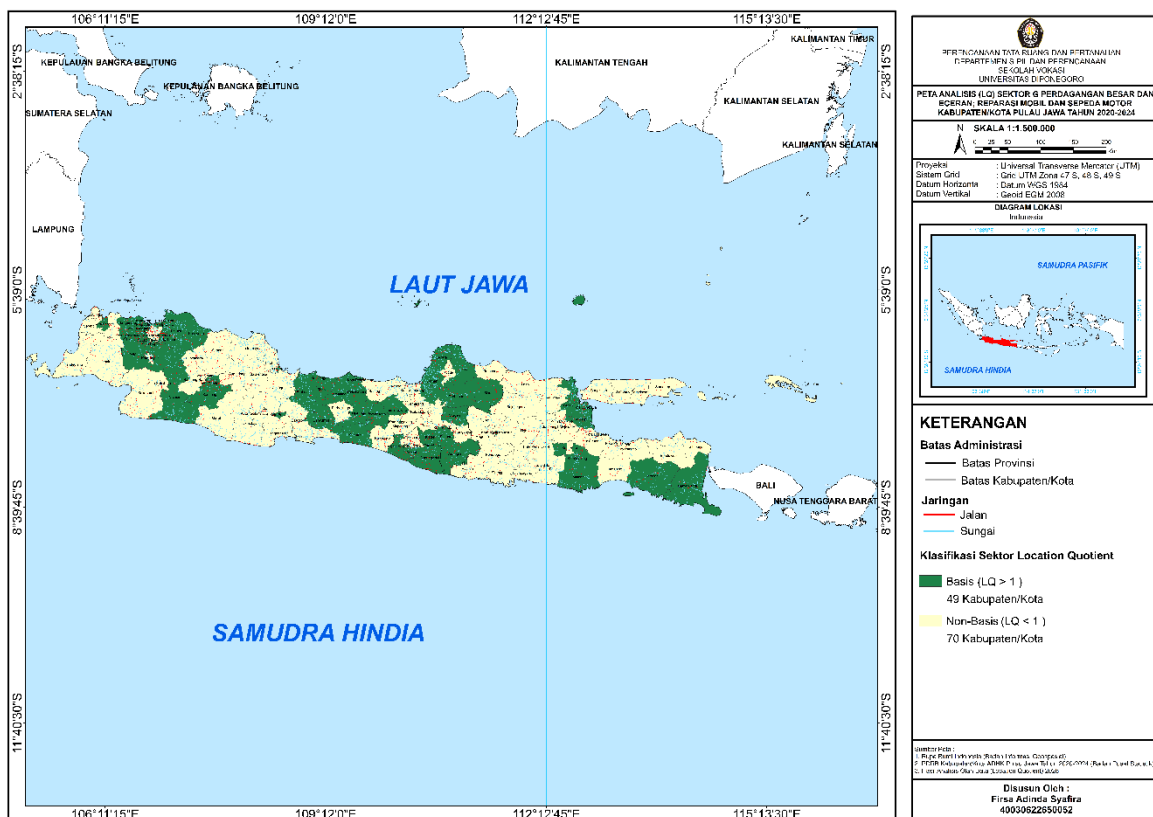
Keberadaan 28 wilayah dalam kategori potensial memberikan peluang besar untuk pengembangan industri pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Seiring meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan regulasi yang ketat, sektor E diproyeksikan akan tumbuh signifikan dan wilayah-wilayah potensial akan berpeluang naik menjadi unggulan dalam jangka menengah. Hanya 10 wilayah yang tertinggal pada sektor ini. Sebanyak 16 wilayah berstatus unggulan, dengan konsentrasi di kota-kota yang sedang mengalami pembangunan properti dan infrastruktur seperti Kota Bandung (LQ=2,196; KPPW=60,12), Kota Cirebon (LQ=2,523; KPPW=71,04), Kota Depok (LQ=1,712; KPPW=70,37), dan Kabupaten Bekasi (LQ=1,235; KPPW=58,24). Terdapat 20 wilayah berkembang menandakan beberapa daerah yang sebelumnya aktif dalam konstruksi mulai mengalami perlambatan seiring perkembangan pasar properti dan selesainya proyek-proyek infrastruktur besar. Analisis sektor sekunder secara keseluruhan pada sektor industri pengolahan dan konstruksi memiliki

persebaran potensi yang luas didominasi kategori sektor potensial, sementara sektor energi dan pengelolaan lingkungan terkonsentrasi pada daerah tertentu dengan jumlah wilayah tertinggal yang tinggi.

### 4.1.3 Analisis Ekonomi Sektor Tersier

Kelompok sektor tersier mencakup seluruh sektor (G, H, I, J, K, L, MN, O, P, Q, RSTU) jasa, perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Klasifikasi kelompok Tersier memperlihatkan dominasi wilayah perkotaan dan metropolitan sebagai pusat pelayanan jasa. Sebaran spasial mengindikasikan adanya pemusatan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi di pusat-pusat kota besar, sekaligus memperlihatkan daerah yang bertransformasi ekonomi berbasis jasa dan digital. Berikut merupakan visualisasi peta persebaran Sektor G, Sektor H, Sektor I, Sektor J, Sektor K, Sektor L, Sektor MN, Sektor O, Sektor P, Sektor Q, dan Sektor RSTU.

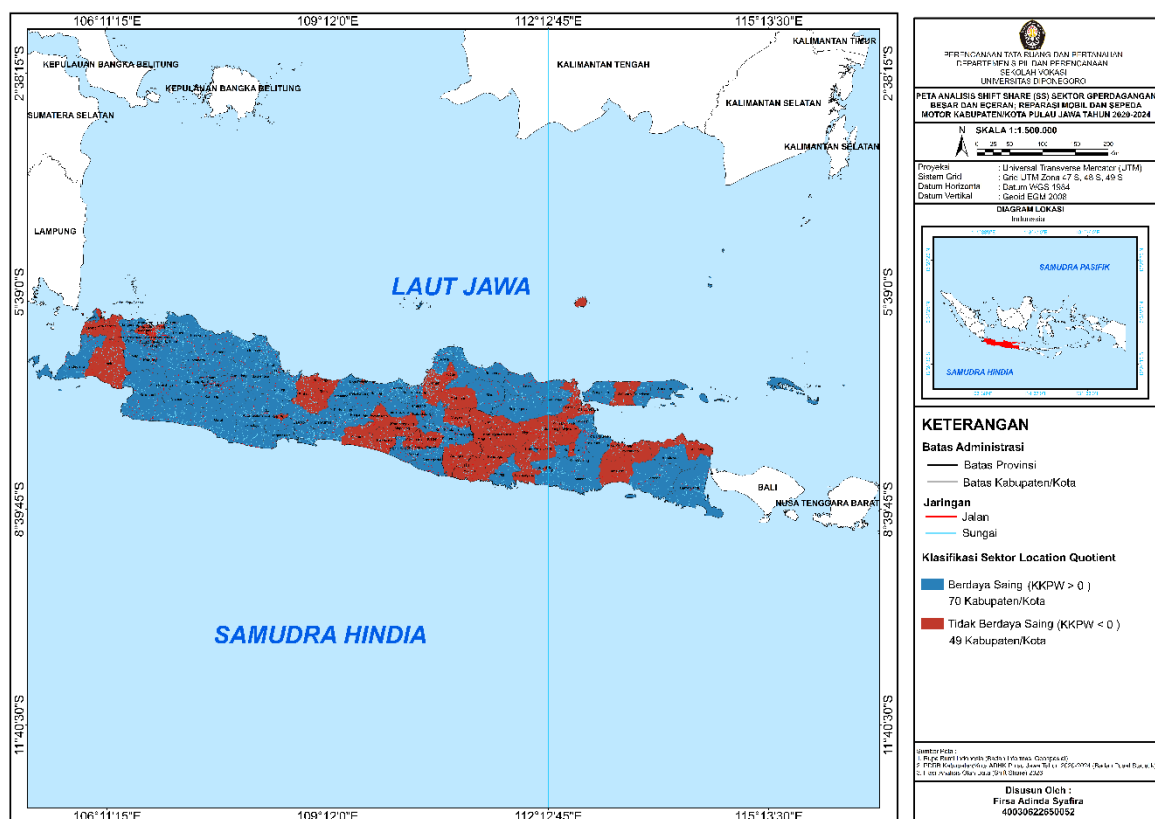
Sektor G mencakup kegiatan perdagangan besar, perdagangan eceran, dan reparasi kendaraan bermotor. Sektor ini menjadi indikator penting aktivitas ekonomi dan perputaran barang di suatu wilayah.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 19 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor G

Sektor G memiliki 49 Kabupaten/Kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor perdagangan di daerah tersebut telah mampu melayani kebutuhan lokal sekaligus menarik permintaan dari luar daerah. Sementara itu, 70 Kabupaten/Kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan sektor perdagangan belum berkembang secara optimal. Nilai LQ tertinggi secara keseluruhan berada di Kota Surabaya ( $LQ = 8,294$ ). Di urutan berikutnya, Kota Cirebon ( $LQ = 7,160$ ) berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian Kota Bandung ( $LQ = 6,170$ ) sebagai pusat perdagangan Bandung Raya. Di urutan berikutnya, Kota Banjar ( $LQ = 6,136$ ) dan Kota Serang ( $LQ = 5,619$ ) turut memperlihatkan dominasi sektor perdagangan yang kuat di wilayahnya masing-masing, sementara Kota Pekalongan ( $LQ = 1,467$ ) dan Kota Tegal ( $LQ = 1,799$ ) menonjol di koridor Bregas. Sebaliknya, nilai LQ terendah berada di Kabupaten Kuningan ( $LQ = 0,343$ ), Kabupaten Trenggalek ( $LQ = 0,350$ ), Kabupaten Probolinggo ( $LQ = 0,354$ ), Kabupaten Pacitan ( $LQ = 0,359$ ), dan Kota Blitar ( $LQ = 0,373$ ), mencerminkan keterbatasan aktivitas perdagangan formal.



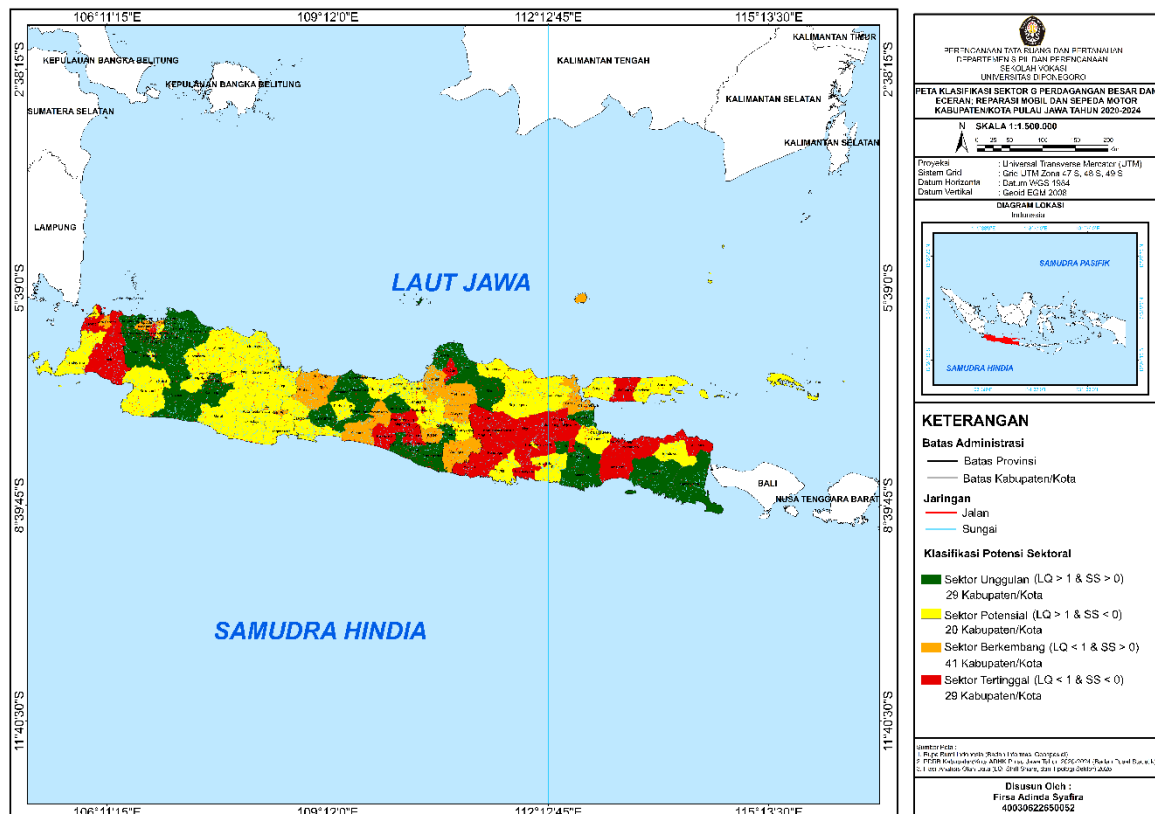
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 20 Analisis Shift Share KPPW Sektor G

KPPW Sektor G menunjukkan pertumbuhan aktivitas perdagangan pada masing-masing daerah. Sektor G berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal karena

perdagangan mendorong perputaran uang, penciptaan lapangan kerja, dan aktivasi sentra-sentra ekonomi rakyat.

Sektor G menunjukkan 70 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor perdagangan lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, 49 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan daya saing perdagangan yang masih perlu ditingkatkan. Nilai KPPW tertinggi pada Kabupaten Bandung ( $KPPW = 41,44$ ), diikuti Kabupaten Sumedang ( $KPPW = 39,59$ ), Kabupaten Bogor ( $KPPW = 38,71$ ), Kota Cimahi ( $KPPW = 37,77$ ), dan Kabupaten Indramayu ( $KPPW = 37,70$ ). Sebaliknya, nilai KPPW terendah terdapat di Kota Banjar ( $-84,22$ ), Kabupaten Gresik ( $-11,81$ ), Kota Tegal ( $-10,86$ ), Kota Madiun ( $-9,52$ ), dan Kota Jakarta Kepulauan Seribu ( $-6,33$ ), menunjukkan pertumbuhan perdagangan yang melambat atau kalah bersaing secara regional.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

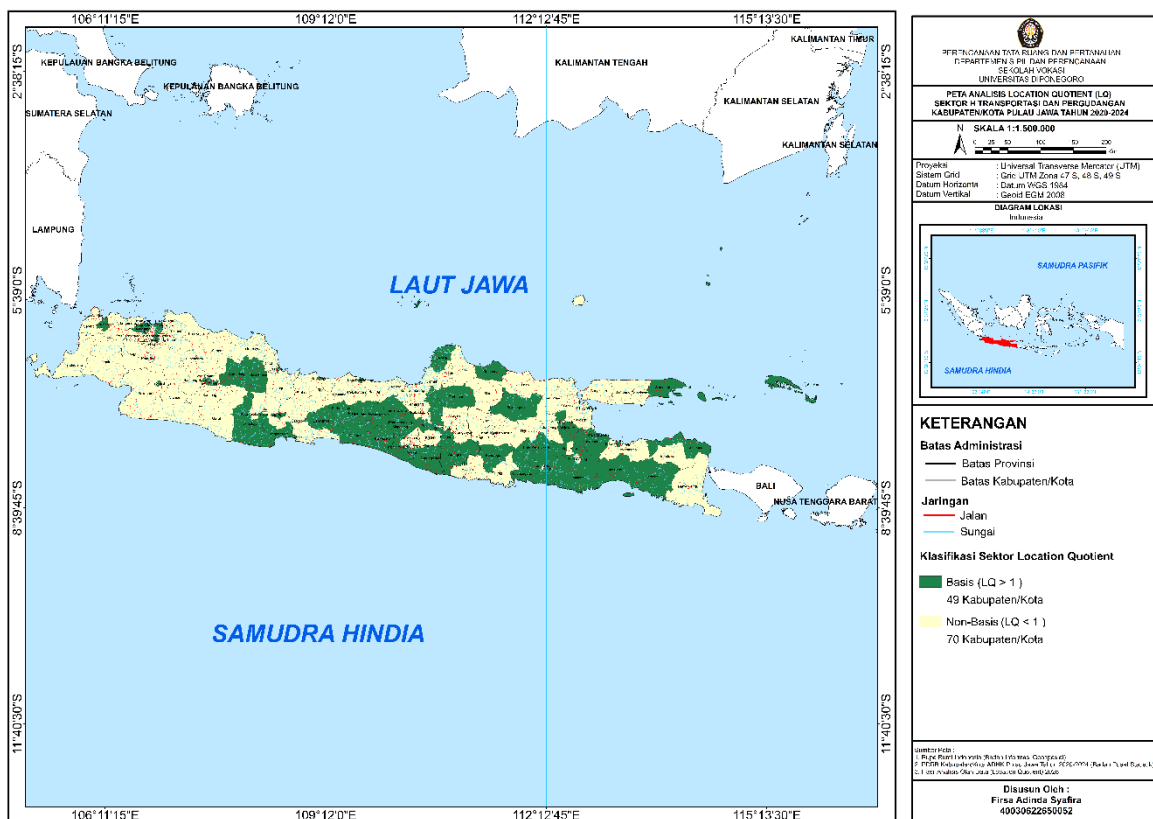
**Gambar 4. 21** Peta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Peta Sektor G menunjukkan sebaran merata dengan warna hijau sektor unggulan menyebar di berbagai kota dan kabupaten strategis. Koridor perdagangan utama Pantai Utara Jawa (Pantura) melalui konsentrasi wilayah unggulan yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Pada wilayah-wilayah yang menampilkan warna merah sektor tertinggal dan

warna kuning sektor potensial mencerminkan keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung perdagangan.

Sektor Perdagangan merupakan sektor tersier dengan persebaran unggulan tertinggi sebanyak 29 wilayah berstatus unggulan. Mencerminkan fungsi perdagangan sebagai aktivitas ekonomi merata pada seluruh wilayah dari kabupaten hingga kota besar. Kota-kota dengan nilai LQ dan KPPW tinggi pada sektor ini antara lain Kota Cirebon (LQ=7,160; KPPW=24,68) dan Kota Bandung (LQ=6,170; KPPW=32,79), sebagai pusat perdagangan regional. Kabupaten Bogor (LQ=1,226; KPPW=38,71), Kabupaten Karawang (LQ=1,265; KPPW=34,45), menunjukkan keunggulan perdagangan yang kompetitif.

Sektor H mencakup kegiatan transportasi darat, laut, udara, dan pergudangan. Distribusi LQ pada sektor H dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi, posisi strategis sebagai simpul logistik, serta keberadaan pelabuhan, bandara, dan terminal regional.



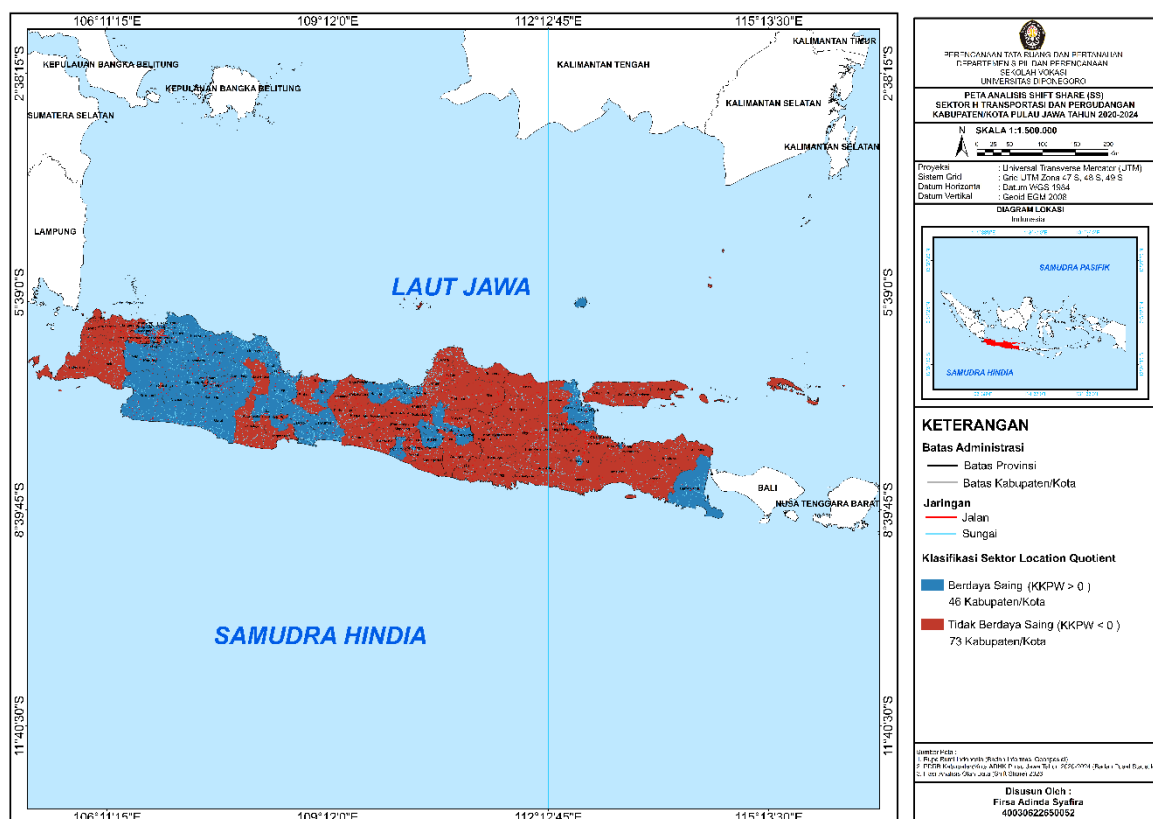
Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 22** Peta Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor H

Sektor H memiliki 49 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor transportasi dan pergudangan di daerah tersebut telah mampu melayani kebutuhan lokal. Sementara itu, 70 kabupaten/kota berstatus

non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan keterbatasan layanan transportasi. Nilai LQ tertinggi berada di Kota Tangerang ( $LQ = 4,501$ ), menunjukkan peran simpul transportasi dan logistik di barat Jabodetabekjur. Selanjutnya, Kota Cimahi ( $LQ = 3,187$ ), Kabupaten Tasikmalaya ( $LQ = 3,113$ ), Kota Sukabumi ( $LQ = 2,711$ ), Kabupaten Malang ( $LQ = 2,669$ ), dan Kota Serang ( $LQ = 2,242$ ) Banten menonjol sebagai simpul transportasi menuju Pelabuhan Merak. Sebaliknya, nilai LQ terendah tercatat di Kota Jakarta Kepulauan Seribu ( $LQ = 0,114$ ), Kabupaten Purwakarta ( $LQ = 0,154$ ), Kabupaten Bekasi ( $LQ = 0,175$ ), Kabupaten Indramayu ( $LQ = 0,212$ ), dan Kota Malang ( $LQ = 0,227$ ), menunjukkan infrastruktur dan aktivitas logistik yang belum menjadi penggerak utama ekonomi lokal.

KPPW Sektor H menunjukkan aktivitas transportasi serta pergudangan di masing-masing daerah. Pertumbuhan sektor H berkaitan erat dengan pengembangan infrastruktur logistik nasional, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan pergudangan modern.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

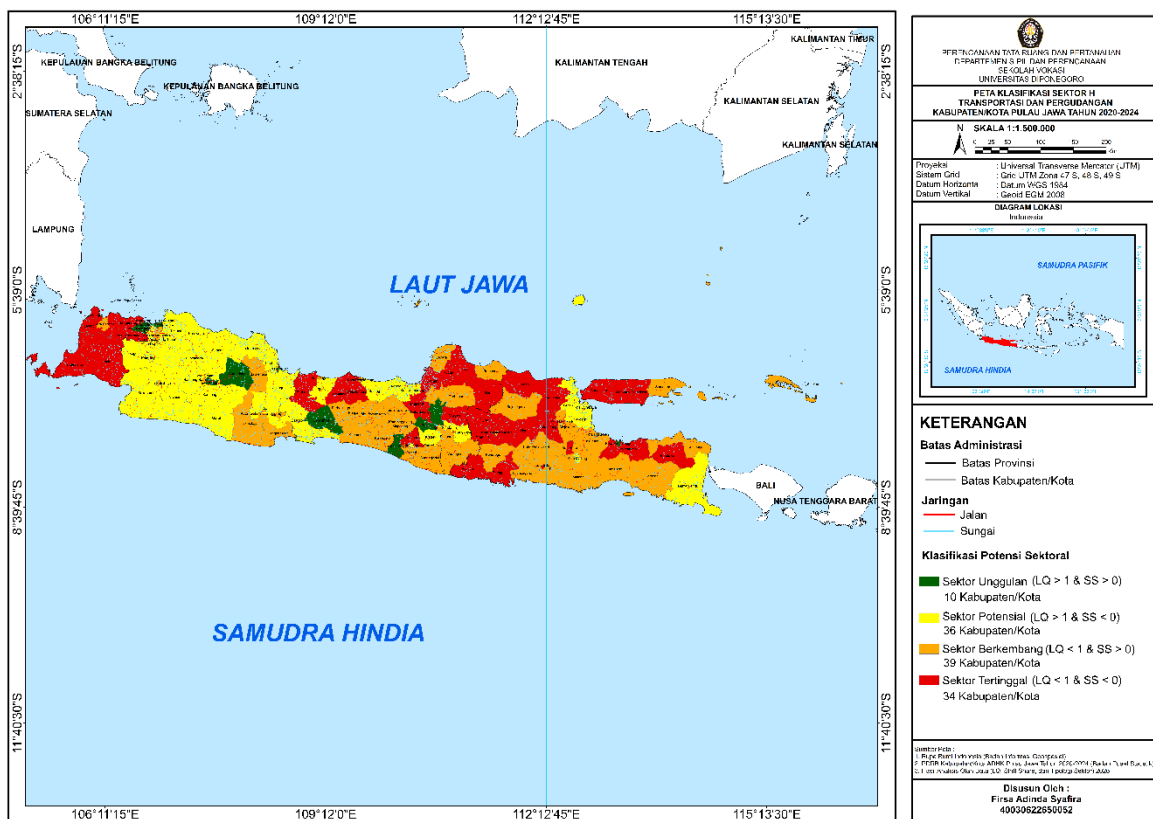
Gambar 4. 23 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor H

Pada peta KPPW terdapat 46 kabupaten/kota berdaya saing, nilai tertinggi terdapat di Kabupaten Sidoarjo ( $KPPW = 191,40$ ) menunjukkan kapasitas logistik yang berperan untuk kawasan penyangga Surabaya. Diikuti oleh Kota Malang ( $KPPW = 151,09$ ), Kota

Madiun (KPPW = 142,30), Kabupaten Banyuwangi (KPPW = 139,05), Kota Probolinggo (KPPW = 138,17), dan Kota Surabaya (KPPW = 135,08). Sebaliknya, nilai KPPW terendah berada di Kota Jakarta Timur (-47,60), Kabupaten Lebak (-37,68), Kota Serang (-36,49), Kabupaten Serang (-35,24), dan Kota Cilegon (-29,79), menunjukkan minimnya kapasitas logistik baru di wilayah tersebut.

Sektor H menunjukkan 46 kabupaten/kota berdaya saing (KKPW > 0) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan lebih cepat dibandingkan rata-rata Pulau Jawa. Sementara itu, 73 kabupaten/kota tidak berdaya saing (KKPW < 0), menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Peta Sektor H memperlihatkan dominasi warna kuning sektor berkembang yang tersebar merata, menunjukkan bahwa basis transportasi yang ada di berbagai wilayah sedang menghadapi tekanan daya saing. Warna hijau sektor unggulan terlihat pada simpul-simpul transportasi yang mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur baru.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 24 Peta Sektor Transportasi dan Pergudangan

Terdapat 10 wilayah yang berstatus unggulan, sementara 39 wilayah berkembang basis namun tidak berdaya saing dan 36 wilayah potensial. Tingginya kategori berkembang

menunjukkan bahwa meski banyak wilayah memiliki sektor transportasi sebagai basis lokal, daya saingnya melemah, akibat pergeseran moda transportasi, meningkatnya persaingan dari wilayah lain yang melakukan pembangunan infrastruktur.

Sektor I meliputi usaha perhotelan, restoran, kafe, dan berbagai usaha akomodasi lainnya. Sektor I menjadi cerminan aktivitas pariwisata dan mobilitas penduduk suatu daerah. Nilai LQ tinggi umumnya ditemukan di destinasi wisata unggulan dan kota-kota yang ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara.



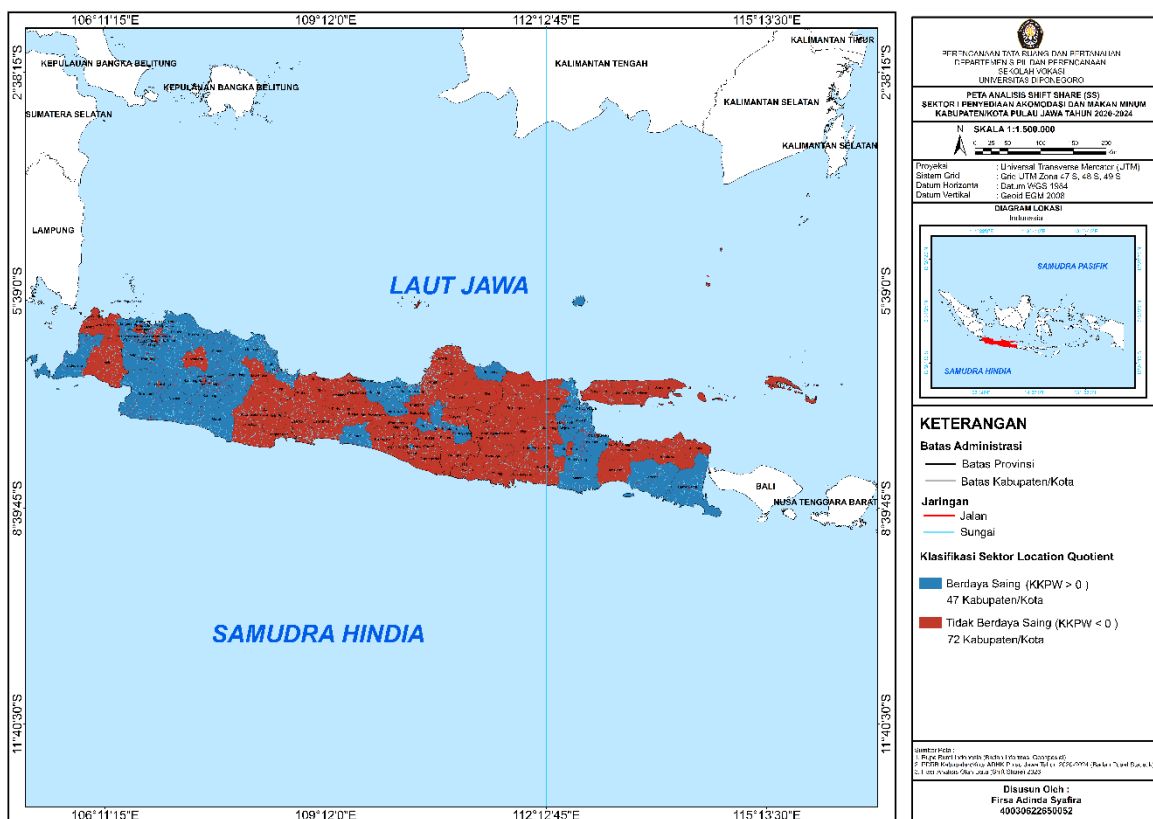
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 25 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor I

Sektor I memiliki 57 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor akomodasi dan kuliner di daerah tersebut mampu melayani permintaan lokal sekaligus menarik wisatawan dari luar. Sementara itu, 62 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), mengindikasikan bahwa potensi pariwisata dan kuliner belum ter konsentrasi secara maksimal. Nilai LQ tertinggi berada di Kota Serang ( $LQ = 6,573$ ), selanjutnya terdapat Kabupaten Pangandaran ( $LQ = 3,151$ ) menjadi titik wisata unggulan Jawa Barat, diikuti Kota Tasikmalaya ( $LQ = 2,922$ ), Kabupaten Purwakarta ( $LQ = 2,760$ ), dan Kabupaten Ciamis ( $LQ = 2,428$ ). Di DIY, Kota Yogyakarta ( $LQ = 1,168$ ; Basis) dan Kabupaten Sleman ( $LQ = 1,033$ ; Basis) membentuk kluster pariwisata

Yogyakarta sebuah zona aglomerasi wisata yang menopang ekonomi regional DIY. Kabupaten Magelang (LQ = 1,022; Basis) dan Kota Magelang (LQ = 1,740; Basis) turut membentuk klaster wisata Purwomanggung terdapat Candi Borobudur. Sebaliknya, nilai LQ terendah berada di Kabupaten Mojokerto (LQ = 0,089), Kabupaten Bekasi (LQ = 0,096), Kota Kediri (LQ = 0,105), Kabupaten Gresik (LQ = 0,117), dan Kabupaten Jember (LQ = 0,134), fokus ekonomi bergeser pada sektor akomodasi dan pariwisata.

KPPW Sektor I mencerminkan pertumbuhan industri pariwisata dan kuliner pada masing-masing daerah. Nilai ini berkaitan erat dengan perkembangan destinasi wisata, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, dan berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif berbasis kuliner dan hospitality.



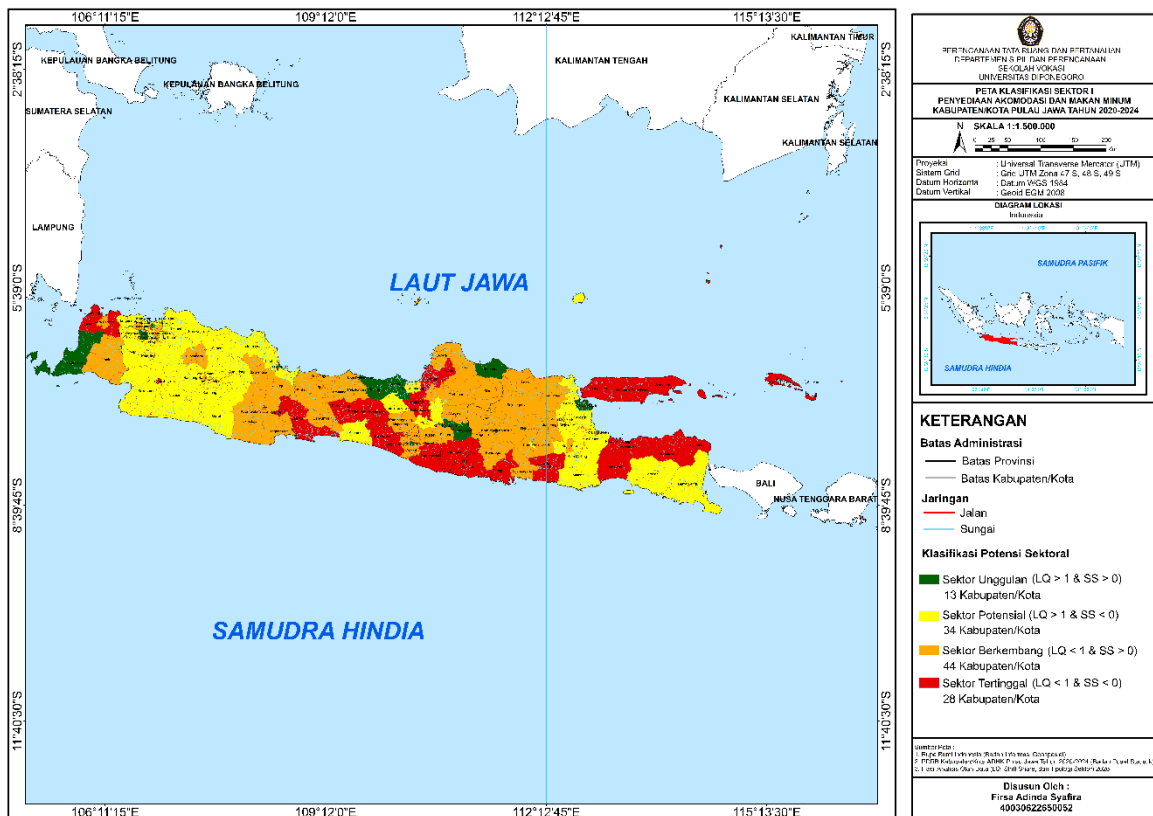
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 26 Peta Analisis *Shift Share* KPPW Sektor I

Sektor I menunjukkan 47 kabupaten/kota berdaya saing (KKPW > 0) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum lebih cepat dibandingkan rata-rata Pulau Jawa. Sementara itu, 72 kabupaten/kota tidak berdaya saing (KKPW < 0), menunjukkan sektor memerlukan pengembangan destinasi dan promosi pariwisata. Nilai KPPW tertinggi terdapat pada Kabupaten Bogor (KKPW = 135,34), selanjutnya terdapat pada Kabupaten Sumedang (KKPW = 130,43), Kabupaten

Banyuwangi (KPPW = 129,11), Kota Kediri (KPPW = 128,11), dan Kabupaten Sidoarjo (KPPW = 126,25). Kota Bandung (KPPW = 121,31), Kota Bekasi (KPPW = 126,24), Kabupaten Garut (KPPW = 124,15), dan Kabupaten Jember (KPPW = 123,40). Sebaliknya, nilai KPPW terendah terdapat pada Kota Jakarta Timur (-46,83), Kabupaten Purworejo (-12,52), dan Kabupaten Purbalingga (-12,37).

Peta Sektor I menunjukkan warna kuning sektor berkembang yang mendominasi, terutama pada kabupaten-kabupaten yang memiliki destinasi wisata alam namun belum berhasil meningkatkan daya saing pariwisatanya. Warna hijau sektor unggulan terkonsentrasi pada kota-kota yang berhasil mengembangkan ekonomi wisata yang modern dan berorientasi pasar luas. Pola ini menandakan perlunya revitalisasi strategi pengembangan pariwisata yang lebih inovatif dan terintegrasi di wilayah-wilayah berkembang.



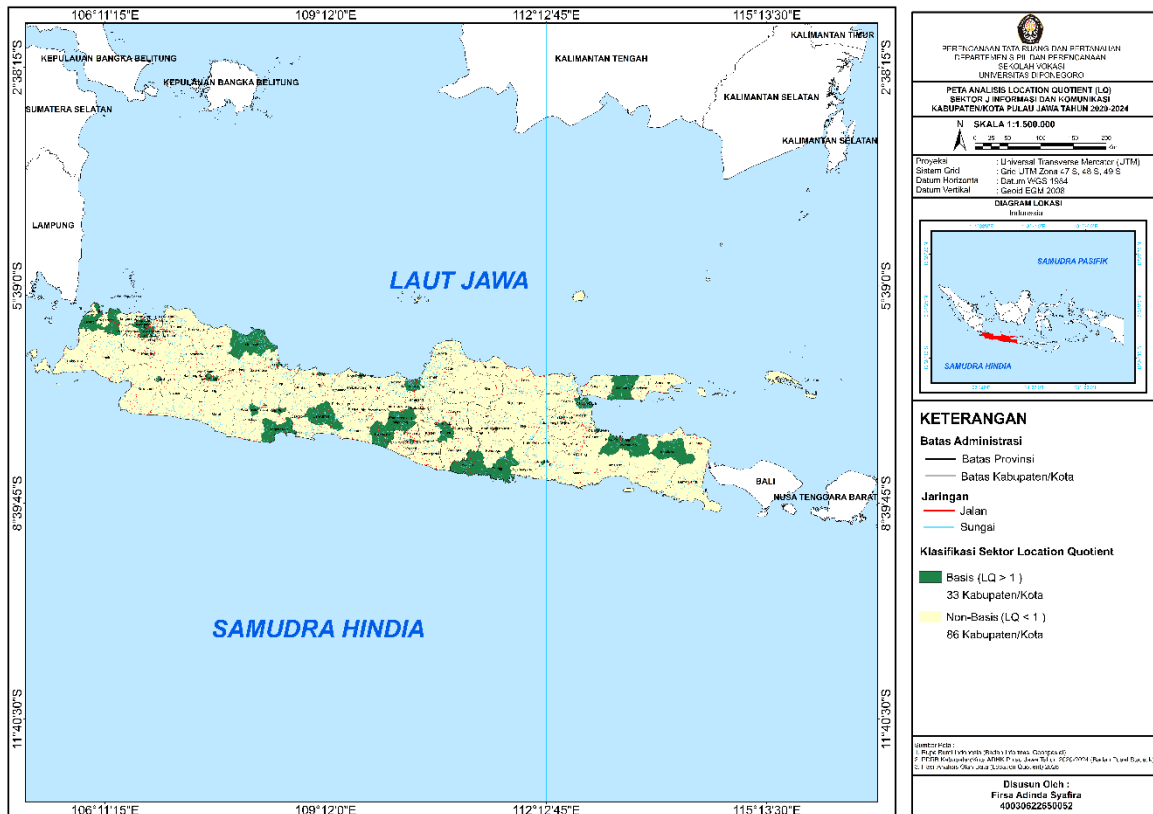
Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 27** Peta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor Akomodasi dan Makan Minum mencerminkan perkembangan industri pariwisata dan kuliner di Pulau Jawa. Hanya 13 wilayah yang berstatus unggulan, dengan konsentrasi pada kota-kota wisata dan metropolitan yaitu, Kota Surakarta (LQ=1,513;

KPPW=31,62), Kota Cirebon (LQ=1,058; KPPW=119,42), Kabupaten Karanganyar (LQ=1,064; KPPW=23,81), dan Kabupaten Rembang.

Sektor J mencakup kegiatan penyiaran, telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi teknologi informasi, serta layanan informasi lainnya. Sektor J menjadi indikator tingkat kemajuan ekonomi digital dan modernisasi struktur ekonomi suatu daerah.



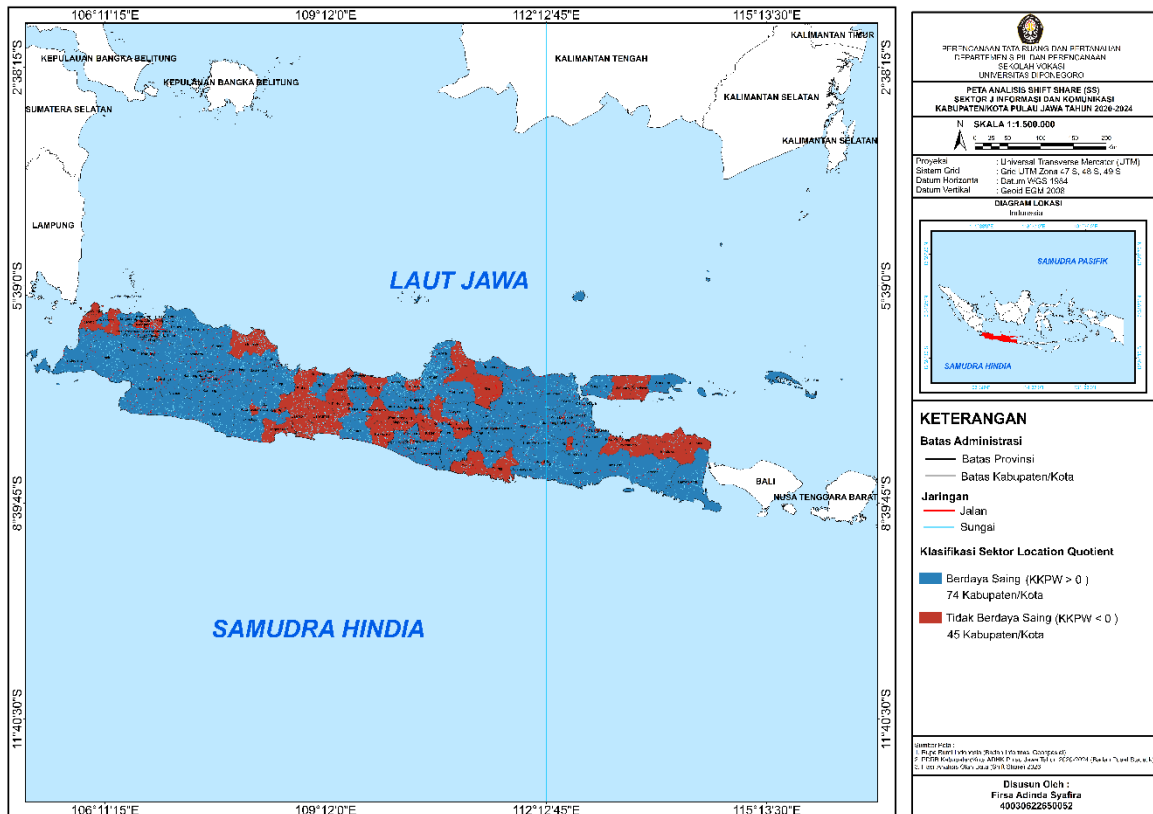
Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 28 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor J**

Sektor J memiliki 33 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor informasi dan komunikasi di daerah tersebut telah berkembang melampaui kebutuhan lokal. Sementara itu, 86 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan kesenjangan digital di kabupaten/kota daerah tersebut. Nilai LQ tertinggi terdapat pada Kabupaten Indramayu ( $LQ = 5,183$ ), selanjutnya terdapat Kota Bandung ( $LQ = 4,850$ ) menunjukkan startup teknologi yang berkembang pesat di Bandung Raya. Kota Mojokerto ( $LQ = 4,635$ ), Kota Pasuruan ( $LQ = 3,834$ ), dan Kota Blitar ( $LQ = 3,628$ ). Pada kawasan Jabodetabekjur, Kota Tangerang ( $LQ = 1,068$ ) dan Kota Tangerang Selatan ( $LQ = 1,393$ ) berstatus Basis. Sebaliknya, nilai LQ terendah tercatat di Kota Jakarta Kepulauan Seribu ( $LQ = 0,100$ ), Kabupaten Bandung Barat ( $LQ = 0,189$ ),

Kabupaten Purwakarta (LQ = 0,192), Kabupaten Lumajang (LQ = 0,192), dan Kota Kediri (LQ = 0,206), menunjukkan kesenjangan infrastruktur digital.

KPPW Sektor J mengukur pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi pada masing-masing daerah. Pada era transformasi digital, sektor J menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong efisiensi ekonomi secara menyeluruh.



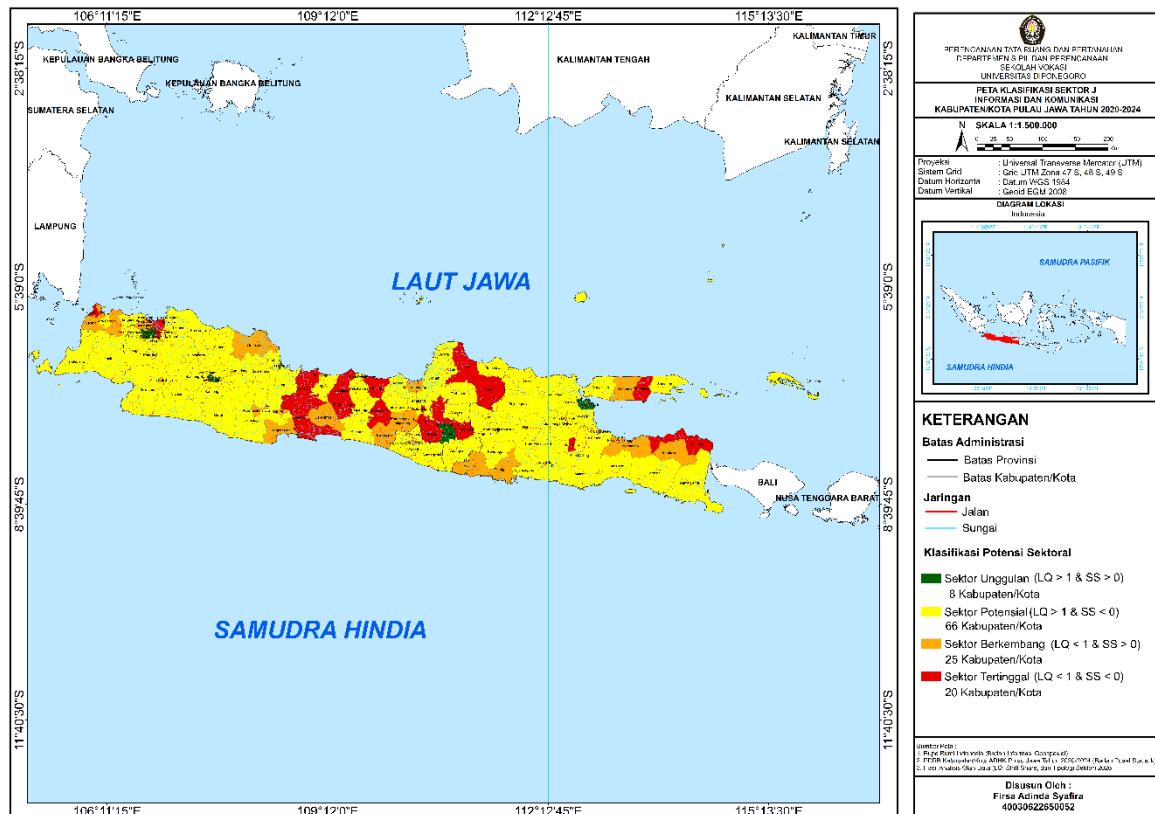
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 29 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor J

Sektor J menunjukkan 74 kabupaten/kota berdaya saing (KPPW > 0) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, 45 kabupaten/kota tidak berdaya saing (KPPW < 0), menunjukkan rendahnya performa sektor informasi dan komunikasi di wilayah tersebut. Nilai KPPW tertinggi terdapat di Kota Jakarta Selatan (KPPW = 241,51), selanjutnya Kota Madiun (KPPW = 131,31), Kabupaten Gresik (KPPW = 125,32), Kabupaten Tuban (KPPW = 124,62), Kabupaten Banyuwangi (KPPW = 118,31), dan Kabupaten Malang (KPPW = 118,29). Sebaliknya, nilai KPPW terendah jatuh pada Kota Jakarta Utara (-38,11), Kota Jakarta Barat (-38,07), Kota Jakarta Kepulauan Seribu (-37,92), Kota Jakarta Pusat (-35,75), Kabupaten Pangandaran (-31,52), dan Kota

Sukabumi (-31,47), di mana pertumbuhan teknologi informasi lebih lambat dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Peta Sektor J mendominasi sektor potensial di antara seluruh sektor sebagian seluruh wilayah memiliki warna kuning, hanya beberapa warna hijau sektor unggulan pada kota-kota besar. Pola mengkonfirmasi bahwa transformasi digital sedang berlangsung secara luas namun belum merata secara kualitas. Wilayah-wilayah merah di area prioritas untuk intervensi infrastruktur digital.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 30 Sektor J Informasi dan Komunikasi

Pada Pada sektor Informasi dan Komunikasi hanya 8 wilayah yang berstatus unggulan, namun 66 wilayah berada dalam kategori potensial terbanyak di antara semua sektor. Kota Jakarta Selatan (KPPW tertinggi = 241,51), Kota Bandung (LQ = 4,850; KPPW = 106,20), dan Kota Cirebon (LQ = 2,287; KPPW = 90,33). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan sektor informasi dan komunikasi di Pulau Jawa masih terpusat pada wilayah yang memiliki infrastruktur digital maju, tingkat penetrasi internet yang tinggi, konsentrasi perusahaan teknologi, serta didukung oleh aktivitas ekonomi berbasis pengetahuan yang berkembang pesat. Meskipun jumlah sektor unggulan relatif sedikit, dominasi kategori potensial mengindikasikan bahwa sebagian besar kabupaten/kota

sebenarnya telah memiliki tingkat spesialisasi sektor informasi dan komunikasi yang cukup baik, namun belum diikuti pertumbuhan daya saing yang optimal.

**Tabel 4. 3 Jumlah Tipologi Sektor Tersier G-J**

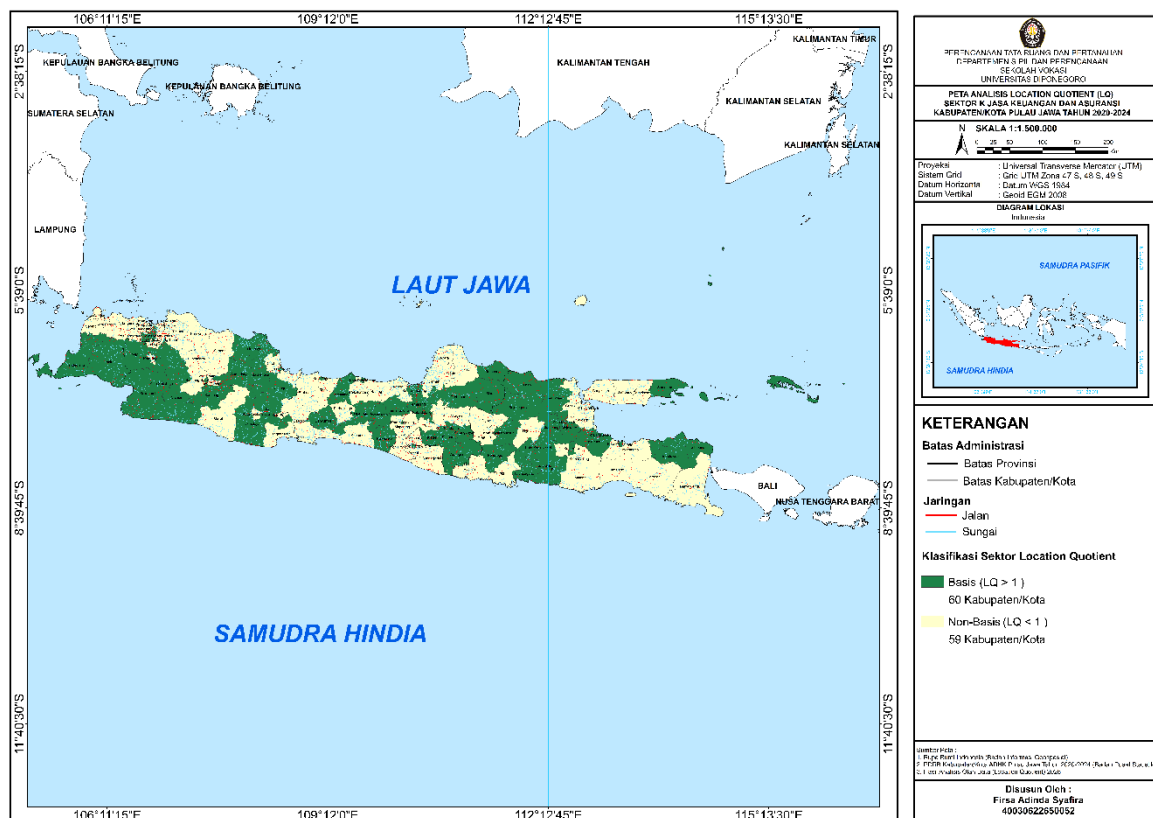
| No. | Klasifikasi Tipologi       | Nilai LQ dan Nilai ShiftShare                   | Sektor G<br>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | Sektor H<br>Transportasi dan Pergudangan | Sektor I<br>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | Sektor J<br>Informasi dan Komunikasi |
|-----|----------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|
| 1.  | Sektor Unggulan (Hijau)    | LQ>1 (Basis) & KPPW>0 (Berdaya Saing)           | 29 Wilayah  | 10 Wilayah                               | 13 Wilayah                                       | 8 Wilayah                            |
| 2.  | Sektor Potensial (Kuning)  | LQ>1 (Basis) & KPPW<0 (Tidak Berdaya Saing)     | 41 Wilayah  | 36 Wilayah                               | 34 Wilayah                                       | 66 Wilayah                           |
| 3.  | Sektor Berkembang (Oranye) | LQ<1 (Non-Basis) & KPPW>0 (Berdaya Saing)       | 20 Wilayah  | 39 Wilayah                               | 44 Wilayah                                       | 25 Wilayah                           |
| 4.  | Sektor Tertinggal (Merah)  | LQ<1 (Non-Basis) & KPPW<0 (Tidak Berdaya Saing) | 29 Wilayah  | 34 Wilayah                               | 28 Wilayah                                       | 20 Wilayah                           |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Sebanyak 41 wilayah Sektor G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada dalam kategori potensial, menandakan bahwa aktivitas perdagangan tumbuh secara luas meski belum menjadi sektor basis. Namun 29 wilayah yang tertinggal Sumenep dan pesisir selatan Jawa menunjukkan bahwa akses pasar dan konektivitas perdagangan masih menjadi hambatan di wilayah sektor tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor perdagangan di Pulau Jawa masih belum merata, karena wilayah-wilayah dengan dukungan infrastruktur transportasi, pusat distribusi, dan konsentrasi penduduk yang tinggi cenderung memiliki performa perdagangan yang lebih baik dibandingkan wilayah yang relatif terpencil. Keberadaan wilayah potensial dalam jumlah besar menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki peluang untuk terus berkembang apabila didukung oleh peningkatan aksesibilitas, penguatan jaringan distribusi, dan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Pada sektor Transportasi dan Pergudangan, wilayah-wilayah unggulan pada Sektor H merupakan simpul logistik strategis: Kabupaten Kulon Progo dengan Bandara Internasional Yogyakarta (LQ=2,256; KPPW=40,84), Kabupaten Sumedang (LQ=1,105; KPPW=112,34), Kota Cirebon sebagai simpul transportasi multimodal (LQ=2,187;

KPPW=125,63), serta Kota Jakarta Barat (LQ=1,253; KPPW=63,46). Nilai KPPW yang sangat tinggi pada beberapa wilayah ini menunjukkan pertumbuhan transportasi yang tinggi melampaui rata-rata Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan tidak hanya berfungsi sebagai sektor penunjang mobilitas barang dan penumpang, tetapi juga menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi wilayah yang memiliki posisi strategis dalam jaringan logistik regional. Keberadaan simpul-simpul transportasi ini memperkuat keterhubungan antarwilayah, mempercepat arus distribusi barang, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang dilalui oleh koridor transportasi utama.



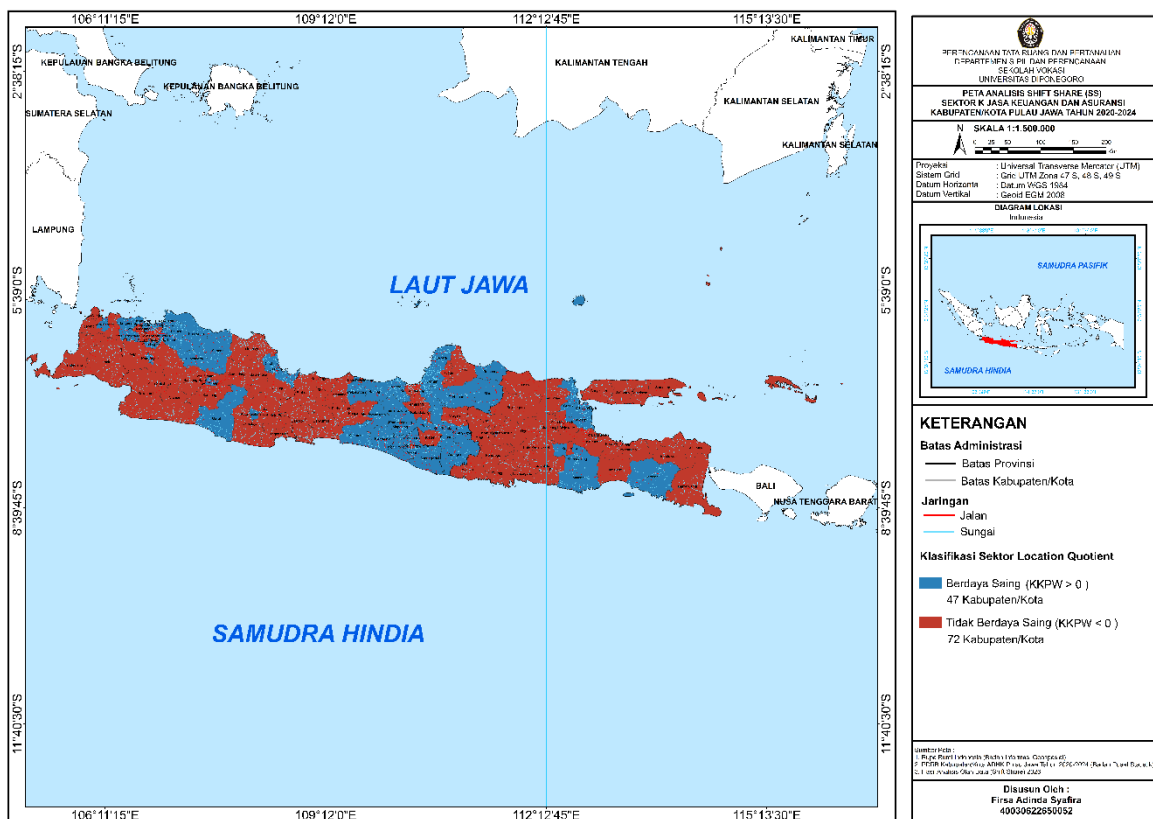
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 31 Peta Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor K

Kategori sektor berkembang pada Sektor I berjumlah 44 wilayah angka tertinggi di antara seluruh sektor tersier, menunjukkan bahwa beragam wilayah yang memiliki basis akomodasi dan kuliner namun pertumbuhannya tidak cukup cepat dibanding wilayah lain. Hal ini terjadi karena pergeseran preferensi wisatawan dan persaingan yang semakin ketat dari destinasi baru yang muncul dengan konsep modern dan terintegrasi. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun sektor akomodasi dan makan minum telah menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi wilayah, penguatannya masih perlu diarahkan agar mampu mengikuti perubahan pola permintaan wisata dan konsumsi masyarakat. Dominasi

kategori potensial 66 wilayah pada Sektor J merupakan tanda digitalisasi sedang menyebar ke berbagai kabupaten/kota di Pulau Jawa.

Sektor K memiliki 47 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor jasa keuangan dan asuransi di daerah tersebut telah mampu melayani kebutuhan lokal sekaligus menjangkau wilayah lain. Sementara itu, 72 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan akses dan layanan keuangan yang masih terbatas. Nilai LQ tertinggi yaitu Kota Tangerang Selatan ( $LQ = 2,232$ ), Kabupaten Sumedang ( $LQ = 2,223$ ), Kota Sukabumi ( $LQ = 2,156$ ), Kota Pekalongan ( $LQ = 2,126$ ), dan Kota Jakarta Pusat ( $LQ = 2,120$ ), menunjukkan bahwa wilayah-wilayah ini memiliki keunggulan sektor keuangan. Sebaliknya, nilai LQ terendah tercatat pada Kota Jakarta Kepulauan Seribu ( $LQ = 0,032$ ), Kabupaten Bekasi ( $LQ = 0,117$ ), Kabupaten Gresik ( $LQ = 0,122$ ), Kabupaten Sidoarjo ( $LQ = 0,131$ ), dan Kabupaten Karawang ( $LQ = 0,137$ ).



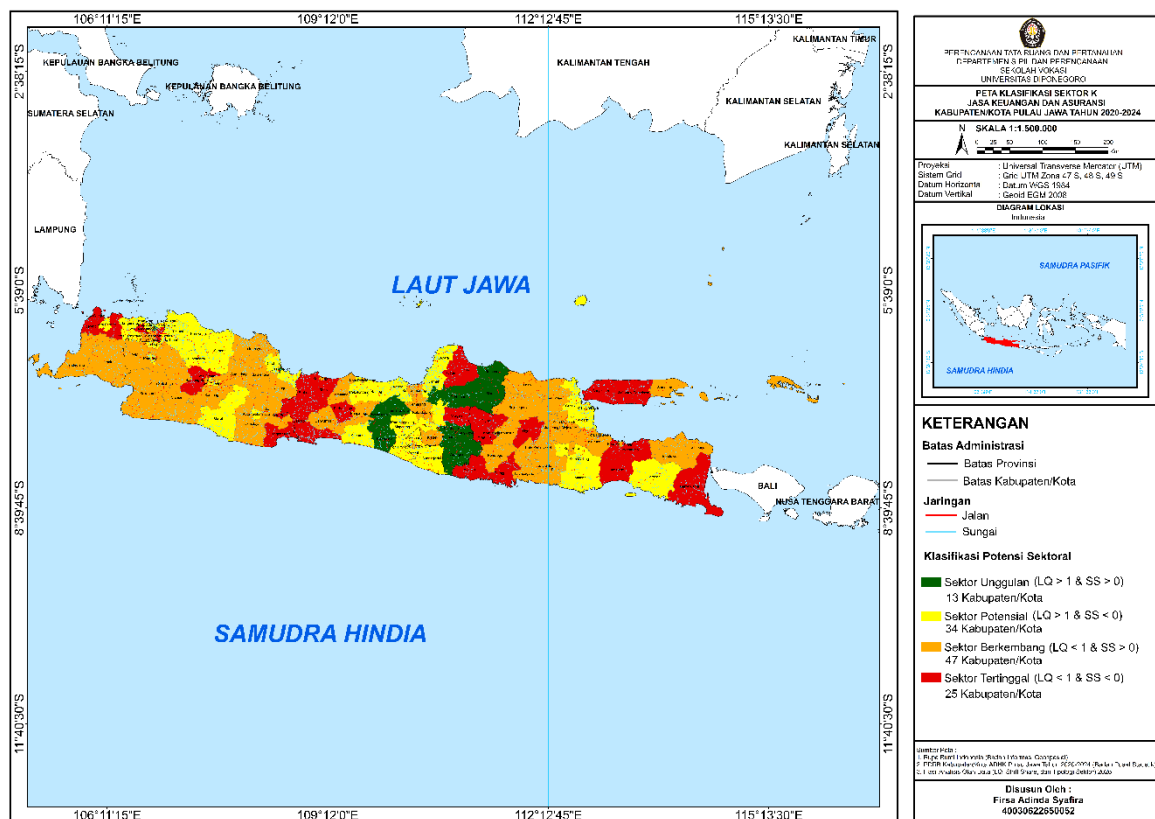
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 32 Peta Analisis *Shift Share* KPPW Sektor K

Selain keunggulan komparatif (LQ), pertumbuhan sektor K perlu dilihat dari sisi daya saing kompetitifnya. Komponen Pertumbuhan Wilayah (KPPW) mengukur seberapa cepat sebuah wilayah tumbuh dibandingkan rata-rata Pulau Jawa pada sektor yang sama.

Wilayah dengan KPPW positif menunjukkan pertumbuhan sektor keuangan yang lebih cepat dari rata-rata dan berpotensi menjadi pusat jasa keuangan yang semakin kompetitif di masa mendatang.

Sektor K menunjukkan 47 kabupaten/kota berdaya saing (KKPW > 0) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor keuangan dan asuransi lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, sebanyak 72 kabupaten/kota tidak berdaya saing (KPPW < 0), yang menunjukkan tengah terbatasnya jangkauan keuangan di daerah tersebut. Nilai KPPW tertinggi terdapat pada Kota Depok (KPPW = 115,40), selanjutnya Kabupaten Malang (KPPW = 114,92), Kabupaten Cirebon (KPPW = 112,18), Kota Malang (KPPW = 111,60), dan Kabupaten Jember (KPPW = 110,88). Sebaliknya, nilai KPPW terendah terdapat pada Kota Jakarta Timur (-67,70), Kota Jakarta Selatan (-16,52), Kota Cilegon (-4,99), Kabupaten Lebak (-4,68), dan Kota Banjar (-3,33).



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 33 Peta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Peta Sektor K didominasi warna orange sektor berkembang yang tersebar merata, menunjukkan bahwa basis keuangan pada sebagian wilayah sedang mengalami tekanan ekonomi. Warna hijau sektor unggulan berada pada berbagai wilayah, dan tidak hanya

terkonsentrasi pada kota-kota besar, menunjukkan bahwa jasa keuangan telah menjangkau berbagai tingkatan wilayah.

Sektor Jasa Keuangan terdapat 13 kabupaten/kota yang berstatus unggulan, namun 47 kabupaten/kota berkembang basis namun tidak berdaya saing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak wilayah memiliki sektor keuangan sebagai basis lokal, daya saingnya sedang melemah. Perkembangan teknologi finansial, layanan perbankan digital, serta meningkatnya penggunaan transaksi elektronik menyebabkan aktivitas jasa keuangan semakin terkonsentrasi pada wilayah yang memiliki infrastruktur digital dan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi. Akibatnya, banyak daerah yang sebelumnya memiliki peran penting dalam sektor keuangan mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan pusat-pusat ekonomi utama.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

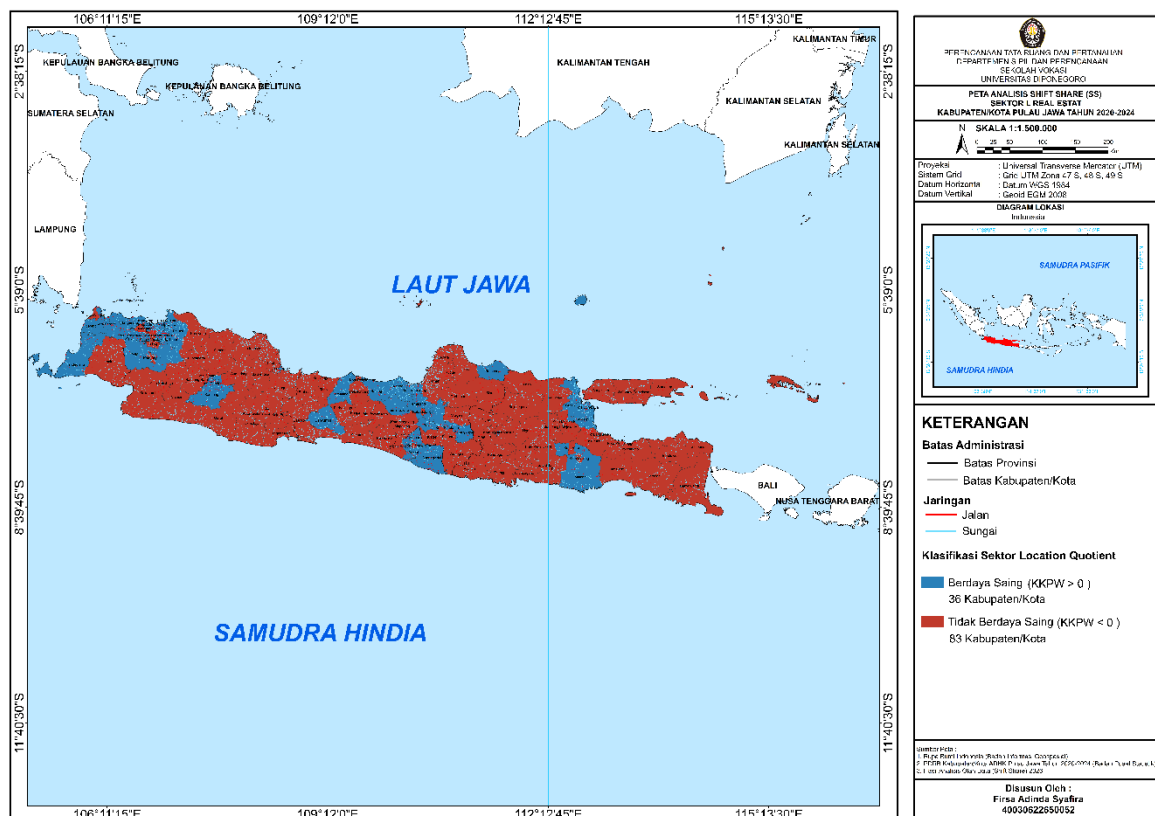
Gambar 4. 34 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor L

Sektor L mencakup kegiatan real estate. Distribusi sektor ini berkaitan dengan dinamika pertumbuhan kota, pembangunan perumahan, kawasan komersial. Perkembangan sektor real estate mengikuti arah, pertumbuhan jumlah penduduk, serta meningkatnya kebutuhan ruang untuk aktivitas ekonomi dan permukiman. Wilayah yang mengalami urbanisasi tinggi cenderung memiliki aktivitas real estate yang lebih berkembang karena

didorong oleh permintaan terhadap hunian, pusat perdagangan, kawasan industri, serta fasilitas penunjang lainnya Sektor real estate memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor konstruksi, jasa keuangan, dan perdagangan sehingga pertumbuhannya sering kali menjadi indikator perkembangan ekonomi suatu wilayah.

Sektor L memiliki 49 Kabupaten/Kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, yang berarti sektor real estate di daerah tersebut berkembang melampaui kebutuhan lokal dan mampu menarik investasi properti dari luar daerah. Sementara itu, 70 Kabupaten/Kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan pasar properti yang masih belum berkembang. Nilai LQ tertinggi terdapat pada Kota Serang ( $LQ = 2,952$ ), Kota Salatiga ( $LQ = 2,723$ ), Kabupaten Garut ( $LQ = 2,650$ ), dan (Kota Malang  $LQ = 2,561$ ). Di sisi lain, nilai LQ terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Seribu ( $LQ = 0,045$ ), Kabupaten Bekasi ( $LQ = 0,127$ ), dan Kabupaten Sidoarjo ( $LQ = 0,148$ ), ketiga wilayah tersebut merupakan kawasan industri padat dan kepulauan yang tidak memiliki aktivitas real estate yang signifikan.

Daya saing sektor real estate berkaitan dengan investasi properti, dan pembangunan kawasan perumahan baru. Wilayah yang mengalami lonjakan pembangunan properti, akan menunjukkan nilai KPPW yang tinggi.

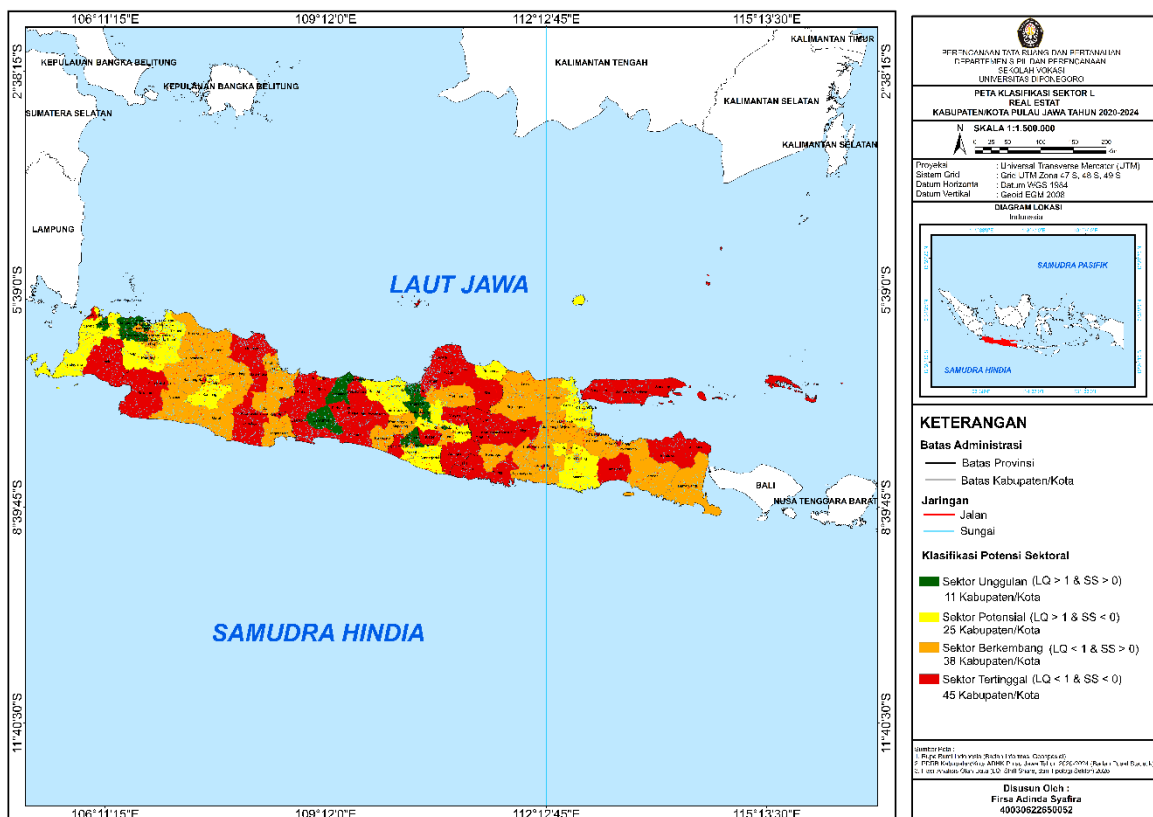


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 35 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor L

Sektor L menunjukkan 36 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan sektor real estate lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, 83 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan bahwa pasar properti di wilayah tersebut belum berkembang secara optimal. Nilai KPPW tertinggi yaitu Kota Jakarta Timur ( $KPPW = 194,22$ ), Kabupaten Bekasi ( $KPPW = 142,07$ ), Kota Cirebon ( $KPPW = 139,83$ ), Kabupaten Bandung ( $KPPW = 135,67$ ), dan Kabupaten Bogor ( $KPPW = 129,05$ ). Sebaliknya, nilai KPPW terendah terdapat pada Kota Jakarta Selatan ( $-36,07$ ), Kota Tegal ( $-7,45$ ), Kabupaten Grobogan ( $-5,07$ ), Kabupaten Wonogiri ( $-5,03$ ), dan Kota Tangerang ( $-4,29$ ).

Peta Sektor L didominasi merah sektor tertinggal dan kuning sektor berkembang, menandakan bahwa real estate sedang berkembang pesat. Wilayah-wilayah berwarna hijau sektor unggulan membentuk kluster pada kawasan Jabodetabek, Bandung Raya, dan kawasan Segitiga Emas Jawa Tengah. Kondisi ini menggambarkan pentingnya pengembangan pasar properti yang merata sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang tertinggal

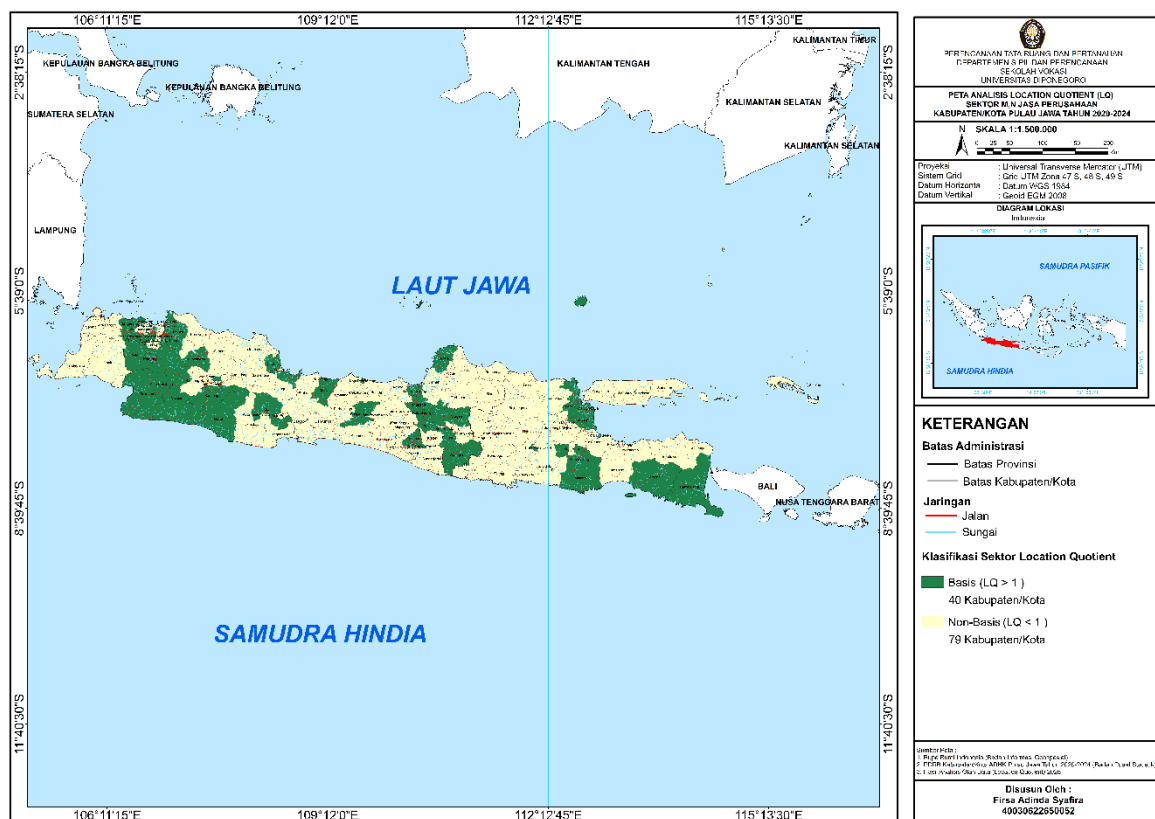


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 36 Peta Sektor Real Estate

Sektor Real Estate menampilkan dominasi kategori tertinggal sebanyak 66 wilayah, angka tertinggi kedua setelah Jasa Perusahaan. Dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, terdapat 12 kabupaten/kota berstatus Sektor Unggulan, 28 kabupaten/kota berstatus Sektor Berkembang, 13 kabupaten/kota berstatus Sektor Potensial, dan 66 kabupaten/kota berstatus Sektor Tertinggal. Kondisi ini mencerminkan bahwa pasar properti dan real estate terkonsentrasi di wilayah-wilayah metropolitan dan kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.

Sektor M,N mencakup kegiatan jasa profesional seperti konsultasi, riset, periklanan, serta jasa persewaan dan ketenagakerjaan. Sektor ini pada umumnya berkembang di kota-kota besar yang memiliki ekosistem bisnis.



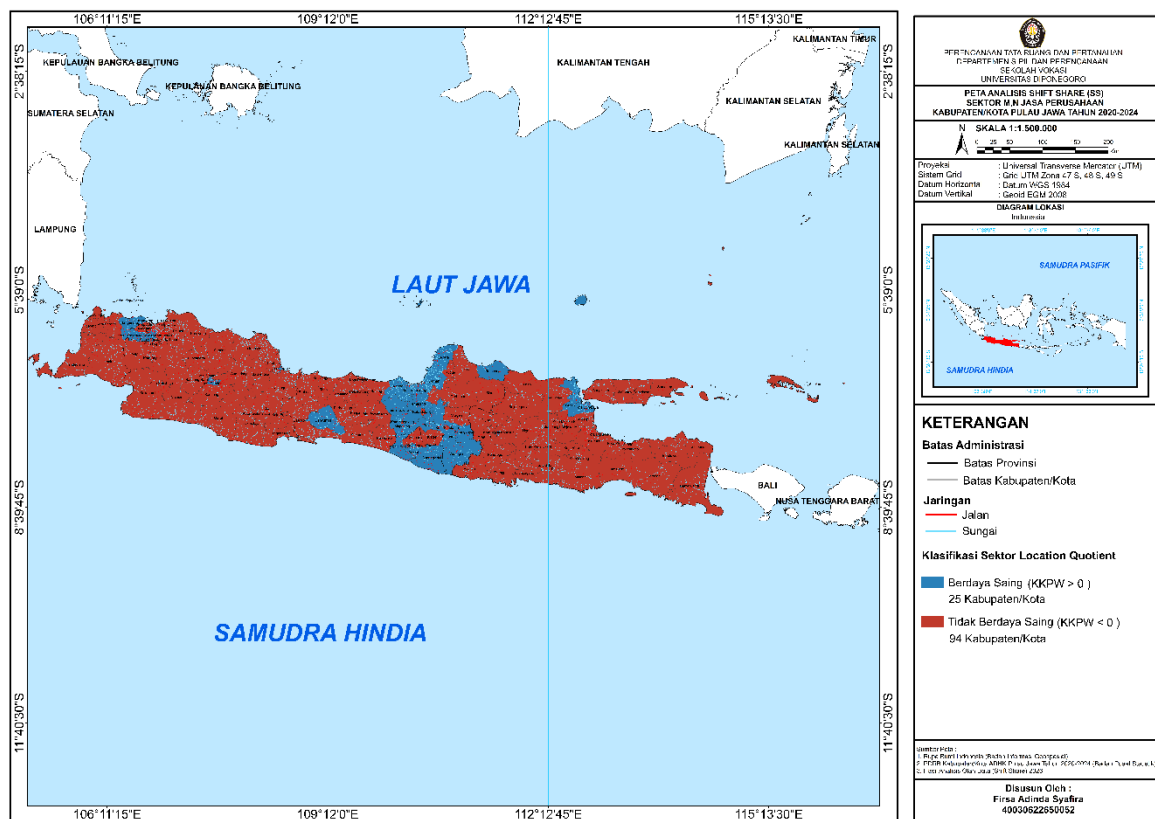
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 37 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor M, N

Sektor M, N memiliki 40 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang berarti jasa perusahaan di daerah tersebut telah mampu melayani kebutuhan lokal dan menarik permintaan dari luar. Sementara itu, 79 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan ekosistem bisnis dan jasa profesional yang masih terbatas. Nilai LQ tertinggi terdapat di Kota Malang ( $LQ = 5,325$ ), kemudian Kabupaten Malang ( $LQ = 4,237$ ), Kota Bogor ( $LQ = 3,283$ ), Kota Salatiga ( $LQ =$

3,163), dan Kabupaten Tangerang (LQ = 3,115). Sementara itu, nilai LQ terendah terdapat pada Kota Jakarta Kepulauan Seribu (0,064), Kabupaten Subang (0,118), dan Kabupaten Sumedang (0,174).

Daya saing sektor jasa profesional dan persewaan menunjukkan ekosistem bisnis suatu wilayah. Wilayah yang memiliki KPPW positif pada sektor ini memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan tenaga kerja terampil, dan jaringan bisnis yang luas.

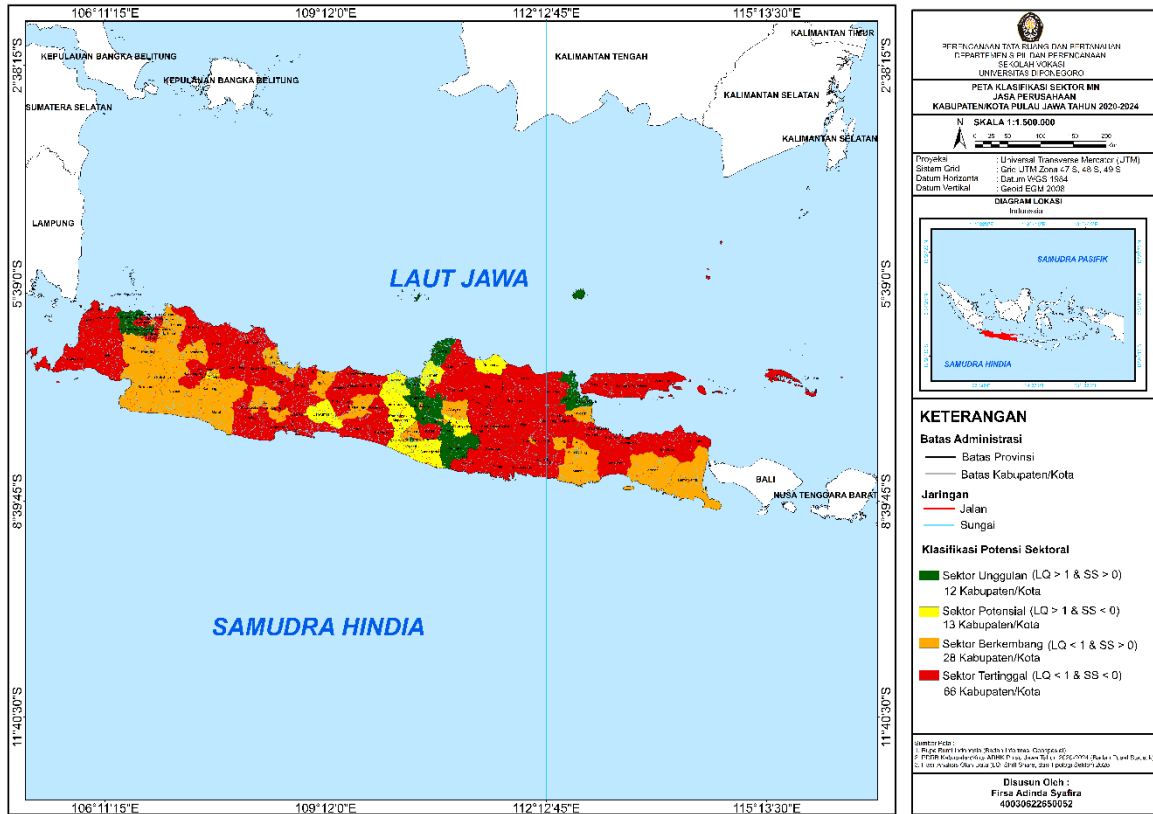


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 38 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor M, N

Sektor M, N menunjukkan 25 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, artinya pertumbuhan jasa perusahaan lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, 94 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan masih terbatasnya kapasitas layanan jasa perusahaan di wilayah tersebut. Nilai KPPW tertinggi yaitu Kota Bandung ( $KKPW = 128,75$ ), Kabupaten Gresik ( $KKPW = 122,38$ ), Kota Surabaya ( $KKPW = 121,08$ ), Kota Cirebon ( $KKPW = 114,57$ ), dan Kota Madiun ( $KKPW = 113,27$ ). Sebaliknya, nilai KPPW terendah tercatat pada Kota Jakarta Timur ( $-13,30$ ), Kabupaten Wonosobo ( $-10,47$ ), Kota Magelang ( $-9,75$ ), Kota Jakarta Kepulauan Seribu ( $-7,72$ ), dan Kabupaten Purworejo ( $-7,62$ ).

Peta Sektor MN didominasi wilayah berwarna merah sektor tertinggal, dengan sedikit warna hijau sektor potensial yang terkonsentrasi di kota-kota besar. Pola visual ini secara menunjukkan kesenjangan antara metropolitan dan daerah dalam hal ketersediaan layanan bisnis profesional. Kondisi ini menjadi tantangan bagi upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan.



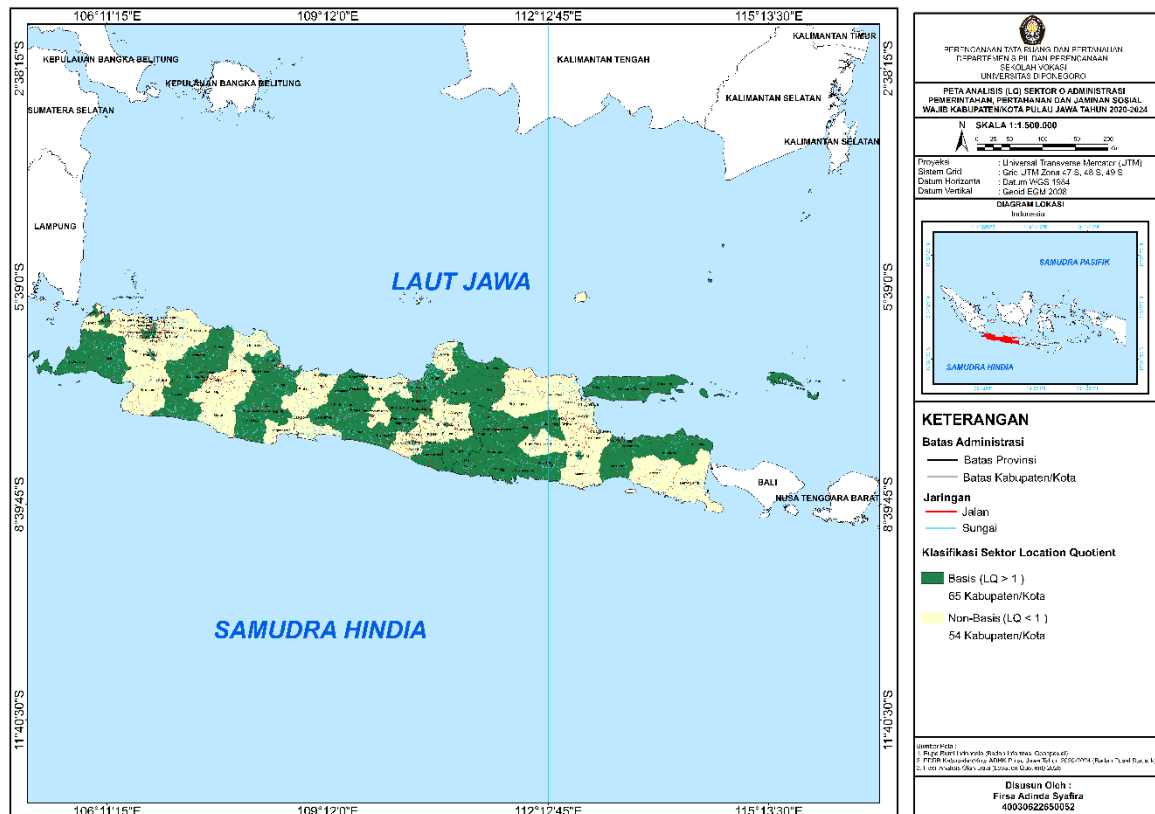
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 39 Peta Sektor M, N Jasa Perusahaan

Sektor Sektor Jasa Perusahaan terdapat 66 kabupaten/kota berada dalam kategori tertinggal dan hanya 12 kabupaten/kota yang berstatus unggulan. Hal ini menunjukkan layanan bisnis profesional, konsultasi, hukum, akuntansi, riset, dan berbagai jasa penunjang usaha lainnya masih sangat terkonsentrasi pada wilayah metropolitan. Karakteristik sektor bergantung pada keberadaan pusat kegiatan ekonomi, konsentrasi perusahaan, tingkat investasi, serta kebutuhan usaha terhadap layanan profesional.

Sektor O menunjukkan fungsi pemerintahan di suatu wilayah. Distribusi dipengaruhi oleh status administratif wilayah, keberadaan instansi militer, kepolisian, serta program jaminan sosial. Wilayah yang merupakan pusat pemerintahan atau memiliki konsentrasi pegawai negeri sipil yang tinggi akan menjadi basis. Besarnya kontribusi sektor administrasi pemerintahan dipengaruhi oleh keberadaan kantor pemerintahan tingkat pusat maupun

daerah, fasilitas pertahanan dan keamanan, serta berbagai layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.

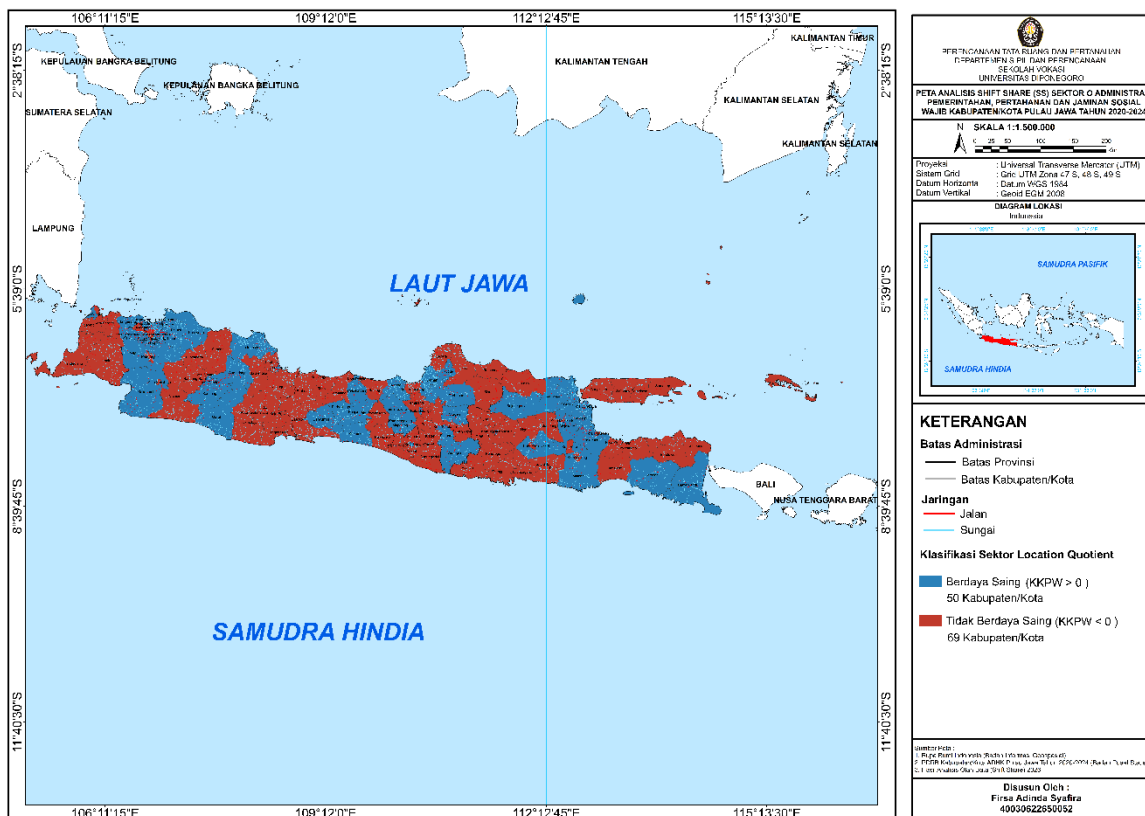


Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 40 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor O**

Sektor O memiliki 65 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa sektor administrasi pemerintahan memberikan kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian lokal di wilayah tersebut. Sementara itu, 54 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan kontribusi sektor pemerintahan yang relatif kecil terhadap daerah. Nilai LQ tertinggi terdapat pada Kota Magelang ( $LQ = 4,127$ ), Kabupaten Subang ( $LQ = 3,141$ ), Kota Tangerang Selatan ( $LQ = 2,593$ ), Kabupaten Magetan ( $LQ = 2,541$ ), dan Kabupaten Bangkalan ( $LQ = 2,489$ ). Sebaliknya, nilai LQ terendah tercatat pada Kabupaten Pasuruan (0,106), Kabupaten Bekasi (0,111), Kabupaten Karawang (0,115), Kabupaten Gresik (0,147), dan Kota Surabaya (0,176) yang merupakan pusat industri besar di mana proporsi sektor swasta lebih mendominasi.

Pertumbuhan sektor administrasi pemerintahan di suatu wilayah dipengaruhi oleh kebijakan daerah, dan peningkatan anggaran belanja pemerintah daerah.

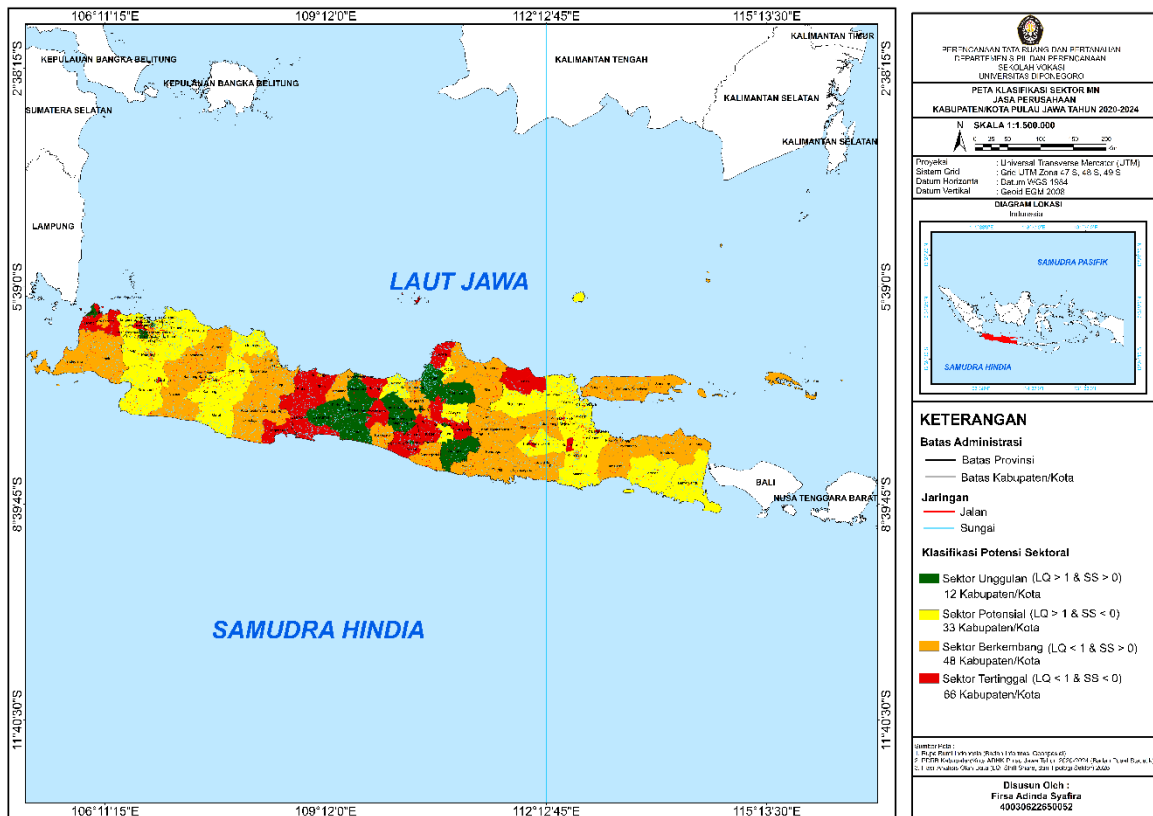


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 41 Peta Analisis *Shift Share* KPPW Sektor O

Sektor O menunjukkan 50 kabupaten/kota berdaya saing ( $KKPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, menunjukkan pertumbuhan sektor pemerintahan lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, 69 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan pertumbuhan sektor ini yang masih di bawah rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Nilai KPPW tertinggi yaitu Kabupaten Bekasi ( $KKPW = 120,63$ ), Kabupaten Bandung ( $KKPW = 114,72$ ), Kabupaten Banyuwangi ( $KKPW = 108,74$ ), Kabupaten Gresik ( $KKPW = 108,54$ ), dan Kabupaten Indramayu ( $KKPW = 108,24$ ). Sebaliknya, nilai KPPW terendah pada Kota Jakarta Selatan ( $-27,20$ ), Kabupaten Pandeglang ( $-11,72$ ), Kabupaten Boyolali ( $-10,46$ ), Kabupaten Purworejo ( $-6,86$ ), dan Kota Pekalongan ( $-6,42$ ).

Peta Sektor O memperlihatkan persebaran yang cukup merata antara berbagai kategori. Warna hijau sektor unggulan tersebar pada berbagai wilayah dengan fungsi administrasi dan pemerintahan yang kuat, tidak hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi. Dominasi kuning sektor berkembang pada kabupaten mengindikasikan bahwa pertumbuhan aparatur pemerintahan secara relatif mulai melambat seiring tekanan efisiensi dan reformasi birokrasi.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 42** Peta Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Sektor Administrasi Pemerintahan menunjukkan pola yang berbeda dari sektor jasa lainnya 17 wilayah unggulan dan distribusi yang relatif lebih merata antara kategori berkembang 48 wilayah dan potensial 33 wilayah.

**Tabel 4. 4** Jumlah Tipologi Sektor Tersier K-O

| No. | Klasifikasi Tipologi       | Nilai LQ dan Nilai ShiftShare               | Sektor K<br>Jasa Keuangan dan Asuransi | Sektor L<br>Real Estate | Sektor M, N<br>Jasa Perusahaan | Sektor O<br>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |
|-----|----------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------|--|
| 1.  | Sektor Unggulan (Hijau)    | LQ>1 (Basis) & KPPW>0 (Berdaya Saing)       | 13 Wilayah                             | 11 Wilayah              | 12 Wilayah                     | 17 Wilayah   |
| 2.  | Sektor Potensial (Kuning)  | LQ>1 (Basis) & KPPW<0 (Tidak Berdaya Saing) | 34 Wilayah                             | 25 Wilayah              | 13 Wilayah                     | 33 Wilayah   |
| 3.  | Sektor Berkembang (Oranye) | LQ<1 (Non-Basis) & KPPW>0 (Berdaya Saing)   | 47 Wilayah                             | 38 Wilayah              | 38 Wilayah                     | 48 Wilayah   |
| 4.  | Sektor Tertinggal (Merah)  | LQ<1 (Non-Basis) & KPPW<0                   | 25 Wilayah                             | 45 Wilayah              | 66 Wilayah                     | 21 Wilayah   |

| No. | Klasifikasi Tipologi | Nilai LQ dan Nilai <i>ShiftShare</i> | Sektor K<br>Jasa Keuangan dan Asuransi | Sektor L<br>Real Estate | Sektor M, N<br>Jasa Perusahaan | Sektor O<br>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |
|-----|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|
|     |                      | (Tidak Berdaya Saing)                |  |                         |                                |  |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Wilayah-wilayah unggulan pada sektor keuangan antara lain Kota Jakarta Pusat (LQ=2,12; KPPW=25,45) sebagai pusat keuangan nasional, Kota Cirebon (LQ=1,620; KPPW=100,78) yang menunjukkan pertumbuhan jasa keuangan tinggi, serta berbagai kabupaten di Jawa Tengah seperti Kabupaten Rembang (LQ=1,347; KPPW=4,07), Kabupaten Purworejo (LQ=1,237; KPPW=3,93), dan Kabupaten Karanganyar (LQ=1,225; KPPW=1,23). Nilai 25 wilayah tertinggal menunjukkan masih terbatasnya akses layanan keuangan formal di wilayah tersebut.

Pada Sektor L Real Estate hanya 11 wilayah yang berstatus unggulan, mencakup Kota Semarang (LQ=1,608; KPPW=2,34), Kota Surakarta (LQ=2,187; KPPW=1,45), Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Semarang (LQ=1,728; KPPW=1,00). Sebanyak 38 wilayah berkembang menunjukkan bahwa pasar properti yang ada di banyak daerah sedang mengalami perlambatan, menandakan perlunya diversifikasi produk properti yang sesuai dengan daya beli masyarakat lokal.

Wilayah-wilayah unggulan antara lain Kota Semarang (LQ=1,641; KPPW=3,03), Kota Jakarta Selatan (LQ=1,291; KPPW=22,84), Kabupaten Boyolali (LQ=1,003; KPPW=3,91), dan beberapa kota besar lainnya. Tingginya angka tertinggal sebanyak 66 wilayah sekaligus angka berkembang 38 kabupaten/kota menunjukkan bahwa sektor ini menjadi cerminan dari konsentrasi kapital manusia dan jaringan bisnis yang sangat tidak merata antara metropolitan dan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor jasa perusahaan masih sangat bergantung pada keberadaan pusat-pusat ekonomi yang memiliki aktivitas bisnis tinggi, konsentrasi tenaga profesional, serta permintaan layanan korporasi yang besar. Di wilayah metropolitan, keberadaan perusahaan skala menengah hingga besar, kantor konsultan, lembaga riset, layanan hukum, dan akuntansi mendorong sektor ini tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Jasa perusahaan masih berkembang terbatas karena struktur ekonomi lokal belum cukup kompleks untuk menopang permintaan terhadap layanan profesional yang bersifat khusus.

Wilayah-wilayah unggulan pada Sektor O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan ibu kota provinsi, kota administrasi pemerintahan,

atau wilayah dengan fungsi militer dan pertahanan: Kota Jakarta Pusat (LQ=1,621; KPPW=37,80), Kota Magelang (LQ=4,127; KPPW=1,81), Kota Surakarta (LQ=1,959; KPPW=1,93), dan berbagai kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki fungsi administrasi kuat. Dominasi kategori berkembang sebanyak 48 kabupaten/kota menunjukkan banyak wilayah yang memiliki sektor pemerintahan sebagai basis lokal namun pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding wilayah lain. Sektor administrasi pemerintahan memiliki pertumbuhan stabil karena didukung oleh kebutuhan pelayanan publik, alokasi anggaran negara, serta fungsi kelembagaan yang melekat pada status administratif suatu wilayah. Wilayah yang berperan sebagai pusat pemerintahan umumnya memiliki tingkat spesialisasi yang lebih tinggi karena menjadi lokasi konsentrasi aktivitas birokrasi, pertahanan, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, persebaran sektor ini tidak hanya menunjukkan struktur administrasi wilayah, tetapi juga menggambarkan fungsi pemerintahan sebagai salah satu penopang aktivitas ekonomi daerah.



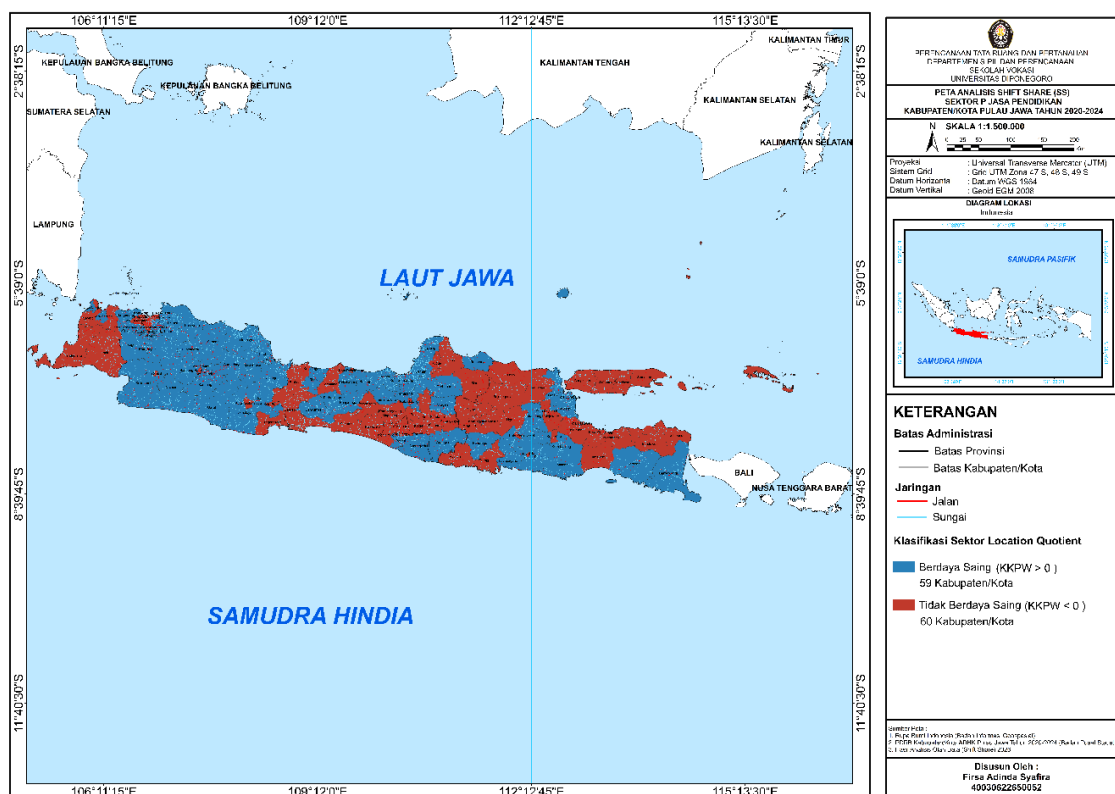
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 43 Peta Analisis Location Quotient (LQ) Sektor P

Sektor P mencakup seluruh kegiatan pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Distribusi sektor ini dipengaruhi oleh keberadaan lembaga pendidikan skala besar, universitas dan pesantren, serta kebijakan pemerintah

daerah dalam mengembangkan infrastruktur pendidikan. Sektor pendidikan juga dipengaruhi oleh konsentrasi penduduk usia sekolah, aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, serta keberadaan pusat-pusat pembelajaran yang mampu menarik mobilitas pelajar dari wilayah sekitarnya. Wilayah yang memiliki perguruan tinggi negeri maupun swasta, lembaga pendidikan keagamaan, dan jaringan sekolah yang lengkap cenderung memiliki kontribusi sektor pendidikan yang lebih besar dibandingkan wilayah lain.

Sektor P memiliki 66 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, menunjukkan sektor jasa pendidikan di daerah tersebut telah mampu melayani kebutuhan lokal sekaligus menarik pelajar dari luar daerah. Sementara itu, 53 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Nilai LQ tertinggi yaitu Kota Cimahi ( $LQ = 5,863$ ), Kabupaten Pangandaran ( $LQ = 3,229$ ), Kabupaten Pandeglang ( $LQ = 2,721$ ), Kota Banjar ( $LQ = 2,544$ ), dan Kabupaten Kebumen ( $LQ = 2,235$ ).



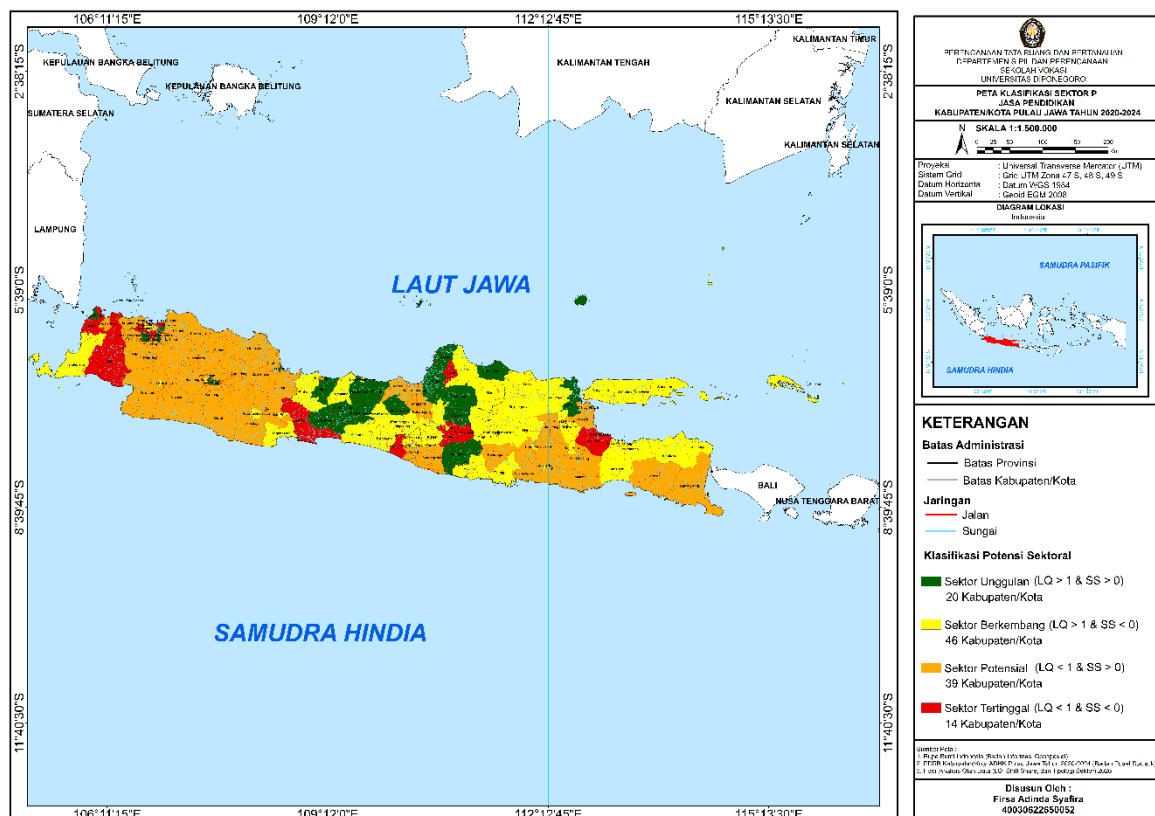
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 44 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor P

Pola konsentrasi basis yang sangat luas terbentuk mencakup hampir seluruh Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur sebagai penggerak sektor pendidikan. Sebaliknya, nilai LQ terendah tercatat pada Kabupaten Sidoarjo (0,126), Kota Jakarta Kepulauan Seribu

(0,177), Kabupaten Karawang (0,225), Kabupaten Malang (0,247), dan Kabupaten Purwakarta (0,251) yang merupakan kawasan yang memiliki proporsi sangat kecil untuk sektor pendidikan. Daya saing sektor pendidikan mencerminkan pertumbuhan investasi dalam infrastruktur pendidikan, jumlah lembaga pendidikan baru, maupun peningkatan angka partisipasi sekolah.

Sektor P menunjukkan 59 kabupaten/kota berdaya saing ( $KPPW > 0$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, pertumbuhan sektor pendidikan lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Terdapat 60 kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KPPW < 0$ ), menunjukkan perlunya peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan. Nilai KPPW tertinggi yaitu Kabupaten Bekasi ( $KPPW = 117,03$ ), Kabupaten Gresik ( $KPPW = 114,43$ ), Kota Jakarta Timur ( $KPPW = 113,33$ ), Kabupaten Blitar ( $KPPW = 112,52$ ), dan Kabupaten Jombang ( $KPPW = 110,36$ ). Sebaliknya, nilai KPPW terendah pada Kota Jakarta Selatan ( $-31,21$ ), Kota Tasikmalaya ( $-19,54$ ), Kabupaten Pangandaran ( $-19,51$ ), Kota Cimahi ( $-19,46$ ), dan Kota Sukabumi ( $-19,44$ ). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya saing sektor pendidikan di Pulau Jawa masih belum merata dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang memiliki basis institusi pendidikan besar, jumlah penduduk usia sekolah yang tinggi, serta dukungan infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap.

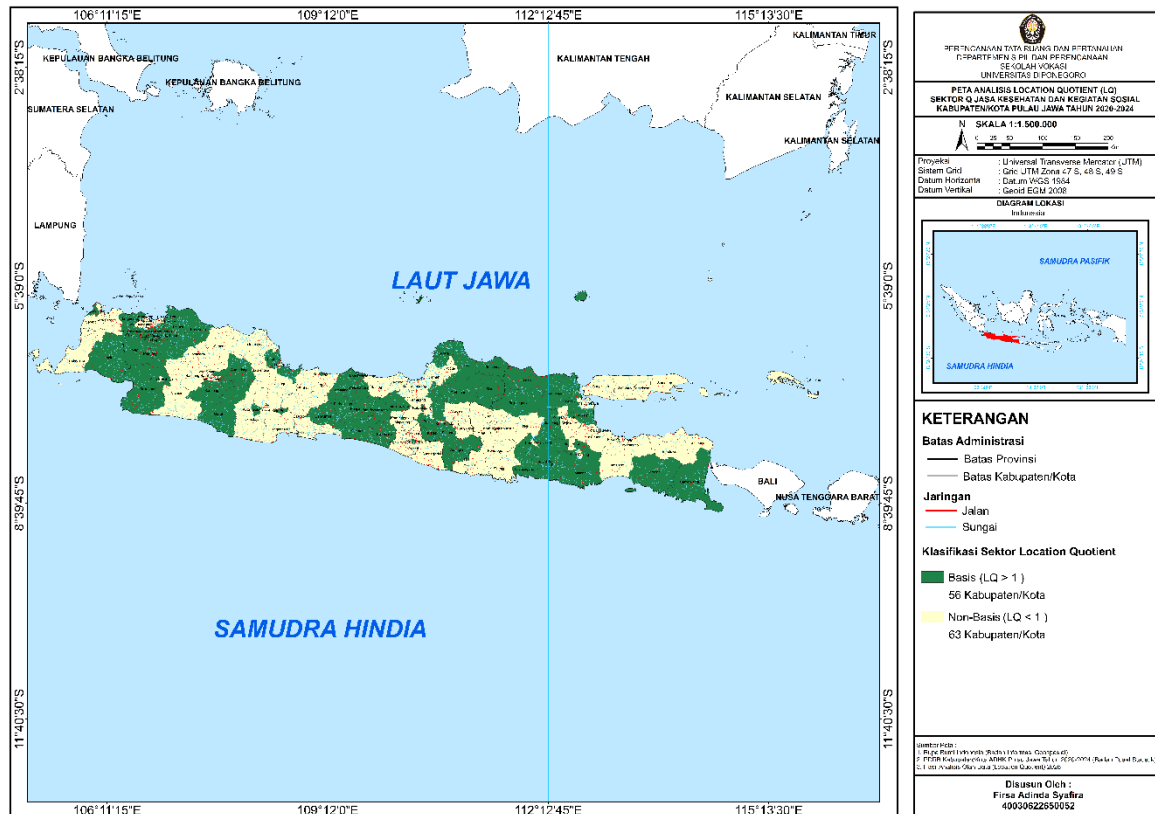


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 45 Peta Sektor Jasa Pendidikan

Peta Sektor P memperlihatkan dominasi kuning sektor berkembang yang merata di sebagian besar wilayah, dengan warna hijau sektor unggulan pada kota-kota pendidikan. Persebaran tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan yang sudah cukup baik di Pulau Jawa perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas agar sektor pendidikan di berbagai daerah dapat kembali tumbuh kompetitif dan relevan dalam era transformasi digital. Sektor P memiliki 20 Kabupaten/Kota berstatus Sektor Unggulan, 39 Kabupaten/Kota berstatus Sektor Potensial, 46 Kabupaten/Kota berstatus Sektor Berkembang, dan 14 Kabupaten/Kota berstatus Sektor Tertinggal dari total 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.

Sektor Q mencakup kegiatan rumah sakit, klinik, praktik dokter, panti sosial, dan layanan kesehatan masyarakat. Distribusi sektor ini dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur kesehatan, kebijakan regionalisasi rumah sakit rujukan, serta permintaan layanan kesehatan formal.



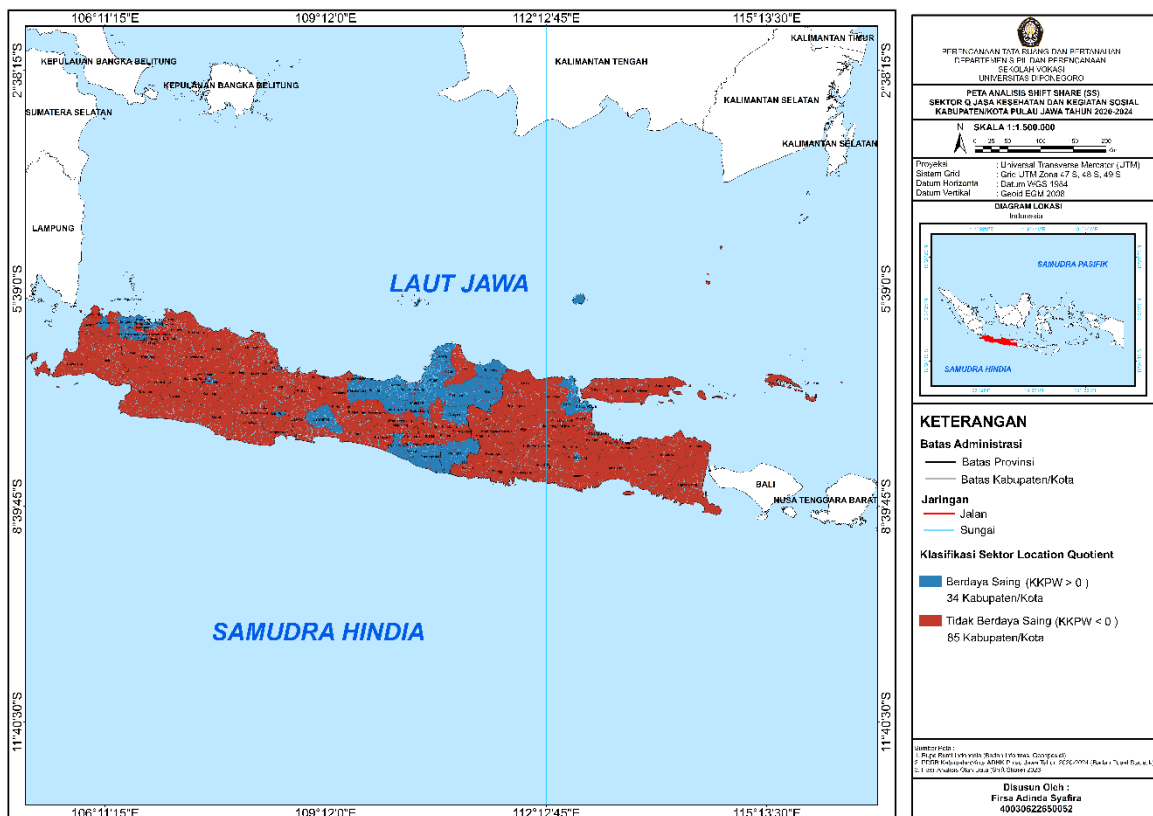
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 46 Peta Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor Q

Sektor Q memiliki 56 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, yang menunjukkan sektor jasa kesehatan di daerah tersebut telah mampu melayani masyarakat lokal sekaligus menjadi rujukan bagi wilayah sekitarnya. Sementara itu, 63 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan keterbatasan

fasilitas dan tenaga kesehatan. Nilai LQ tertinggi yaitu Kabupaten Malang (LQ = 3,773), Kota Magelang (LQ = 3,178), Kabupaten Sidoarjo (LQ = 3,019), Kabupaten Jember (LQ = 2,701), dan Kota Bekasi (LQ = 2,473), di mana Malang Raya secara konsisten menjadi kluster kesehatan yang kuat di Jawa Timur. Kluster basis juga teridentifikasi di Barlingmascakeb, Kedungsepur, serta koridor Bogor–Bekasi–Karawang–Cirebon. Sebaliknya, nilai LQ terendah pada kelompok non-basis terdapat pada Kabupaten Pangandaran (0,093), Kota Surabaya (0,341), Kota Bandung (0,357), Kota Tangerang (0,387), dan Kabupaten Kudus (0,419).

Pertumbuhan sektor kesehatan yang pada suatu wilayah didorong oleh investasi fasilitas kesehatan swasta, penguatan sistem rujukan regional, dan peningkatan cakupan program jaminan kesehatan nasional.



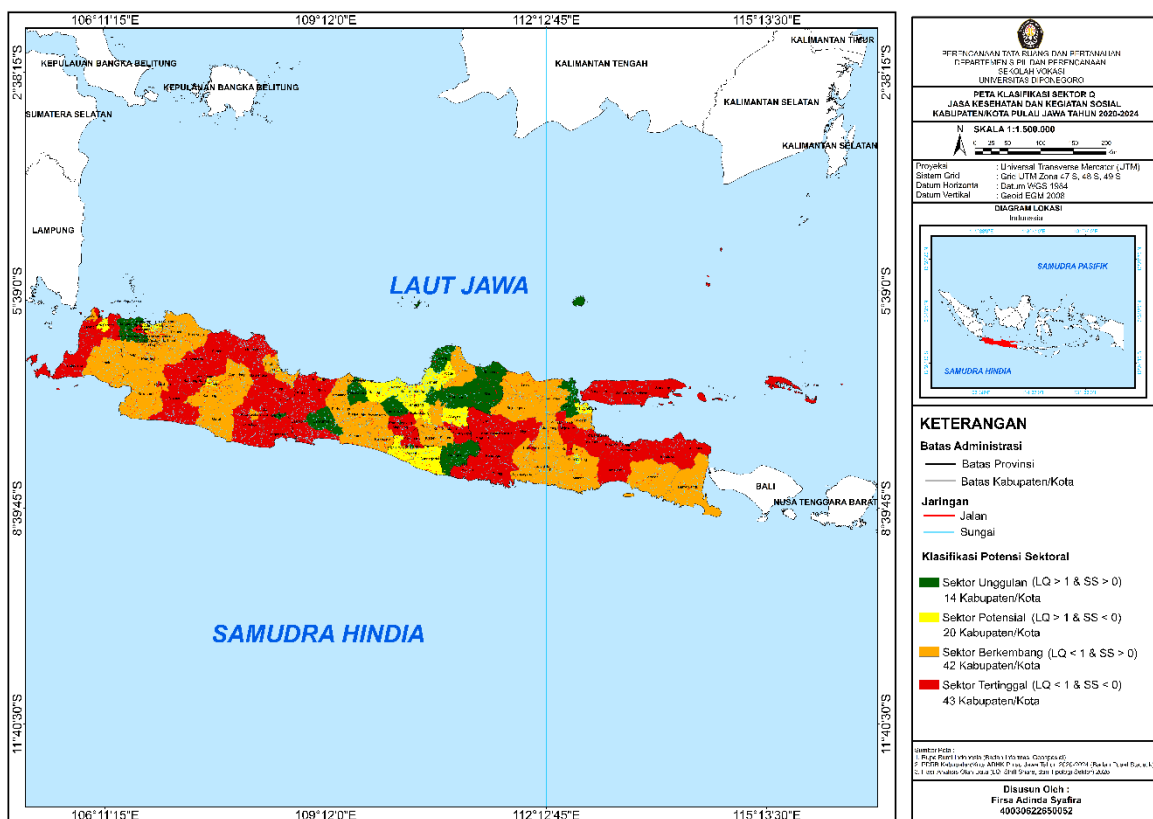
Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 47 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor Q

Sektor Q menunjukkan 34 kabupaten/kota berdaya saing (KKPW > 0) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, menunjukkan pertumbuhan sektor kesehatan lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, 85 kabupaten/kota tidak berdaya saing (KKPW < 0), menunjukkan belum optimalnya kapasitas dan jangkauan layanan kesehatan serta kegiatan sosial di daerah tersebut. Nilai KPPW tertinggi yaitu Kota

Bandung (KPPW = 141,91), Kota Cirebon (KPPW = 130,64), Kota Madiun (KPPW = 127,78), Kabupaten Gresik (KPPW = 121,17), dan Kota Surabaya (KPPW = 115,24). Sebaliknya, nilai KPPW terendah tercatat pada Kota Jakarta Timur (-42,68), Kota Jakarta Selatan (-12,20), Kabupaten Boyolali (-9,69), Kabupaten Cilacap (-5,61), dan Kota Cilegon (-5,10).

Peta Sektor Q menampilkan persebaran yang relatif merata antara berbagai kategori, dengan kluster hijau sektor unggulan di kota-kota yang memiliki fasilitas kesehatan rujukan regional. Dominasi merah dan kuning di wilayah-wilayah Jawa Timur menunjukkan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas. Perlunya investasi pada bidang infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah yang saat ini tertinggal.



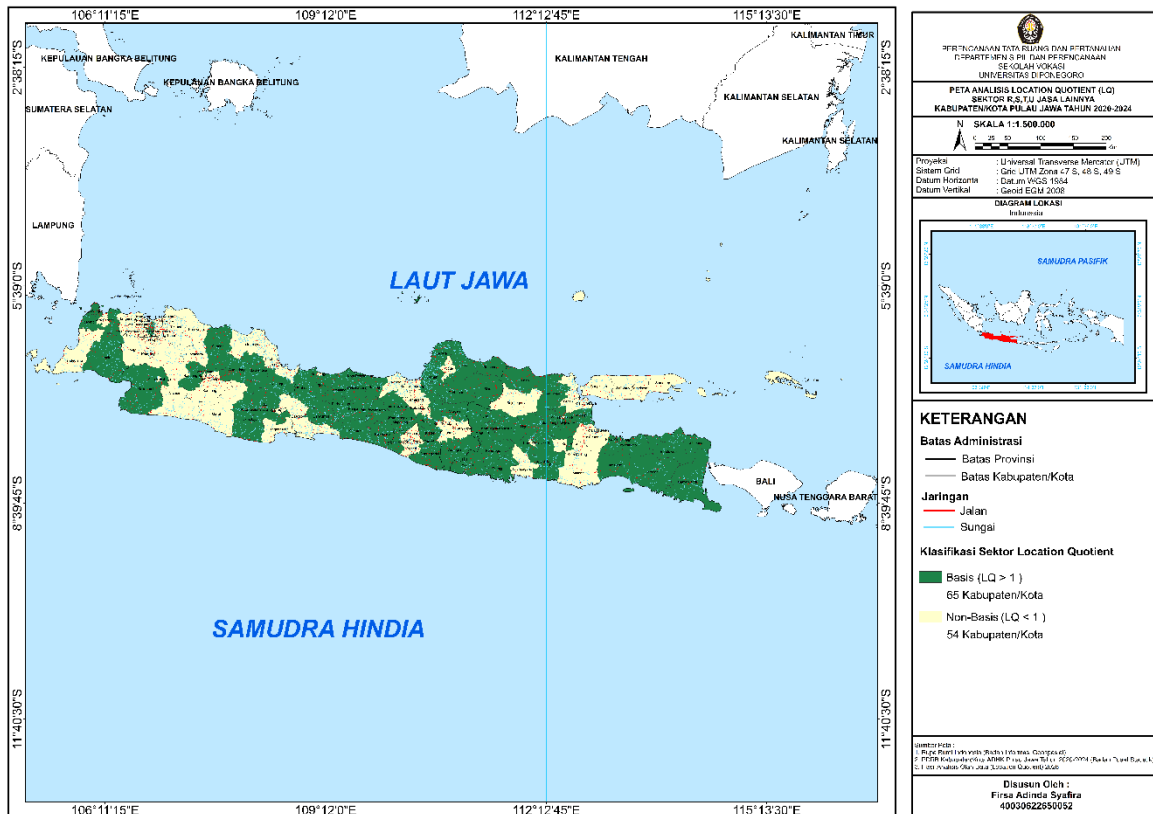
Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 48 Peta Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial**

Sektor Q terdapat 14 Kabupaten/Kota berstatus Sektor Unggulan, 20 Kabupaten/Kota berstatus Sektor Potensial, 42 Kabupaten/Kota berstatus Sektor Berkembang, dan 43 Kabupaten/Kota berstatus Sektor Tertinggal dari total 119 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor kesehatan di Pulau Jawa belum berkembang secara merata dan masih dipengaruhi oleh konsentrasi fasilitas pelayanan kesehatan pada wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan. Wilayah yang

berstatus unggulan umumnya memiliki rumah sakit rujukan, fasilitas kesehatan skala besar, serta dukungan tenaga medis dan sarana penunjang yang lebih lengkap dibandingkan wilayah lainnya. Jumlah wilayah yang cukup besar pada kategori berkembang dan tertinggal menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan spasial dalam penyediaan layanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan fasilitas, maupun kualitas pelayanan.

Sektor RSTU mencakup kegiatan seni budaya, hiburan, olahraga, kegiatan organisasi, serta kegiatan rumah tangga. Sektor ini berkembang di wilayah dengan tradisi budaya, dan destinasi wisata. Keberadaan sektor dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk, aktivitas sosial masyarakat, serta perkembangan kawasan wisata yang mampu mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi penunjang. Wilayah yang memiliki pusat kegiatan seni, destinasi wisata budaya, fasilitas hiburan, maupun event olahraga cenderung menunjukkan kontribusi sektor RSTU yang lebih besar dibandingkan wilayah lain.



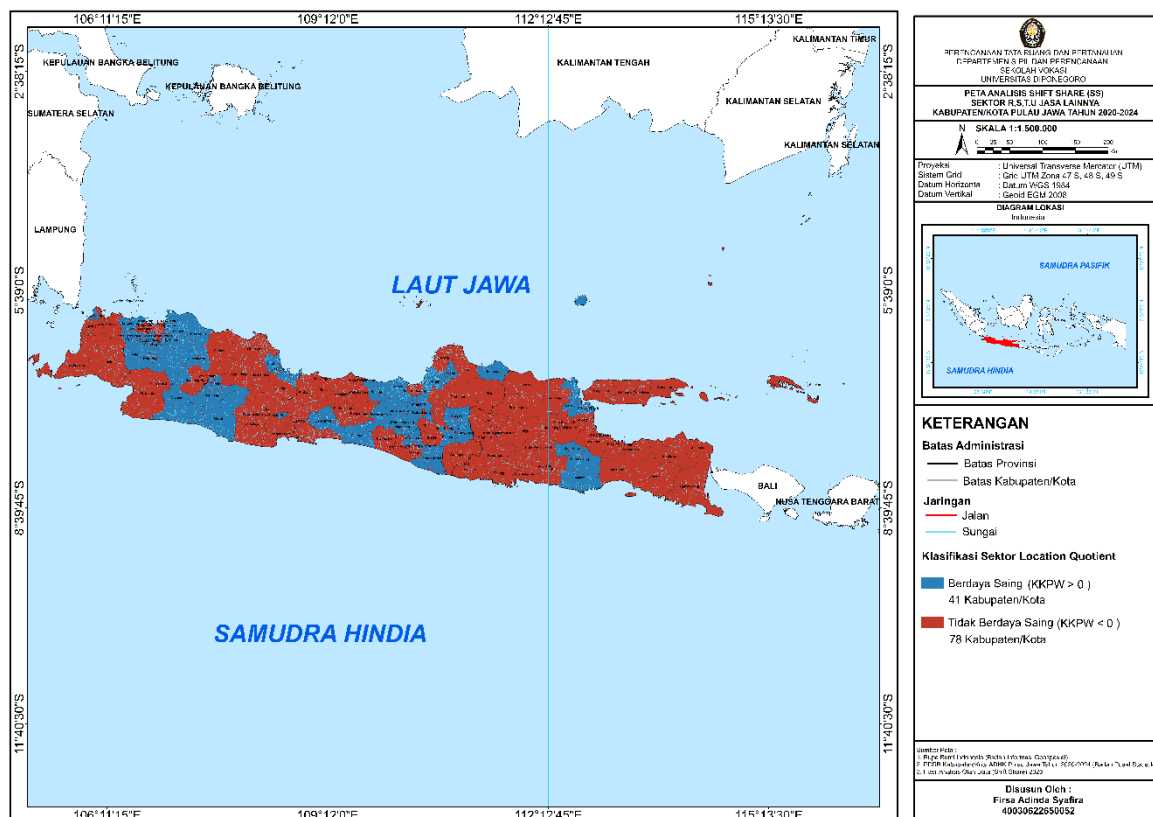
Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 49** Peta Analisis *Location Quotient* (LQ) Sektor R, S, T, U

Sektor R, S, T, U memiliki 65 kabupaten/kota berstatus sektor basis ( $LQ > 1$ ) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, menunjukkan sektor jasa lainnya di daerah tersebut dapat memenuhi kebutuhan lokal sekaligus memberikan layanan kepada wilayah lainnya. Sementara itu, 54 kabupaten/kota berstatus non-basis ( $LQ < 1$ ), menunjukkan bahwa sektor

jasa pendukung belum optimal pada kabupaten/kota tersebut. Nilai LQ tertinggi yaitu Kabupaten Sukabumi (LQ = 3,838), Kabupaten Subang (LQ = 3,527), Kabupaten Banyuwangi (LQ = 2,982), Kota Batu (LQ = 2,416), dan Kabupaten Sumedang (LQ = 2,381). Pola aglomerasi basis terbentuk di Purwomanggung, Barlingmascakeb, sebagian Wanarakuti, dan Tapal Kuda. Sebaliknya, nilai LQ terendah tercatat pada Kabupaten Bekasi (0,112), Kabupaten Karawang (0,151), Kota Banjar (0,231), Kabupaten Purwakarta (0,265), dan Kabupaten Bandung (0,267), mencerminkan minimnya kegiatan seni dan hiburan pada kawasan industri padat.

Daya saing sektor RSTU menunjukkan pertumbuhan industri hiburan, pariwisata budaya, dan kegiatan komunitas di suatu wilayah. Wilayah dengan pertumbuhan KPPW positif menunjukkan bahwa kegiatan seni, rekreasi, dan pariwisata tumbuh lebih cepat dari rata-rata Pulau Jawa, yang dapat didorong oleh pengembangan destinasi wisata baru, penguatan industri kreatif, maupun peningkatan pengeluaran masyarakat untuk hiburan.

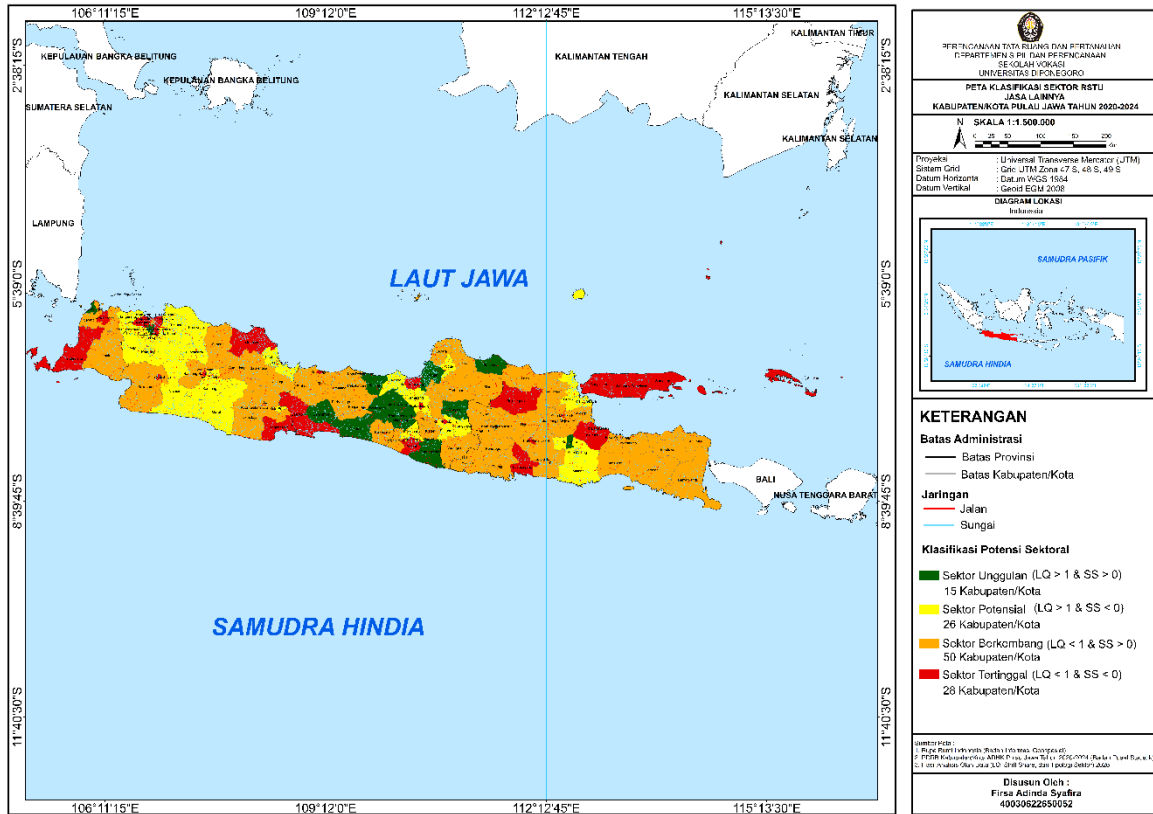


Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 50 Peta Analisis Shift Share KPPW Sektor R, S, T, U

Sektor R, S, T, U menunjukkan 41 kabupaten/kota berdaya saing (KPPW > 0) dari total 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, menunjukkan pertumbuhan sektor jasa lainnya lebih cepat dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sementara itu, 78

kabupaten/kota tidak berdaya saing ( $KKPW < 0$ ), menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dari rata-rata kabupaten/kota di Pulau Jawa. Nilai KPPW tertinggi yaitu Kota Cirebon ( $KPPW = 149,07$ ), Kabupaten Karawang ( $KPPW = 136,96$ ), Kabupaten Bogor ( $KPPW = 135,93$ ), Kota Surabaya ( $KPPW = 135,12$ ), dan Kota Batu ( $KPPW = 133,37$ ). Sebaliknya, nilai KPPW terendah tercatat pada Kota Jakarta Utara ( $-39,54$ ), Kota Jakarta Timur ( $-26,83$ ), Kota Jakarta Kepulauan Seribu ( $-23,57$ ), Kota Jakarta Barat ( $-19,03$ ), dan Kota Jakarta Pusat ( $-17,08$ ).



Sumber: Analisis Penulis, 2026

Gambar 4. 51 Peta Sektor R, S, T, U Jasa Lainnya

Peta Sektor RSTU menampilkan dominasi kuning sektor berkembang yang merata, mencerminkan bahwa aktivitas jasa sosial dan budaya. Sebagian besar wilayah sedang mengalami tekanan. Warna hijau sektor unggulan tersebar di kota-kota dengan ekosistem budaya yang kuat. Potensi pengembangan ekonomi kreatif dan industri budaya di berbagai wilayah dapat dioptimalkan melalui kebijakan yang mendukung ekosistem seni, budaya, dan hiburan lokal.

**Tabel 4. 5 Jumlah Tipologi Sektor Tersier P-RSTU**

| No. | Klasifikasi Tipologi             | Nilai LQ dan Nilai <i>ShiftShare</i>                  | Sektor P<br>Jasa Pendidikan | Sektor Q<br>Jasa Kesehatan dan<br>Kegiatan Sosial | Sektor R, S, T, U Jasa<br>Lainnya |
|-----|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1.  | Sektor Unggulan<br>(Hijau)       | LQ>1 (Basis) &<br>KPPW>0 (Berdaya<br>Saing)           | 20 Wilayah                  | 14 Wilayah  | 15 Wilayah                        |
| 2.  | Potensial                        | LQ>1 (Basis) &<br>KPPW<0 (Tidak<br>Berdaya Saing)     | 39 Wilayah                  | 20 Wilayah  | 26 Wilayah                        |
| 3.  | Sektor<br>Berkembang<br>(Oranye) | LQ<1 (Non-Basis)<br>& KPPW>0<br>(Berdaya Saing)       | 46 Wilayah                  | 42 Wilayah  | 50 Wilayah                        |
| 4.  | Sektor<br>Tertinggal<br>(Merah)  | LQ<1 (Non-Basis)<br>& KPPW<0 (Tidak<br>Berdaya Saing) | 14 Wilayah                  | 43 Wilayah  | 28 Wilayah                        |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Sektor Jasa Pendidikan menampilkan distribusi merata dengan 20 wilayah unggulan dan didominasi kategori berkembang sebanyak 46 wilayah. Wilayah dengan Sektor Pendidikan unggulan umumnya merupakan kota-kota dengan konsentrasi perguruan tinggi atau pusat pendidikan berkualitas, seperti Kota Jakarta Timur (LQ=1,127; KPPW=113,33), Kota Bandung (LQ=1,112; KPPW=95,49), Kota Cirebon (LQ=1,331; KPPW=101,24), serta berbagai kabupaten di Jawa Tengah seperti Kabupaten Rembang (LQ=1,343; KPPW=7,12), Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga yang memiliki tradisi kuat dalam layanan pendidikan. Tingginya kategori berkembang sebanyak 46 wilayah menunjukkan bahwa sektor pendidikan di banyak wilayah mengalami stagnasi, mencerminkan tren demografis penurunan angka kelahiran yang mengurangi jumlah siswa, pergeseran ke pendidikan digital, serta persaingan ketat dari kota-kota besar yang menarik siswa dari daerah. Hanya 14 wilayah yang tertinggal, mencerminkan bahwa pendidikan sebagai kebutuhan dasar tetap memiliki basis di hampir semua wilayah.

Sektor Jasa Kesehatan menunjukkan distribusi yang seimbang, yaitu 14 wilayah unggulan, 42 wilayah berkembang, 20 wilayah potensial, dan 43 wilayah tertinggal. Keseimbangan ini menunjukkan kualitas layanan kesehatan yang tinggi di Pulau Jawa, mulai dari fasilitas kesehatan modern berstandar internasional di kota besar hingga layanan puskesmas dasar di wilayah terpencil. Wilayah-wilayah unggulan pada sektor kesehatan antara lain Kota Magelang (LQ=3,178; KPPW=4,91) yang dikenal sebagai pusat layanan kesehatan regional, Kota Banjar, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki investasi layanan kesehatan yang signifikan. Tingginya kategori berkembang (42 wilayah) dan tertinggal (43 wilayah) mengindikasikan bahwa disparitas kualitas layanan kesehatan masih sangat tinggi dan menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan manusia di Pulau Jawa.

Sektor Jasa Lainnya mencakup kesenian, hiburan, rekreasi, kegiatan sosial, dan jasa perorangan menunjukkan dominasi kategori berkembang yang sangat tinggi, yaitu 50 wilayah dari 119. Hal ini menandakan bahwa meskipun banyak wilayah memiliki basis aktivitas budaya dan sosial yang kuat, pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding rata-rata Pulau Jawa. Kondisi ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat terhadap hiburan digital yang menggantikan kegiatan sosial konvensional. Hanya 15 wilayah yang berstatus unggulan, dengan konsentrasi di kota-kota yang memiliki industri kreatif dan pariwisata budaya yang kuat, seperti Kota Jakarta Selatan (LQ=1,390; KPPW=78,79), Kabupaten Magelang (LQ=1,569; KPPW=21,15), Kabupaten Kebumen (LQ=1,714; KPPW=5,12), Kabupaten Rembang (LQ=1,357; KPPW=16,56), dan Kabupaten Batang. Sebanyak 26 wilayah potensial dan 28 wilayah tertinggal melengkapi gambaran bahwa sektor ini masih dalam proses mencari format yang relevan di era ekonomi digital.

Analisis sektor tersier kelompok ketiga (Sektor P, Q, RSTU) menunjukkan bahwa sektor-sektor layanan, pendidikan, kesehatan, dan jasa sosial sedang menghadapi penurunan pada sebagian besar wilayah. Transformasi model layanan pada era digital belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka pertumbuhan sektoral yang terukur.

#### 4.2 Karakteristik dan Tipologi Ekonomi Pulau Jawa

Berdasarkan hasil pengolahan *Location Quotient* (LQ) rata-rata periode 2020–2024 dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPPW) tahun 2019 dan 2024 pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, diperoleh pola spasial yang menunjukkan adanya polaritas struktur ekonomi regional. Berikut merupakan kode sektor PDRB yang digunakan dalam hasil perhitungan penelitian ini, yang terdiri atas 17 lapangan usaha sesuai klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kode sektor tersebut digunakan untuk mempermudah proses pengolahan data, analisis kuantitatif, serta penyajian hasil identifikasi sektor unggulan pada kabupaten/kota di Pulau Jawa.

|   |
|---|
| Kode Sektor   |
| Sektor A: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           |
| Sektor B: Pertambangan dan Pengalihan                                   |
| Sektor C: Industri Pengolahan   |
| Sektor D: Pengadaan Listrik dan Gas                                     |
| Sektor E: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      |
| Sektor F: Konstruksi  |
| Sektor G: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |
| Sektor H: Transportasi dan Pergudangan                                  |

|  |
|--|
| Sektor I: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           |
| Sektor J: Informasi dan Komunikasi                                       |
| Sektor K: Jasa Keuangan dan Asuransi                                     |
| Sektor L: Real Estate  |
| Sektor M & N: Jasa Perusahaan  |
| Sektor O: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib |
| Sektor P: Jasa Pendidikan  |
| Sektor Q: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             |
| Sektor R, S, T, & U: Jasa Lainnya  |

#### 4.2.1 Klasifikasi Ekonomi Sektor Unggulan

Klasifikasi ekonomi sektor unggulan berbasis daya saing dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memiliki sektor ekonomi berstatus basis ( $LQ > 1$ ) dan berdaya saing kompetitif ( $KPPW > 0$ ). Kombinasi kedua indikator menempati sektor unggulan, yang menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak hanya memiliki kontribusi dominan terhadap struktur ekonomi daerah, tetapi juga tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pada wilayah referensi kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sektor unggulan berperan sebagai penggerak perekonomian wilayah dan memiliki potensi dalam mendorong aktivitas ekonomi antardaerah. Berdasarkan hasil pengolahan data *Location Quotient* (LQ) rata-rata 2020–2024 dan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPPW) Tahun 2020 dan 2024 dari 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa, terdapat pola spasial yang menunjukkan polaritas struktural ekonomi Jawa, yaitu wilayah metropolitan dengan keunggulan sektor jasa dan teknologi, serta wilayah perdesaan dan pesisir dengan sektor pertanian dan sumber daya alam.

Hasil Analisis Wilayah Sektor Unggulan Berbasis Daya Saing menunjukkan setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki spesialisasi sektor ekonomi yang berbeda. Sektor unggulan ditentukan berdasarkan nilai  $LQ > 1$  dan  $KPPW > 0$ , sehingga sektor tersebut tergolong sektor basis sekaligus memiliki pertumbuhan kompetitif. Hasil perhitungan lengkap dapat dilihat pada **Lampiran 7. Hasil Perhitungan Wilayah Sektor Unggulan.**

**Tabel 4. 6 Perhitungan Ekonomi Provinsi Sektor Unggulan**

| Provinsi    | Jumlah Kab/Kota | Jumlah Sektor Unggulan | Rata-Rata LQ (Avg 2020–2024) | Rata-Rata KPPW (KKPC) |
|-------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DKI Jakarta | 6               | 15                     | 8.412                        | 53.60                 |
| Jawa Barat  | 17              | 39                     | 2.014                        | 61.50                 |
| Banten      | 8               | 35                     | 1.864                        | 5.80                  |
| Jawa Tengah | 34              | 131                    | 1.441                        | 3.86                  |

| Provinsi                   | Jumlah Kab/Kota | Jumlah Sektor Unggulan | Rata-Rata LQ (Avg 2020–2024) | Rata-Rata KPPW (KKPC) |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 5               | 17                     | 1.459                        | 5.36                  |
| Jawa Timur                 | 21              | 47                     | 1.900                        | 72.51                 |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis ekonomi sektor unggulan berbasis daya saing pada tingkat provinsi, menunjukkan perbedaan karakteristik ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah sektor unggulan terbanyak, yaitu 131 sektor dari 34 kabupaten/kota. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah sektor unggulan paling sedikit, yaitu 15 sektor, tetapi padanilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) tertinggi sebesar 8,412 menunjukkan tingkat spesialisasi sektor paling tinggi. Daya saing ekonomi, Provinsi Jawa Timur memiliki nilai rata-rata KPPW tertinggi sebesar 72,51. Provinsi Jawa Barat dan Banten menunjukkan jumlah sektor unggulan tinggi, sebanyak 39 dan 35 sektor. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 17 sektor unggulan dengan nilai rata-rata LQ sejumlah 1,459 dan KPPW sebesar 5,36. Nilai  $LQ > 1$  dan  $KPPW > 0$  menunjukkan sektor basis yang memiliki daya saing, sehingga berkontribusi dominan terhadap perekonomian daerah dan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah acuan.

Provinsi DKI Jakarta memiliki dominasi sektor jasa. Keunggulan utama mencakup Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A,  $LQ=104,804$ ;  $KPPW=11,92$ ) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jasa Keuangan dan Asuransi (K,  $LQ=2,120$ ;  $KPPW=25,45$ ) serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O,  $LQ=1,621$ ;  $KPPW=37,80$ ) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, Transportasi dan Pergudangan (H,  $LQ=1,245$ ;  $KPPW=58,10$ ) pada Kota Administrasi Jakarta Utara, Informasi dan Komunikasi (J,  $LQ=1,154$ ;  $KPPW=241,51$ ) pada Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Jasa Pendidikan (P,  $LQ=1,127$ ;  $KPPW=113,33$ ) pada Kota Administrasi Jakarta Timur. Struktur tersebut menegaskan peran DKI Jakarta sebagai pusat jasa nasional.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan pemusatan pada industri manufaktur, perdagangan, dan jasa perkotaan. Sektor unggulan meliputi Industri Pengolahan (C,  $LQ=5,261$ ;  $KPPW=25,34$ ) pada Kabupaten Bekasi, Industri Pengolahan (C,  $LQ=3,675$ ;  $KPPW=28,52$ ) pada Kabupaten Karawang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G,  $LQ=6,170$ ;  $KPPW=32,79$ ) serta Informasi dan Komunikasi (J,  $LQ=4,850$ ;  $KPPW=106,20$ ) pada Kota Bandung, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G,  $LQ=7,160$ ;  $KPPW=24,68$ ) serta Transportasi dan Pergudangan

(H, LQ=2,187; KPPW=125,63) pada Kota Cirebon, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=2,748; KPPW=81,62) pada Kabupaten Cianjur. Pola tersebut memperlihatkan Jawa Barat sebagai pusat industri nasional.

Provinsi Jawa Tengah memiliki keragaman sektor unggulan antara sektor primer dan jasa. Keunggulan tampak pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=2,356; KPPW=3,39) pada Kabupaten Wonosobo, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=2,068; KPPW=3,64) pada Kabupaten Grobogan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G, LQ=1,571; KPPW=4,58) pada Kabupaten Temanggung, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=1,513; KPPW=31,62) pada Kota Surakarta, serta Real Estate (L, LQ=1,608; KPPW=2,34) dan Jasa Perusahaan (M dan N, LQ=1,641; KPPW=3,03) pada Kota Semarang. Kondisi tersebut mencerminkan keseimbangan antara sektor agraris dan jasa perkotaan.

Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan konsentrasi sektor jasa, konstruksi, serta sektor primer tertentu. Keunggulan mencakup Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=2,528; KPPW=0,25) serta Pertambangan dan Penggalian (B, LQ=2,522; KPPW=6,54) pada Kabupaten Gunungkidul, Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=2,256; KPPW=40,84) pada Kabupaten Kulon Progo, Konstruksi (F, LQ=1,187; KPPW=9,21) pada Kabupaten Sleman, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q, LQ=1,500; KPPW=1,09) pada Kota Yogyakarta. Struktur tersebut menunjukkan ekonomi berbasis jasa pendidikan, pariwisata, dan pengembangan kawasan perkotaan.

Provinsi Jawa Timur memiliki kekuatan besar pada industri, pertambangan, dan jasa metropolitan. Sektor unggulan meliputi Industri Pengolahan (C, LQ=3,822; KPPW=53,86) pada Kabupaten Sidoarjo, Industri Pengolahan (C, LQ=3,437; KPPW=57,04), Pengadaan Listrik dan Gas (D, LQ=8,883; KPPW=114,85), serta Jasa Perusahaan (M dan N, LQ=2,353; KPPW=122,38) pada Kabupaten Gresik, Pertambangan dan Penggalian (B, LQ=3,545; KPPW=65,28) pada Kabupaten Bojonegoro, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=1,831; KPPW=117,08) dan Jasa Perusahaan (M dan N, LQ=1,153; KPPW=121,08) pada Kota Surabaya, serta Jasa Lainnya (R, S, T, dan U, LQ=2,416; KPPW=133,37) pada Kota Batu. Kondisi tersebut menunjukkan Jawa Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.

Provinsi Banten menunjukkan berbagai jenis ekonomi antara wilayah selatan berbasis primer dan wilayah utara berbasis industri jasa. Keunggulan utama berupa Pertambangan dan Penggalian (B, LQ=5,979; KPPW=3,50) pada Kabupaten Pandeglang, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=2,504; KPPW=2,34) pada Kabupaten Lebak,

Jasa Perusahaan (M dan N, LQ=3,115; KPPW=2,67) pada Kabupaten Tangerang, Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=4,501; KPPW=41,26) pada Kota Tangerang, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O, LQ=2,593; KPPW=11,48) pada Kota Tangerang Selatan. Struktur ekonomi menunjukkan peran Banten sebagai kawasan industri dan penyangga metropolitan Jabodetabek.

#### 4.2.2 Klasifikasi Ekonomi Sektor Potensial

Klasifikasi ekonomi sektor potensial kabupaten/kota memiliki sektor basis ( $LQ > 1$ ) namun menunjukkan daya saing yang melemah ( $KPPW < 0$ ). Kondisi ini menempatkan sektor-sektor tersebut pada sektor potensial, masih menjadi unggulan komparatif dalam struktur ekonomi lokal, tetapi pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah lain. Hasil analisis pada sektor potensial menunjukkan pola yang berbeda dibanding tabel sebelumnya. Pada data ini, sektor memiliki  $LQ > 1$ , tetapi KPPW bernilai negatif atau mendekati nol. Artinya, sektor potensial tergolong sektor basis, namun belum menunjukkan daya saing yang kuat atau sedang mengalami pelemahan relatif dibanding wilayah pembanding, Hasil perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 8. Hasil Perhitungan Wilayah Sektor Potensial.**

**Tabel 4. 7 Perhitungan Ekonomi Provinsi Sektor Potensial**

| Provinsi                   | Jumlah Kab/Kota | Jumlah Sektor Potensial | Rata-Rata LQ (Avg 2020–2024) | Rata-Rata KPPW (KKPC) |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DKI Jakarta                | 6               | 22                      | 26.936                       | -19.93                |
| Jawa Barat                 | 25              | 128                     | 2.181                        | -8.04                 |
| Banten                     | 8               | 26                      | 2.114                        | -5.56                 |
| Jawa Tengah                | 34              | 168                     | 1.500                        | -4.35                 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 5               | 20                      | 1.378                        | -2.51                 |
| Jawa Timur                 | 38              | 200                     | 1.841                        | -8.04                 |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis ekonomi sektor potensial pada tingkat provinsi, menunjukkan perbedaan ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sektor potensial terbanyak, yaitu 200 sektor dari 38 kabupaten/kota. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah sektor potensial paling sedikit, yaitu 22 sektor, tetapi memiliki nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) tertinggi sebesar 26,936 menunjukkan tingkat spesialisasi sektor paling tinggi. Daya saing ekonomi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai rata-rata KPPW tertinggi sebesar -2,51. Provinsi Jawa Tengah

terdapat 168 sektor dan Jawa Barat sejumlah 128 sektor. Provinsi Banten memiliki 26 sektor potensial dengan nilai rata-rata LQ 2,114 dan KPPW sebesar -5,56. Nilai  $LQ > 1$  dan  $KPPW < 0$  menunjukkan sektor basis belum memiliki daya saing. Nilai KPPW negatif menunjukkan pertumbuhan sektor lebih lambat dibandingkan wilayah acuan.

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan sektor basis yang belum berdaya saing pada beberapa wilayah kota administrasi. Kota Administrasi Jakarta Pusat memiliki Pengadaan Listrik dan Gas (D,  $LQ=1,005$ ;  $KPPW=-2,84$ ), Jasa Perusahaan (M dan N,  $LQ=1,175$ ;  $KPPW=-6,40$ ), Jasa Pendidikan (P,  $LQ=1,118$ ;  $KPPW=-7,54$ ), dan Jasa Lainnya (R, S, T, dan U,  $LQ=1,058$ ;  $KPPW=-17,08$ ). Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki Konstruksi (F,  $LQ=1,366$ ;  $KPPW=-19,00$ ) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G,  $LQ=1,106$ ;  $KPPW=-3,47$ ). Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Jasa Keuangan dan Asuransi (K,  $LQ=1,284$ ;  $KPPW=-16,52$ ), Real Estate (L,  $LQ=1,373$ ;  $KPPW=-36,07$ ), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O,  $LQ=1,494$ ;  $KPPW=-27,20$ ), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q,  $LQ=1,057$ ;  $KPPW=-12,20$ ). Kota Administrasi Jakarta Timur masih memiliki Industri Pengolahan (C,  $LQ=2,386$ ;  $KPPW=-1,30$ ), Pengadaan Listrik dan Gas (D,  $LQ=1,294$ ;  $KPPW=-40,47$ ), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E,  $LQ=1,619$ ;  $KPPW=-34,09$ ), Transportasi dan Pergudangan (H,  $LQ=1,737$ ;  $KPPW=-47,60$ ), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I,  $LQ=1,049$ ;  $KPPW=-46,83$ ), serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q,  $LQ=1,469$ ;  $KPPW=-42,68$ ). Kondisi ini menunjukkan basis ekonomi DKI Jakarta masih kuat, tetapi sebagian sektor mengalami tekanan daya saing.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan banyak sektor basis dengan daya saing negatif. Kabupaten Bogor memiliki Pengadaan Listrik dan Gas (D,  $LQ=1,471$ ;  $KPPW=-0,31$ ), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E,  $LQ=4,228$ ;  $KPPW=-0,35$ ), Jasa Keuangan dan Asuransi (K,  $LQ=1,640$ ;  $KPPW=-3,26$ ), Jasa Perusahaan (M dan N,  $LQ=1,378$ ;  $KPPW=-0,49$ ), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q,  $LQ=1,665$ ;  $KPPW=-0,46$ ). Kota Bandung memiliki Jasa Keuangan dan Asuransi (K,  $LQ=1,797$ ;  $KPPW=-3,25$ ), Jasa Perusahaan (M dan N,  $LQ=2,515$ ;  $KPPW=-0,43$ ), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q,  $LQ=2,204$ ;  $KPPW=-0,37$ ). Kabupaten Garut memperlihatkan Pertambangan dan Penggalan (B,  $LQ=8,457$ ;  $KPPW=-8,35$ ), Real Estate (L,  $LQ=2,650$ ;  $KPPW=-0,98$ ), Jasa Perusahaan (M dan N,  $LQ=1,668$ ;  $KPPW=-0,46$ ), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q,  $LQ=1,109$ ;  $KPPW=-0,35$ ). Kota Bekasi memiliki Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A,  $LQ=2,365$ ;  $KPPW=-31,80$ ), Pengadaan Listrik dan Gas (D,  $LQ=5,807$ ;  $KPPW=-0,39$ ), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

(E, LQ=1,889; KPPW=-0,48), Jasa Perusahaan (M dan N, LQ=1,802; KPPW=-0,48), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q, LQ=2,473; KPPW=-0,40). Pola ini menunjukkan Jawa Barat memiliki sektor basis yang besar, tetapi sebagian belum mampu mempertahankan keunggulan kompetitif.

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sektor basis yang relatif tersebar, namun dengan KPPW negatif. Kabupaten Cilacap memiliki Industri Pengolahan (C, LQ=1,943; KPPW=-2,50). Kabupaten Banyumas memiliki Konstruksi (F, LQ=1,218; KPPW=-1,26), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=1,060; KPPW=-1,16), Informasi dan Komunikasi (J, LQ=1,292; KPPW=-1,21), dan Jasa Keuangan dan Asuransi (K, LQ=1,054; KPPW=-1,21). Kabupaten Kebumen memiliki Pertambangan dan Penggalan (B, LQ=1,929; KPPW=-0,74), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G, LQ=1,128; KPPW=-2,02), Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=1,429; KPPW=-16,26), Jasa Pendidikan (P, LQ=2,235; KPPW=-1,51), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q, LQ=1,389; KPPW=-0,10). Kota Semarang memiliki Konstruksi (F, LQ=2,323; KPPW=-1,41), Informasi dan Komunikasi (J, LQ=2,162; KPPW=-1,71), Jasa Keuangan dan Asuransi (K, LQ=1,371; KPPW=-2,19), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O, LQ=1,100; KPPW=-0,19). Kondisi tersebut menunjukkan sektor basis di Jawa Tengah, tetapi belum cukup kuat untuk pertumbuhan ekonomi daya saing.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sektor basis yang cenderung menguat pada jasa dan pertambangan, tetapi tetap negatif secara kompetitif. Kabupaten Kulon Progo memiliki Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=1,711; KPPW=-1,34), Pertambangan dan Penggalan (B, LQ=3,012; KPPW=-1,73), Konstruksi (F, LQ=1,632; KPPW=-11,67), dan Jasa Lainnya (R, S, T, dan U, LQ=1,274; KPPW=-11,22). Kabupaten Bantul memiliki Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=1,368; KPPW=-2,03), Pengadaan Listrik dan Gas (D, LQ=1,041; KPPW=-1,14), Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=1,009; KPPW=-3,64), dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=1,201; KPPW=-1,51). Kota Yogyakarta memiliki Pengadaan Listrik dan Gas (D, LQ=1,496; KPPW=-1,40), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E, LQ=1,409; KPPW=-2,33), Informasi dan Komunikasi (J, LQ=1,252; KPPW=-3,38), Jasa Keuangan dan Asuransi (K, LQ=1,657; KPPW=-3,23), Real Estate (L, LQ=1,270; KPPW=-0,04), dan Jasa Pendidikan (P, LQ=1,120; KPPW=-0,61). Sektor basis DIY seimbang, tetapi belum menghasilkan keunggulan pertumbuhan yang kuat.

Provinsi Jawa Timur memperlihatkan basis ekonomi yang beragam, hampir seluruhnya berada pada KPPW negatif. Kabupaten Pacitan memiliki Pertambangan dan Penggalan (B, LQ=2,048; KPPW=-6,65), Industri Pengolahan (C, LQ=2,135; KPPW=-66,43), Informasi dan Komunikasi (J, LQ=3,447; KPPW=-11,02), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O, LQ=1,098; KPPW=-1,25), Jasa Pendidikan (P, LQ=1,243; KPPW=-2,29), dan Jasa Lainnya (R, S, T, dan U, LQ=1,001; KPPW=-1,20). Kabupaten Trenggalek memiliki Pertambangan dan Penggalan (B, LQ=2,552; KPPW=-6,68), Konstruksi (F, LQ=3,458; KPPW=-35,01), Informasi dan Komunikasi (J, LQ=1,401; KPPW=-10,97), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O, LQ=1,243; KPPW=-1,22), dan Jasa Pendidikan (P, LQ=1,355; KPPW=-2,25). Kabupaten Sidoarjo memiliki Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E, LQ=2,950; KPPW=-0,05), Jasa Perusahaan (M dan N, LQ=2,564; KPPW=-3,62), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q, LQ=3,019; KPPW=-1,04), dan Jasa Lainnya (R, S, T, dan U, LQ=1,698; KPPW=-1,28). Kota Surabaya memiliki Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=3,663; KPPW=-53,06), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E, LQ=8,715; KPPW=-0,09), dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G, LQ=8,294; KPPW=-0,07). Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki sektor basis yang kuat, tetapi daya saing relatifnya melemah.

Provinsi Banten menunjukkan sektor basis pada pertanian, pertambangan, industri, dan jasa, tetapi dengan KPPW negatif. Kabupaten Pandeglang memiliki Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A, LQ=2,862; KPPW=-1,55), Jasa Keuangan dan Asuransi (K, LQ=1,627; KPPW=-2,50), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O, LQ=1,224; KPPW=-11,72), dan Jasa Pendidikan (P, LQ=2,721; KPPW=-4,82). Kabupaten Lebak memiliki Pertambangan dan Penggalan (B, LQ=4,563; KPPW=-7,49), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=1,323; KPPW=-0,40), Jasa Keuangan dan Asuransi (K, LQ=1,355; KPPW=-4,68), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O, LQ=1,181; KPPW=-3,43), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q, LQ=1,130; KPPW=-3,12), dan Jasa Lainnya (R, S, T, dan U, LQ=2,103; KPPW=-4,96). Kota Tangerang memiliki Industri Pengolahan (C, LQ=2,251; KPPW=-7,96), Konstruksi (F, LQ=1,623; KPPW=-6,77), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G, LQ=2,186; KPPW=-3,10), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=1,334; KPPW=-10,11), Informasi dan Komunikasi (J, LQ=1,068; KPPW=-4,11), dan Real Estate (L, LQ=1,790; KPPW=-4,29). Kota Serang memiliki Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G, LQ=5,619; KPPW=-2,35), Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=2,242; KPPW=-36,49), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=6,573; KPPW=-0,46), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O, LQ=1,466; KPPW=-1,16).

#### 4.2.3 Klasifikasi Ekonomi Sektor Berkembang

Wilayah prospektif berkembang merupakan kabupaten/kota yang memiliki sektor dengan daya saing kompetitif positif ( $KPPW > 0$ ) namun tidak basis ( $LQ < 1$ ). Sektor berkembang tumbuh progresif dan berdaya saing, tetapi kontribusinya dalam struktur ekonomi lokal rendah dibandingkan rata-rata wilayah referensi. Kondisi ini menandakan adanya potensi yang belum optimal dan dapat menjadi peluang strategis apabila didukung kebijakan yang tepat. Hasil Analisis Wilayah Sektor Potensial Berbasis Daya Saing menunjukkan setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki sektor ekonomi dengan  $KPPW > 0$ , namun nilai  $LQ < 1$ . Kondisi tersebut menandakan sektor belum menjadi sektor basis, tetapi memiliki pertumbuhan kompetitif sehingga berpotensi berkembang menjadi sektor unggulan pada masa mendatang apabila didukung kebijakan pembangunan yang tepat, Hasil perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 9. Hasil Perhitungan Wilayah Sektor Berkembang.**

**Tabel 4. 8 Perhitungan Ekonomi Provinsi Sektor Berkembang**

| Provinsi                   | Jumlah Kab/Kota | Jumlah Sektor Berkembang | Rata-Rata LQ (Avg 2020–2024) | Rata-Rata KPPW (KKPC) |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DKI Jakarta                | 6               | 32                       | 0.615                        | 537.88                |
| Jawa Barat                 | 27              | 201                      | 0.422                        | 88.24                 |
| Banten                     | 8               | 31                       | 0.472                        | 6.95                  |
| Jawa Tengah                | 35              | 166                      | 0.685                        | 6.63                  |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 5               | 28                       | 0.720                        | 1.71                  |
| Jawa Timur                 | 36              | 182                      | 0.429                        | 84.27                 |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis Ekonomi sektor berkembang, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah sektor berkembang terbanyak, yaitu 201 sektor dari 27 kabupaten/kota. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah sektor berkembang paling sedikit, yaitu 28 sektor, dan memiliki nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) tertinggi sebesar 0,720. Daya saing ekonomi pada Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai rata-rata KPPW tertinggi sejumlah 537,88. Provinsi Jawa Timur memiliki 182 jumlah sektor berkembang, dan Jawa Tengah menunjukkan 166 sektor berkembang. Provinsi Banten memiliki 31 sektor

berkembang dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,472 dan KPPW sebesar 6,95. Nilai  $LQ < 1$  dan  $KPPW > 0$  menunjukkan sektor non-basis memiliki daya saing, sehingga pertumbuhan sektor lebih cepat dibandingkan wilayah acuan, tetapi kontribusi terhadap perekonomian daerah relatif kecil.

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan potensi kuat pada sektor utilitas dan jasa pendukung. Sektor potensial meliputi Pengadaan Listrik dan Gas (D,  $LQ=0,227$ ;  $KPPW=63,99$ ), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E,  $LQ=0,960$ ;  $KPPW=53,03$ ), Transportasi dan Pergudangan (H,  $LQ=0,114$ ;  $KPPW=43,24$ ) pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Transportasi dan Pergudangan (H,  $LQ=0,561$ ;  $KPPW=61,62$ ) pada Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta Konstruksi (F,  $LQ=0,754$ ;  $KPPW=15985,02$ ) pada Kota Administrasi Jakarta Timur. Kondisi tersebut menunjukkan ekonomi perkotaan masih besar pada sektor infrastruktur dan layanan publik.

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi terbesar pada sektor jasa perkotaan, transportasi, dan ekonomi penunjang kawasan industri. Sektor potensial adalah Transportasi dan Pergudangan (H,  $LQ=0,350$ ;  $KPPW=114,41$ ), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I,  $LQ=0,339$ ;  $KPPW=135,34$ ) pada Kabupaten Bogor, Transportasi dan Pergudangan (H,  $LQ=0,735$ ;  $KPPW=129,30$ ) pada Kabupaten Kuningan, Real Estate (L,  $LQ=0,127$ ;  $KPPW=142,07$ ) pada Kabupaten Bekasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q,  $LQ=0,357$ ;  $KPPW=141,91$ ) pada Kota Bandung, serta Jasa Lainnya (R, S, T, dan U,  $LQ=0,557$ ;  $KPPW=149,07$ ) pada Kota Cirebon. Potensi sektor berkembang tersebut menandakan Jawa Barat masih memiliki peluang besar pada sektor jasa pendukung urbanisasi dan industrialisasi.

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan potensi perkembangan pada sektor konstruksi, transportasi, dan jasa lokal. Sektor potensial mencakup Konstruksi (F,  $LQ=0,690$ ;  $KPPW=39,30$ ) pada Kabupaten Klaten, Pertambangan dan Penggalan (B,  $LQ=0,622$ ;  $KPPW=40,69$ ) pada Kabupaten Grobogan, Konstruksi (F,  $LQ=0,663$ ;  $KPPW=57,72$ ) pada Kabupaten Batang, Transportasi dan Pergudangan (H,  $LQ=0,536$ ;  $KPPW=72,65$ ) pada Kota Surakarta, serta Transportasi dan Pergudangan (H,  $LQ=0,990$ ;  $KPPW=27,50$ ) pada Kota Semarang. Kondisi tersebut menunjukkan penguatan ekonomi Jawa Tengah bergeser menuju sektor jasa dan konektivitas wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi ekonomi pada sektor jasa dan pembangunan kawasan. Sektor potensial berupa Industri Pengolahan (C,  $LQ=0,932$ ;  $KPPW=1,24$ ) pada Kabupaten Kulon Progo, Konstruksi (F,  $LQ=0,920$ ;  $KPPW=2,28$ ) pada Kabupaten Bantul, Informasi dan Komunikasi (J,  $LQ=0,894$ ;  $KPPW=4,89$ ) pada Kabupaten

Gunungkidul, Informasi dan Komunikasi (J, LQ=0,996; KPPW=1,11) pada Kabupaten Sleman, serta Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=0,783; KPPW=1,75) pada Kota Yogyakarta. Kondisi ini menunjukkan DIY berpotensi memperkuat ekonomi berbasis jasa, teknologi, dan mobilitas perkotaan.

Provinsi Jawa Timur menunjukkan potensi sangat besar pada sektor infrastruktur, transportasi, jasa perkotaan, dan ekonomi digital. Sektor potensial utama meliputi Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=0,732; KPPW=191,40) serta Pengadaan Listrik dan Gas (D, LQ=0,852; KPPW=160,29) pada Kabupaten Sidoarjo, Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=0,227; KPPW=151,09) pada Kota Malang, Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=0,781; KPPW=142,30) pada Kota Madiun, Transportasi dan Pergudangan (H, LQ=0,723; KPPW=135,08) pada Kota Surabaya, serta Informasi dan Komunikasi (J, LQ=0,348; KPPW=124,62) pada Kabupaten Tuban. Kondisi tersebut menandakan Jawa Timur memiliki percepatan pada sektor pendukung metropolitan dan logistik regional.

Provinsi Banten menunjukkan potensi pertumbuhan pada sektor industri, energi, dan jasa perkotaan. Sektor potensial terdiri atas Pertambangan dan Penggalian (B, LQ=0,670; KPPW=19,31) pada Kabupaten Tangerang, Pertambangan dan Penggalian (B, LQ=0,406; KPPW=19,52) pada Kota Cilegon, Pengadaan Listrik dan Gas (D, LQ=0,083; KPPW=17,02) pada Kota Serang, serta Pengadaan Listrik dan Gas (D, LQ=0,447; KPPW=18,22) pada Kota Tangerang Selatan. Struktur tersebut menunjukkan Banten berpotensi memperkuat fungsi sebagai kawasan industri dan penyangga metropolitan Jabodetabek.

Secara keseluruhan, pola sektor potensial Pulau Jawa menunjukkan dominasi sektor jasa, transportasi, konstruksi, utilitas, dan ekonomi digital sebagai sektor yang tumbuh dengan cepat meskipun tidak basis. Kondisi ini menjadi petunjuk bahwa transformasi ekonomi Pulau Jawa bergerak menuju struktur ekonomi perkotaan, sehingga kebijakan pembangunan perlu diarahkan untuk mempercepat konversi sektor potensial menjadi sektor unggulan.

#### **4.2.4 Klasifikasi Ekonomi Sektor Tertinggal**

Karakteristik ekonomi tertinggal pada kabupaten/kota di Pulau Jawa memiliki sektor non-basis ( $LQ < 1$ ) dan tidak berdaya saing ( $KPPW < 0$ ). Kombinasi ini menempatkan pada sektor tertinggal dalam analisis *shift share* tidak memiliki keunggulan komparatif di tingkat lokal dan pertumbuhannya lambat dibandingkan rata-rata wilayah referensi. Sektor-sektor pada kategori ini memerlukan perhatian kebijakan yang intensif. Hasil Analisis Karakteristik

Wilayah Tertinggal menunjukkan bahwa setiap provinsi di Pulau Jawa masih memiliki kabupaten/kota dengan sektor ekonomi berstatus nonbasis ( $LQ < 1$ ) dan tidak kompetitif ( $KPPW < 0$ ). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor belum mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah serta mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibanding wilayah acuan. Hasil perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 10. Hasil Perhitungan Wilayah Sektor Tertinggal.**

**Tabel 4. 9 Perhitungan Ekonomi Provinsi Sektor Tertinggal**

| Provinsi                   | Jumlah Kab/Kota | Jumlah Sektor Tertinggal | Rata-Rata LQ (Avg 2020–2024) | Rata-Rata KPPW (KKPC) |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| DKI Jakarta                | 6               | 33                       | 0.484                        | -11.48                |
| Jawa Barat                 | 25              | 91                       | 0.493                        | 0.94                  |
| Banten                     | 8               | 44                       | 0.532                        | -5.74                 |
| Jawa Tengah                | 33              | 130                      | 0.672                        | -5.13                 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 5               | 20                       | 0.715                        | -3.57                 |
| Jawa Timur                 | 35              | 217                      | 0.591                        | -2.40                 |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Berdasarkan hasil analisis ekonomi sektor tertinggal pada tingkat provinsi, menunjukkan perbedaan karakteristik ekonomi antarprovinsi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sektor tertinggal terbanyak, yaitu 217 sektor. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah sektor tertinggal paling sedikit, yaitu 20 sektor. Nilai rata-rata *Location Quotient* (LQ) tertinggi terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,715, nilai rata-rata KPPW tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,94. Nilai  $LQ < 1$  dan  $KPPW < 0$  menunjukkan sektor non-basis yang belum memiliki daya saing, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih rendah dan pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan wilayah acuan.

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan sektor tertinggal yang umumnya terdapat pada kawasan administratif dengan keterbatasan fungsi ekonomi tertentu. Adm. Kepulauan Seribu memiliki kelemahan pada Konstruksi (F,  $LQ=0,256$ ;  $KPPW=-18,41$ ), Perdagangan (G,  $LQ=0,375$ ;  $KPPW=-6,33$ ), serta Informasi dan Komunikasi (J,  $LQ=0,100$ ;  $KPPW=-37,92$ ). Jakarta Pusat masih menunjukkan sektor lemah pada Industri Pengolahan (C,  $LQ=0,072$ ;  $KPPW=-17,93$ ) dan Konstruksi (F,  $LQ=0,781$ ;  $KPPW=-19,81$ ). Jakarta Timur memiliki ketertinggalan pada Jasa Keuangan (K,  $LQ=0,261$ ;  $KPPW=-67,70$ ). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun DKI Jakarta merupakan pusat ekonomi nasional, masih terdapat ketimpangan sektoral antarwilayah administratif.

Provinsi Jawa Barat menunjukkan sektor tertinggal yang banyak ditemukan pada kabupaten selatan dan wilayah perdesaan. Kabupaten Sukabumi memiliki kelemahan pada Listrik dan Gas (D, LQ=0,481; KPPW=-0,29) dan Real Estate (L, LQ=0,862; KPPW=-0,95). Kabupaten Tasikmalaya tertinggal pada Pertambangan (B, LQ=0,427; KPPW=-8,19) dan Air dan Sampah (E, LQ=0,143; KPPW=-0,64). Kabupaten Pangandaran menunjukkan sektor lemah pada Industri Pengolahan (C, LQ=0,889; KPPW=-95,10) dan Administrasi Pemerintahan (O, LQ=0,745; KPPW=-2,18). Hal ini menandakan bahwa wilayah selatan Jawa Barat masih menghadapi keterbatasan industrialisasi dan pelayanan ekonomi modern.

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sektor tertinggal yang tersebar luas dengan dominasi sektor primer tradisional dan jasa berproduktivitas rendah. Kabupaten Cilacap memiliki sektor lemah pada Pertanian (A, LQ=0,581; KPPW=-2,18), Informasi dan Komunikasi (J, LQ=0,469; KPPW=-5,17), serta Jasa Kesehatan (Q, LQ=0,446; KPPW=-5,61). Kabupaten Kebumen tertinggal pada Listrik dan Gas (D, LQ=0,678; KPPW=-6,97) dan Jasa Perusahaan (MN, LQ=0,880; KPPW=-4,71). Kabupaten Brebes memiliki kelemahan pada Transportasi (H, LQ=0,908; KPPW=-13,46) dan Jasa Kesehatan (Q, LQ=0,896; KPPW=-3,85). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian wilayah Jawa Tengah masih bergantung pada ekonomi tradisional dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor modern.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan sektor tertinggal yang relatif lebih sedikit, namun masih muncul pada beberapa sektor tertentu. Kulon Progo memiliki kelemahan pada Listrik dan Gas (D, LQ=0,602; KPPW=-0,63) dan Real Estate (L, LQ=0,468; KPPW=-0,59). Gunungkidul menunjukkan sektor lemah pada Industri Pengolahan (C, LQ=0,736; KPPW=-0,27) dan Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=0,675; KPPW=-1,04). Kota Yogyakarta tertinggal pada Konstruksi (F, LQ=0,648; KPPW=-15,12) serta Perdagangan (G, LQ=0,825; KPPW=-1,56). Hal ini menandakan bahwa DIY kuat pada jasa pendidikan dan pariwisata, tetapi belum merata pada sektor penunjang lainnya.

Provinsi Jawa Timur menunjukkan sektor tertinggal yang banyak ditemukan di kawasan selatan, tapal kuda, dan Pulau Madura. Kabupaten Pacitan memiliki kelemahan pada Listrik dan Gas (D, LQ=0,089; KPPW=-3,09) dan Perdagangan (G, LQ=0,359; KPPW=-2,57). Kabupaten Bondowoso tertinggal pada Transportasi (H, LQ=0,483; KPPW=-4,59) dan Real Estate (L, LQ=0,647; KPPW=-1,20). Kabupaten Sampang menunjukkan kelemahan pada Akomodasi dan Makan Minum (I, LQ=0,259; KPPW=-9,90) serta Jasa Kesehatan (Q, LQ=0,638; KPPW=-1,00). Kondisi ini menunjukkan adanya

kesenjangan pembangunan antara kawasan metropolitan Gerbangkertosusila dan wilayah Jawa Timur.

Provinsi Banten menunjukkan sektor tertinggal yang dominan berada di bagian selatan. Kabupaten Pandeglang memiliki kelemahan pada Air dan Sampah (E, LQ=0,357; KPPW=-19,08) dan Transportasi (H, LQ=0,717; KPPW=-27,36). Kabupaten Lebak tertinggal pada Perdagangan (G, LQ=0,642; KPPW=-2,38) dan Jasa Pendidikan (P, LQ=0,811; KPPW=-3,71). Kota Cilegon menunjukkan kelemahan pada Transportasi (H, LQ=0,410; KPPW=-29,79) dan Jasa Keuangan (K, LQ=0,338; KPPW=-4,99). Hal ini menandakan adanya perbedaan antara kawasan industri utara Banten dengan wilayah selatan yang masih berkembang lambat.

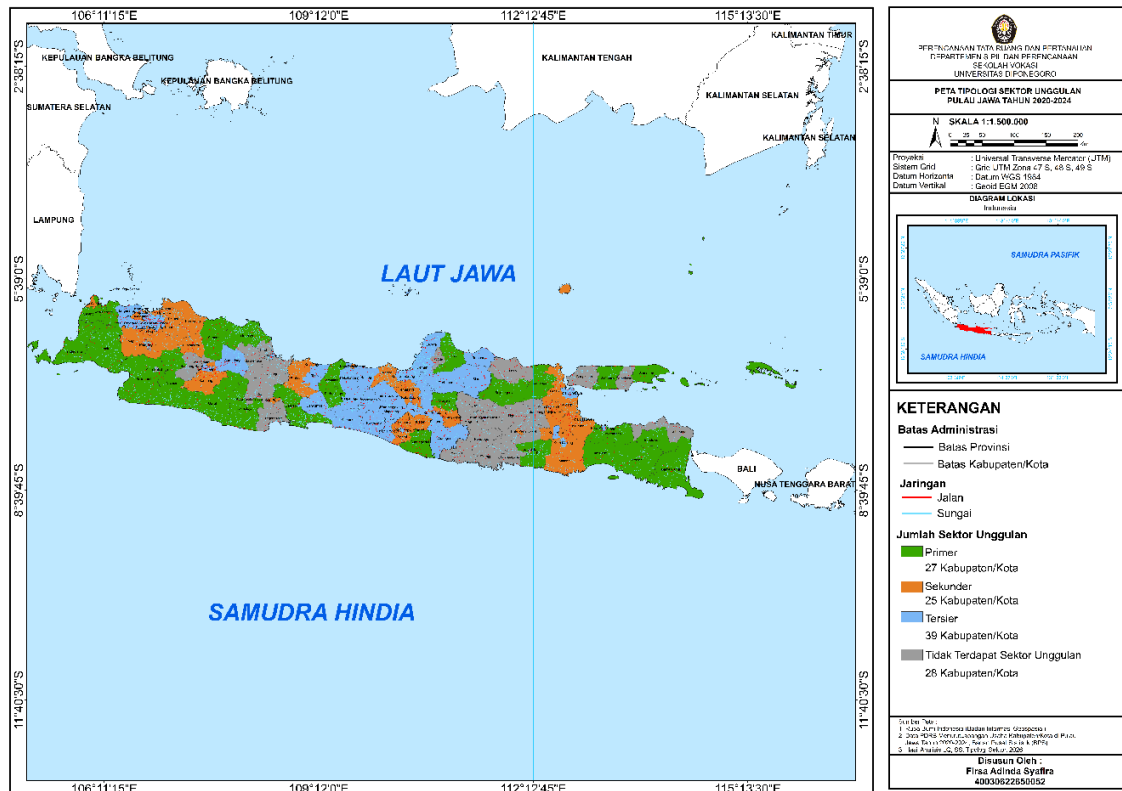
Secara keseluruhan, pola wilayah tertinggal di Pulau Jawa memperlihatkan bahwa daerah metropolitan cenderung mengalami ketertinggalan hanya pada sektor tertentu, sedangkan wilayah sub urban menunjukkan ketertinggalan multisektor. Oleh karena itu, strategi pembangunan wilayah perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, penguatan investasi sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan konektivitas antarwilayah agar ketimpangan pembangunan dapat ditekan.

### **4.3 Pemetaan Tipologi Sektor Unggulan Pulau Jawa**

Berdasarkan hasil integrasi analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift-Share* (KPPW) yang telah divisualisasikan sebelumnya, sub-bab ini menyajikan hasil klasifikasi akhir tipologi sektor unggulan di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor ekonomi. Sektor dibidang ekonomi dibagi menjadi tiga sektor (BPS, 2013; Isnanto *et al.*, 2022; Antu *et al.*, 2023; Kurniawan *et al.*, 2025; BPS, 2025):

- a) Sektor Primer yaitu sektor ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung, yang terdiri dari pertanian, pertambangan dan penggalian.
- b) Sektor Sekunder adalah sektor ekonomi yang mengolah hasil sektor primer menjadi barang jadi, yang terdiri dari industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan pengadaan air bersih, kontruksi.
- c) Sektor Tersier adalah sektor ekonomi yang menghasilkan suatu jasa, terdiri dari perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan dengan pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya.

Berdasarkan analisis data PDRB periode 2020-2024, diperoleh hasil klasifikasi tipologi wilayah di Pulau Jawa yang divisualisasikan pada peta berikut.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 52** Peta Tipologi Sektor Unggulan Pulau Jawa

Sektor Primer terdapat pada 27 wilayah yang umumnya berada pada kawasan pesisir, agraris, serta wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam. Dalam penelitian ini, sektor primer mencakup aktivitas pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sehingga karakter wilayah primer tidak hanya menunjukkan dominasi kawasan pangan, tetapi juga wilayah berbasis sumber daya mineral dan energi. Konsentrasi sektor primer terlihat pada kawasan Tapal Kuda yang meliputi Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso. Kawasan ini didominasi aktivitas pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku primer di wilayah timur Pulau Jawa. Selain itu, sektor primer juga terpusat wilayah selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Cilacap, Purbalingga, dan Gunungkidul yang memiliki karakter agraris dengan dominasi aktivitas pertanian dan perikanan.

Pada kawasan pesisir utara dan wilayah berbasis sumber daya alam, sektor primer juga terkonsentrasi di Indramayu, Bojonegoro, Lamongan, Sampang, dan Sumenep yang

menunjukkan keterkaitan dengan aktivitas perikanan, migas, maupun pertambangan dan penggalian. Wilayah Bojonegoro menunjukkan sektor primer yang kuat akibat dominasi sektor pertambangan dan penggalian berbasis migas. Sementara itu, pada wilayah Banten bagian barat, konsentrasi sektor primer terlihat pada Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Serang yang masih memiliki dominasi aktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan pesisir. Secara spasial, pola tersebut menunjukkan bahwa sektor primer cenderung berkembang pada wilayah non-metropolitan yang masih memiliki ketersediaan sumber daya alam, lahan produksi, serta aktivitas ekonomi berbasis ekstraktif dan agraris yang relatif lebih dominan dibandingkan sektor industri maupun jasa.

Pada Sektor Sekunder terdapat pada 25 wilayah yang didominasi aktivitas industri pengolahan, konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta pengadaan air dan pengelolaan limbah. Secara spasial, sektor sekunder membentuk pola konsentrasi yang memanjang mengikuti koridor logistik dan kawasan industri utama di Pulau Jawa, khususnya pada jalur Pantai Utara (Pantura) yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap jaringan transportasi, pelabuhan, kawasan pergudangan, dan pusat distribusi regional. Konsentrasi sektor sekunder terlihat pada kawasan metropolitan Jabodetabekjur, terutama pada Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon yang berperan sebagai pusat manufaktur dan kawasan industri terpadu. Selain itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung juga menunjukkan dominasi sektor sekunder melalui aktivitas industri pengolahan dan konstruksi pada wilayah penyangga metropolitan. Pada Jawa Tengah, pemusatan sektor sekunder terkonsentrasi pada kawasan Kedungsepur yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang sebagai koridor industri dan logistik utama Kota Semarang. Konsentrasi sektor sekunder juga terlihat pada kawasan Bregas melalui Kabupaten Brebes dan Kota Tegal, serta pada kawasan Subosukawonosraten seperti Klaten dan Karanganyar yang memiliki dominasi aktivitas industri pengolahan skala regional. Selain itu, Kota Pekalongan menunjukkan karakter sekunder melalui dominasi industri pengolahan berbasis produksi lokal.

Pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor sekunder terkonsentrasi pada Kabupaten Bantul dan Sleman yang memiliki dominasi aktivitas konstruksi dan industri penunjang kawasan perkotaan. Sementara itu, pada Jawa Timur konsentrasi sektor sekunder pada kawasan Gerbangkertosusila yang meliputi Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Kawasan ini membentuk sabuk industri utama di Jawa Timur yang didukung oleh kedekatan dengan Kota Surabaya sebagai pusat distribusi regional. Pola spasial sektor sekunder menunjukkan adanya pemusatan aktivitas manufaktur dan industri pengolahan pada wilayah

dengan aksesibilitas tinggi, konektivitas logistik kuat, serta keterkaitan langsung dengan kawasan metropolitan dan pusat distribusi ekonomi Pulau Jawa.

Sektor Tersier terdiri atas aktivitas perdagangan, transportasi, pergudangan, akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lainnya. Berorientasi pada pelayanan serta aktivitas ekonomi perkotaan. Sektor tersier terdapat pada 39 wilayah dan terkonsentrasi pada kota-kota inti metropolitan serta pusat pelayanan regional di Pulau Jawa. Pola ini terlihat kuat pada kawasan Jabodetabekjur, DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, dan sebagian pusat perkotaan penyangga lainnya yang menunjukkan dominasi aktivitas jasa metropolitan. Pada Jawa Barat, konsentrasi sektor tersier pada Kota Bandung dan Kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan pelayanan regional.

Pada Jawa Tengah, sektor tersier terkonsentrasi pada kawasan Solo Raya, sektor tersier terdapat di Kota Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, dan Boyolali yang didominasi aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, dan pelayanan perkotaan regional. Pada kawasan Kedungsepur, sektor tersier terkonsentrasi pada Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Demak sebagai pusat jasa dan distribusi wilayah metropolitan Semarang. Selanjutnya pada kawasan Purwomanggung, sektor tersier terlihat pada Wonosobo, Temanggung, dan Kota Magelang yang didominasi aktivitas jasa pendidikan, perdagangan, dan pelayanan regional. Sementara itu pada kawasan Barlingmascakeb, konsentrasi sektor tersier terlihat pada Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen yang menunjukkan dominasi aktivitas perdagangan dan jasa regional di wilayah selatan Jawa Tengah. Selain itu, sektor tersier juga terdapat pada Jepara, Blora, Rembang, Batang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pelayanan kawasan pesisir utara Jawa Tengah. Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor tersier terkonsentrasi pada Kota Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan jasa utama. Sementara itu di Jawa Timur, konsentrasi sektor tersier terlihat pada Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Kota Batu yang menunjukkan dominasi aktivitas perdagangan, jasa, pendidikan, dan pelayanan perkotaan. Pola ini menunjukkan bahwa sektor tersier cenderung berkembang pada wilayah perkotaan dengan intensitas interaksi ekonomi tinggi serta memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan regional dan metropolitan.

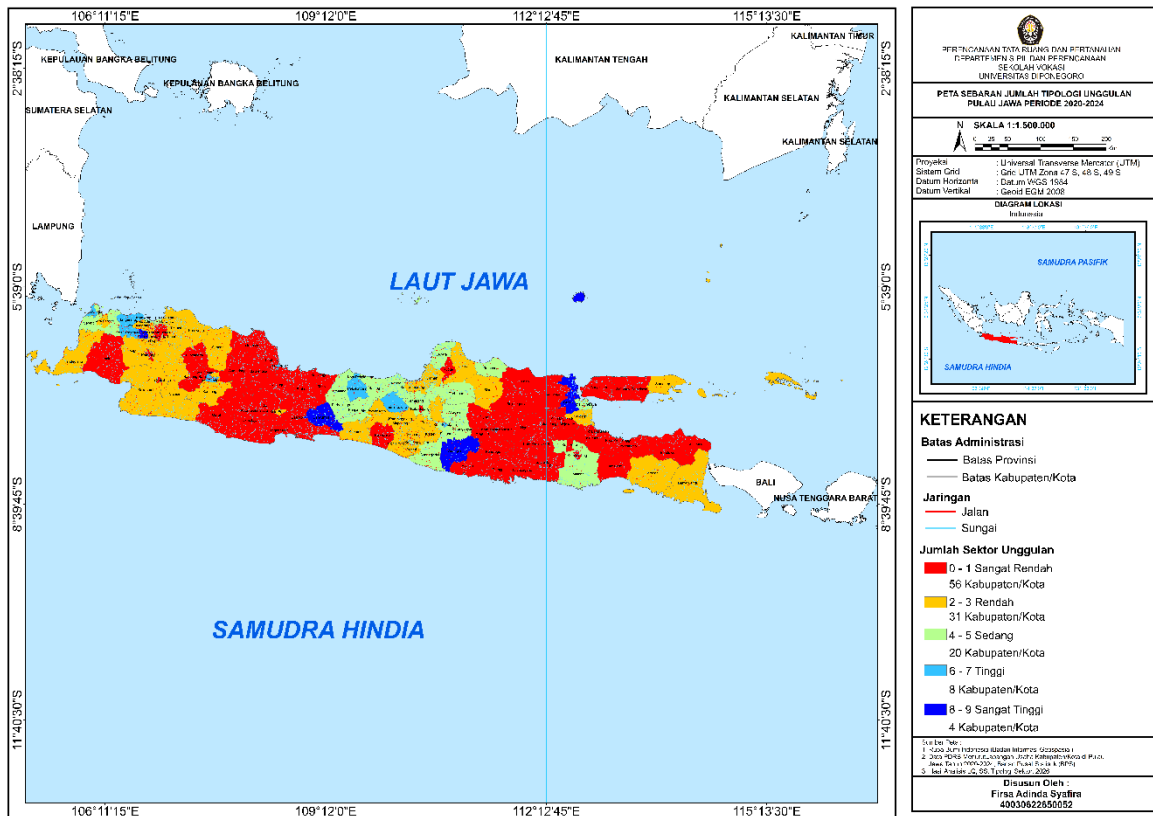
Terdapat 28 wilayah yang tidak memiliki konsentrasi satu sektor unggulan dominan. Kelompok wilayah ini mencakup daerah yang belum memiliki sektor dominan untuk memenuhi kriteria sebagai sektor basis ( $LQ > 1$ ) sekaligus memiliki daya saing pertumbuhan ( $KPPW > 0$ ) secara bersamaan. Pada Jawa Barat, terdapat pada wilayah Ciamis, Kuningan,

Kabupaten Cirebon, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Sebagian wilayah tersebut berada pada kawasan Rebana dan Bandung Raya yang menunjukkan struktur ekonomi relatif tersebar tanpa dominasi sektor unggulan tertentu. Pada Jawa Tengah, kategori tidak dominan hanya ditemukan pada Kabupaten Kudus yang berada pada kawasan Muria Raya.

Sementara pada Jawa Timur, terkonsentrasi cukup luas pada kawasan Mataraman dan sebagian wilayah Madura, meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bangkalan, dan Pamekasan. Selain itu, kategori ini juga muncul pada Situbondo di kawasan Tapal Kuda, Tuban di pesisir utara Jawa Timur, serta Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto. Aktivitas ekonomi di 28 wilayah tersebut terhambat pada kategori Sektor Potensial (unggul secara basis namun pertumbuhan rendah), tetapi tetap berada pada Sektor Berkembang (pertumbuhan tinggi namun belum menjadi basis), atau bahkan Sektor Tertinggal, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam menangkap efek limpahan (*spillover effect*) dari pusat-pusat pertumbuhan industri dan jasa di wilayah sekitarnya. Secara keseluruhan, ekonomi Pulau Jawa mencerminkan struktur yang sangat linier mengikuti jalur infrastruktur utama.

Struktur Ekonomi Pulau Jawa Tipologi sektor unggulan Tahun 2020-2024 menunjukkan pola integrasi jalur infrastruktur utama. Wilayah Utara (Pantura) terkonsentrasi sebagai industri manufaktur (Sekunder) karena aksesibilitas logistik. Wilayah Selatan dan Timur Jawa berfungsi sebagai basis penyangga pangan dan sumber daya alam (Primer) bersifat non-metropolitan. Pada sektor jasa (Tersier) mengelompok pada simpul-simpul kota inti metropolitan sebagai pusat pelayanan regional.

Analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Shift-Share* menghasilkan identifikasi sektor-sektor unggulan pada masing-masing kabupaten/kota di Pulau Jawa. Hasil identifikasi tersebut kemudian diagregasikan untuk memperoleh hasil mengenai kapasitas ekonomi wilayah. Pada tahap ini, analisis dilakukan pada keseluruhan sektor basis dan berdaya saing yang terdapat di setiap wilayah. Perhitungan jumlah sektor unggulan pada masing-masing kabupaten/kota digunakan untuk mengidentifikasi tingkat struktur ekonomi wilayah. Jumlah sektor unggulan pada setiap kabupaten/kota selanjutnya dianalisis secara spasial untuk melihat pola persebaran kapasitas ekonomi wilayah di Pulau Jawa. Distribusi spasial tersebut disajikan dalam peta berikut.



Sumber: Analisis Penulis, 2026

**Gambar 4. 53** Peta Sebaran Jumlah Tipologi Unggulan Pulau Jawa Tahun 2020-2024

Peta di atas menunjukkan distribusi jumlah sektor unggulan pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Klasifikasi warna pada peta menggambarkan variasi jumlah sektor unggulan yang terdapat pada masing-masing wilayah.

**Tabel 4. 10** Klasifikasi Jumlah Sektor Unggulan Tahun 2020-2024

| Klasifikasi (Jumlah Sektor) | Jumlah Wilayah | Daftar Kabupaten/Kota  |
|-----------------------------|----------------|--|
| 0 - 1                       | 56             | Adm. Kep. Seribu, Kota Adm. Jakarta Timur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, |

| Klasifikasi<br>(Jumlah<br>Sektor) | Jumlah<br>Wilayah | Daftar Kabupaten/Kota  |
|-----------------------------------|-------------------|--|
|                                   |                   | Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Batu, Kabupaten Lebak   |
| 2 - 3                             | 31                | Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kota Serang |
| 4 - 5                             | 20                | Kota Adm. Jakarta Utara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunungkidul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Serang   |
| 6 - 7                             | 8                 | Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pekalongan, Kota Surakarta, Kota Madiun, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon   |
| 8 - 9                             | 4                 | Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gresik, Kota Tangerang Selatan   |
| Total                             | 119               |  |

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Tabel klasifikasi di atas menunjukkan distribusi jumlah sektor unggulan pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Kelas 0–1 sektor unggulan merupakan kelompok dengan jumlah daerah terbanyak, dengan 56 kabupaten/kota atau 47,06% dari total kabupaten/kota di Pulau Jawa. Menunjukkan bahwa struktur ekonomi pada sebagian besar daerah masih terkonsentrasi pada 0-1 sektor unggulan sehingga tingkat ekonomi daerah relatif rendah. Kelas 2–3 sektor unggulan mencakup 31 kabupaten/kota atau 26,05% dari total kabupaten/kota. Sementara itu, kelas 4–5 sektor unggulan terdiri atas 20 kabupaten/kota atau 16,81%. Keberadaan lebih dari satu sektor unggulan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu sektor tertentu, melainkan didukung oleh beberapa sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kelompok dengan jumlah sektor unggulan tinggi, terdapat 8 kabupaten/kota yang berada pada kelas 6–7 sektor unggulan atau 6,72% dari total kabupaten/kota. Adapun kelas tertinggi, yaitu 8–9 sektor unggulan, hanya terdiri atas 4 kabupaten/kota atau 3,36%. Jumlah yang relatif sedikit pada kedua kelas tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan struktur ekonomi yang sangat beragam masih terbatas di Pulau Jawa. Distribusi jumlah sektor unggulan menunjukkan bahwa 89,92% kabupaten/kota di Pulau Jawa berada pada kelompok 0–5 sektor unggulan, sedangkan 10,08% lainnya berada pada kelompok 6–9 sektor unggulan.

#### 4.4 Kontribusi Hasil Penelitian terhadap Tata Ruang dalam Aspek Ekonomi

Kontribusi penelitian terhadap tata ruang ditunjukkan melalui aspek ekonomi, klasifikasi karakteristik ekonomi berdasarkan tipologi sektor, serta pemetaan tipologi sektor unggulan pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Ketiga bahasan tersebut memberikan informasi mengenai potensi dan karakteristik ekonomi wilayah dalam bentuk analisis maupun peta. Rincian kontribusi penelitian terhadap kajian tata ruang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4. 11 Kontribusi Tata Ruang Aspek Ekonomi**

| No. | Kontribusi Penelitian   | Fungsi dalam Kajian Tata Ruang                    | Penjelasan   |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Menganalisis sektor ekonomi pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa   | Identifikasi Potensi Ekonomi Wilayah              | Menganalisis sektor ekonomi menggunakan metode <i>Location Quotient</i> (LQ) dan <i>Shift Share</i> untuk mengetahui sektor basis serta kinerja pertumbuhan ekonomi pada setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa.                        |
| 2.  | Mengklasifikasikan karakteristik ekonomi Tipologi Sektor pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa              | Klasifikasi Karakterisasi Ekonomi Wilayah         | Mengelompokkan karakteristik ekonomi setiap kabupaten/kota berdasarkan hasil <i>Location Quotient</i> (LQ) dan <i>Shift Share</i> sehingga diperoleh tipologi sektor yang menggambarkan karakteristik ekonomi masing-masing wilayah. |
| 3.  | Memetakan tipologi sektor unggulan pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa berdasarkan hasil analisis spasial | Visualisasi Spasial Karakteristik Ekonomi Wilayah | Menyajikan persebaran tipologi sektor unggulan pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa dalam bentuk peta sehingga pola spasial karakteristik ekonomi setiap wilayah dapat diketahui secara visual.                                     |

Sumber: Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan Tahapan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021. Berdasarkan **4. 7 Kontribusi Tata Ruang Aspek Ekonomi**, kontribusi penelitian berada pada tahapan Pengumpulan dan analisis data Rencana Tata Ruang Wilayah. Analisis menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* menghasilkan informasi mengenai sektor basis dan karakteristik ekonomi pada setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa. Hasil analisis tersebut kemudian diklasifikasikan

ke dalam tipologi sektor dan disajikan dalam bentuk peta tipologi sektor unggulan sehingga persebaran karakteristik ekonomi wilayah dapat divisualisasikan secara spasial. Luaran penelitian memberikan kondisi eksisting karakteristik ekonomi pada 119 kabupaten/kota di Pulau Jawa sebagai informasi pendukung pada tahapan prakajian dalam penyusunan RTRW.